



Anti Korupsi

Sebagai Pedagogi Moral

**Strategi Kurikulum, dan Transformasi
Karakter Bangsa**



Fadil Mas'ud, S.Sos., S.H., M.Hum
Angnesia Fifi Kontesa | Faransina Letma
Tropina Kareri Hara Toga | Mario Ferdinan Bau
Ferawati Bana | Regina Tutoq
Natalia Fransiska Alunat | Sur Ical Lani
Maria Cindiany Baru | Teresia Anin

ANTI KORUPSI SEBAGAI PEDAGOGI MORAL

Strategi Kurikulum dan Transformasi Karakter Bangsa

Penulis:

Fadil Mas'ud, S.Sos., S.H., M.Hum

Angnesia Fifin Kontesa

Faransina Letma

Tropina Kareri Hara Toga

Mario Ferdinan Bau

Ferawati Bana

Regina Tutoq

Natalia Fransiska Alunat

Sur Ical Lani

Maria Cindiany Baru

Teresia Anin



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ANTI KORUPSI SEBAGAI PEDAGOGI MORAL

Strategi Kurikulum dan Transformasi Karakter Bangsa

Fadil Mas'ud, S.Sos., S.H., M.Hum

Angnesia Fifin Kontesa

Faransina Letma

Tropina Kareri Hara Toga

Mario Ferdinan Bau

Ferawati Bana

Regina Tutoq

Natalia Fransiska Alunat

Sur Ical Lani

Maria Cindiany Baru

Teresia Anin

TATA LETAK	: Sari
DESAIN SAMPUL	: Adhar
SUMBER	: www.tdjpublisher.com
ISBN	: 978-634-279-116-5 (PDF)
CETAKAN PERTAMA	: Mei 2026
UKURAN	: v + 168 Hal; 17,6 cm x 25 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga buku yang berjudul Anti Korupsi sebagai Pedagogi Moral: Strategi Kurikulum dan Transformasi Karakter Bangsa ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kepedulian sekaligus kontribusi akademik terhadap upaya membangun budaya antikorupsi melalui dunia pendidikan.

Korupsi merupakan salah satu persoalan besar yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak tatanan moral, sosial, hukum, dan kepercayaan publik. Praktik korupsi yang terus berkembang menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum dan penindakan semata, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan karakter dan kesadaran moral sejak dini. Dalam konteks inilah pendidikan memiliki peran strategis sebagai sarana pembentukan nilai, sikap, dan perilaku antikorupsi.

Buku ini membahas tentang pentingnya pendidikan anti korupsi sebagai upaya membangun karakter bangsa yang berintegritas, beretika, dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan filosofis, sosial, budaya, psikologis, hingga kebijakan publik, buku ini menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga masalah moral yang dapat merusak peradaban bangsa. Pembahasan dalam buku ini mencakup konsep pedagogi moral, nilai-nilai dasar pendidikan anti korupsi, strategi pembelajaran di kelas, peran guru sebagai agen moral, hingga pentingnya budaya sekolah yang menjunjung tinggi integritas. Selain itu, buku ini juga menguraikan bagaimana pendidikan dapat menjadi sarana utama dalam membentuk generasi yang jujur, adil, dan memiliki kesadaran etis untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi menuju Indonesia Emas 2045. Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa, pendidik, dan masyarakat yang peduli terhadap pembangunan karakter dan masa depan bangsa. Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, guru, peneliti, praktisi pendidikan, serta para pengambil kebijakan dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Lebih dari itu, buku ini diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai kejujuran.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dunia pendidikan, dan upaya bersama dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bab 1 Landasan Filosofis Pendidikan Anti Korupsi	1
1.1 Hakikat korupsi sebagai problem moral dan peradaban	1
1.1.1 Pengertian Dasar Korupsi	2
1.1.2 Dampak terhadap Peradaban	2
1.1.3 Implikasi Pendidikan PPKn.....	3
1.2 Pendidikan sebagai ruang pembentukan etika publik	4
1.2.1 Konsep Etika Publik dalam Pendidikan	4
1.2.2 Peran Strategis Pendidikan PPKn	5
1.2.3 Tantangan dan Inovasi Kontemporer	5
1.3 Pedagogi moral dalam pendidikan	6
1.3.1 Landasan Filosofi Pendidikan Moral	7
1.3.2 Teori Utama dalam Perspektif Filsafat.....	7
1.4 Urgensi pendidikan anti korupsi bagi masa depan bangsa	8
1.4.1 Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Sejak Dini	9
1.4.2 Kontribusi terhadap Pembangunan Nasional.....	9
Bab 2 Korupsi dalam Perspektif Sosial, Budaya, dan Psikologi.....	11
2.1 Pengertian Korupsi Dalam Perspektif Struktural Dan Kultural.....	11
2.1.1 Korupsi sebagai Fenomena Struktural dan Kultural.....	11
2.1.2 faktor struktural penyebab terjadinya korupsi	13
2.2 Mentalitas Permisif dan Budaya Patronase	15
2.2.1 Hubungan Mentalitas Permisif dengan Praktik Korupsi	17
2.2.2 Pengaruh Budaya Patronase dalam Birokrasi dan Politik.....	18
2.2.3 Dampak Patronase Budaya terhadap Tata Kelola Pemerintahan.....	19
2.3 Psikologi Moral Pelaku Korupsi.....	20
2.3.1 Pengertian psikologi moral dalam perilaku manusia.....	20
2.3.2 Faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku korupsi	21
2.3.3 Motivasi dan rasionalisasi pelaku korupsi	22
2.4. Dampak Korupsi Terhadap Kepercayaan Sosial dan Pembangunan.....	23
2.4.1 Pengaruh korupsi terhadap stabilitas sosial	23
2.4.2 Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	24
Bab 3 Konsep Pedagogi Moral dalam Pendidikan	26
3.1 Pengertian pedagogi moral dan karakter	26
3.2 Teori perkembangan moral dalam pendidikan.....	28
3.3 Peran sekolah sebagai komunitas etis	29
3.4 Integrasi Nilai Moral dalam Praktik Pembelajaran.....	32
Bab 4 Nilai-nilai Dasar Pendidikan Anti Korupsi	36
4.1 Kejujuran Sebagai Fondasi Integritas.....	38
4.1.1 Makna kejujuran	38
4.1.2 Makna Integritas	39

4.2 Tanggung Jawab Dan Etos Pelayanan Publik	40
4.3 Keadilan, Kepedulian, Dan Keberanian Moral	41
4.3.1 Keadilan.....	41
4.3.2 Kepedulian.....	42
4.3.3 Keberanian Moral.....	43
4.4 Keteladanan Sebagai Metode Pendidikan Nilai	44
Bab 5 Desain Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi	46
5.1 Prinsip Pengembangan Kurikulum Berbasis Nilai	46
5.1.1 Orientasi pada Pembentukan Karakter	46
5.1.2 Integrasi Nilai dalam Proses Pembelajaran	50
5.1.3 Kontekstualisasi Nilai dalam Kehidupan Nyata	52
5.1.4 Partisipasi Aktif Peserta Didik Dalam kehidupan nyata.....	54
5.2 Model Integrasi Dalam Mata Pelajaran.....	57
5.2.1 Integrasi Tematik	58
5.2.2 Integrasi Konseptual.....	60
5.2.3 Integrasi Metodologis.....	63
5.2.4 Integrasi melalui Kegiatan Ekstrakurikuler	66
5.3 Kurikulum Tersembunyi (Hidden Curriculum) dan Budaya Sekolah	68
5.3.1 Pengertian Kurikulum Tersembunyi	68
5.3.2 Peran Budaya Sekolah dalam Pendidikan Anti Korupsi.....	71
5.3.3 Keteladanan Guru sebagai Pembentuk Karakter	73
5.3.4 Lingkungan Sekolah sebagai Ekosistem Integritas.....	75
5.4 Evaluasi Kurikulum Pendidikan Karakter Anti Korupsi	77
5.4.1 Tujuan Evaluasi Kurikulum	79
5.4.2 Evaluasi Kognitif, Afektif, dan Perilaku.....	81
5.4.3 Metode Evaluasi yang Holistik.....	82
5.4.4 Pemanfaatan Hasil Evaluasi.....	84
Bab 6 STRATEGI PEMBELAJARAN ANTI KORUPSI DI KELAS.....	87
6.1 Pendekatan Reflektif dan Dialogis Dalam Pembelajaran Moral	87
6.1.1 Konsep Pendekatan Reflektif dan Dialogis.....	88
6.1.2 Peran Pendekatan Reflektif dan Dialogis dalam Pembentukan Sikap Anti Korupsi.....	88
6.2 Studi Kasus, Simulasi dan Problem Based Learning.....	90
6.2.1 Studi Kasus	90
6.2.2 Simulasi.....	91
6.2.3 Problem Based Learning.....	92
6.3 Pembelajaran Berbasis Proyek Integritas Sosial	93
6.3.1 Tujuan Pembelajaran Berbasis Proyek Integritas Sosial.....	94
6.3.2 Karakteristik Pembelajaran Berbasis Proyek Integritas Sosial.....	95
6.4 Penilaian Autentik Dalam Pendidikan Nilai	96
6.4.1 Ciri-ciri Penilaian Autentik.....	97
6.4.2 Prinsip-Prinsip Penilaian Autentik.....	98
6.4.3 Tujuan Penilaian Autentik.....	98
Bab 7 PERAN GURU SEBAGAI AGEN MORAL	100
7.1 Guru sebagai teladan Integritas.....	100
7.1.1 Implementasi Integritas Guru dalam Praktik Sehari-hari.....	101
7.1.2 Tantangan dalam menjaga integritas Guru	102
7.2 Kompetensi Pedagogik dan Etika Profesional	102

7.2.1 Integrasi nilai Antikorupsi dalam proses Pembelajaran	104
7.2.1 Penerapan Etika Profesional	104
7.2.3 Penguatan kompetensi Guru melalui Refleksi dan Pengembangan diri	104
7.3 Kepemimpinan Moral dalam Kelas	105
7.3.1 Membangun Budaya kelas berbasis Nilai	106
7.3.2 Pengambilan Keputusan yang Adil dan Beretika	107
7.3.3 Mendorong dialog dan kesadaran moral siswa	107
7.3.4 Penanganan Konflik secara Edukatif dan Berkeadilan	107
7.4 Pengembangan Profesional Guru Berorientasi Nilai	108
7.4.1 Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan Pelatihan	109
7.4.2 Refleksi Diri sebagai upaya peningkatan Profesionalisme	109
7.4.3 Kolaborasi dan Komunitas belajar guru	109
7.4.4 Pemanfaatan Teknologi dalam Pengembangan Profesional	110
7.4.5 Komitmen Moral dalam pengembangan diri berkelanjutan	111
Bab 8 Budaya Sekolah Dan Ekosistem Integritas	113
8.1 Sekolah Sebagai Komunitas Berintegritas	113
8.1.1 Pengertian dan Nilai Dasar Integritas di Sekolah	114
8.1.2 Peran Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai Teladan Integritas	115
8.1.3 Budaya Kejujuran dalam Proses Pembelajaran Mendukung Perilaku Etis	116
8.2 Tata Kelola Sekolah yang Transparan	117
8.2.1 Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Sekolah	117
8.2.2 Sistem Administrasi dan Pelaporan yang Terbuka	118
8.2.3 Pengelolaan Keuangan Sekolah yang Jujur dan Bertanggung Jawab	118
8.3 Partisipasi Siswa dalam Gerakan Anti Korupsi	119
8.3.1 Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Sekolah	119
8.3.2 Peran Organisasi Siswa dalam Menanamkan Nilai Integritas	120
8.3.3 Kegiatan Ekstrakurikuler Berbasis Nilai Kejujuran dan Tanggung Jawab	121
8.4 Kolaborasi Sekolah, Keluarga dan masyarakat	121
8.4.1 Peran Keluarga dalam Menanamkan Nilai Integritas Sejak Dini	122
8.4.2 Sinergi Sekolah dan Orang Tua dalam Pendidikan Karakter	122
8.4.3 Keterlibatan Masyarakat dalam Membangun Budaya Integritas	122
Bab 9 Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik	123
9.1 Kebijakan Pendidikan Karakter Nasional	124
9.2 Regulasi dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi	129
9.2.1 Landasan Regulasi Pendidikan Anti Korupsi	130
9.2.2 Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum	130
9.2.3 Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Lingkungan Pendidikan	131
9.2.4 Penguatan Kebijakan dalam Praktik Pendidikan Anti Korupsi	132
9.3 Peran Lembaga Negara dan Masyarakat Sipil	133
9.3.1 Peran Lembaga Negara dalam Pendidikan Anti Korupsi	133
9.3.2 Peran Lembaga Pendidikan sebagai Agen Perubahan	134
9.3.3 Peran Masyarakat Sipil dalam Pendidikan Anti Korupsi	135
9.3.4 Kolaborasi Lembaga Negara dan Masyarakat Sipil	136
9.4 Tantangan Implementasi di Tingkat Lokal dan Nasional	137
9.4.1 Kesenjangan Kapasitas Institusi Pendidikan	138
9.4.2 Koordinasi Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	139
9.4.3 Tantangan Budaya dan Persepsi Sosial terhadap Korupsi	140
9.4.4 Keterbatasan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	141
Bab 10 Transformasi Karakter Bangsa Melalui Pendidikan	142

10.1 Pendidikan Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi Jangka Panjang	142
10.1.1 Internalisasi Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan.....	144
10.1.2 Pendekatan Pembelajaran Berbasis Nilai dalam Pendidikan Anti Korupsi	146
10.2 Membangun Generasi Berintegritas di Era Global	148
10.2.1 Tantangan Moral di Era Global.....	149
10.2.2 Peran Pendidikan dalam Membentuk Integritas	150
10.3 Gerakan Nasionalisme Pendidikan Moral Anti Korupsi	151
10.3.1 Implementasi Gerakan Nasional dalam Dunia Pendidikan	153
10.3.2 Tantangan dan Evaluasi Gerakan Nasional Pendidikan Anti Korupsi	154
10.4 Visi Masa Depan: Masyarakat Beretika dan Berkeadaban	155
10.4.1 Karakteristik Masyarakat Beretika	156
10.4.2 Masyarakat Berkeadaban sebagai Tujuan Pendidikan.....	157
DAFTAR PUSTAKA	158

Bab 1 Landasan Filosofis Pendidikan Anti Korupsi

Dalam zaman ketika korupsi telah menjadi masalah moral yang menggerogoti dasar peradaban bangsa Indonesia, Bab 1 ini mengulas dasar-dasar filosofis pendidikan anti-korupsi sebagai solusi kreatif dalam memperbaharui etika publik. Masalah ini bukan sekadar isu ekonomi atau hukum, tetapi juga merupakan penurunan nilai-nilai fundamental yang merusak kesatuan sosial serta kepercayaan publik terhadap lembaga negara, seperti yang terlihat dari indeks persepsi korupsi Indonesia yang terus rendah. Sebagai referensi bagi mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pembahasan ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya perubahan pendidikan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif dalam menciptakan kesadaran moral secara kolektif. Pendekatan substantif ini mengedepankan penggabungan pemikiran etika dalam kurikulum PPKn, di mana mahasiswa diajak untuk merenungkan dilema moral yang dihadapi sehari-hari guna membentuk karakter integritas yang dapat beradaptasi dengan tantangan zaman.

1.1 Hakikat korupsi sebagai problem moral dan peradaban

Korupsi, yang merupakan fenomena yang kompleks dan telah menggerogoti berbagai aspek kehidupan di Indonesia, memerlukan pemikiran yang serius: ia bukan hanya sekadar pelanggaran aturan, tetapi juga penyimpangan moral yang merusak dasar peradaban. Bagi mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pemahaman tentang isu ini sangat penting untuk merancang langkah-langkah pendidikan yang baru, mengubah pola pikir dari pendekatan yang menekan menjadi yang pencegahan dengan penekanan pada pembentukan karakter yang baik.

Bagi para pelajar, memahami masalah ini sangat krusial untuk mengembangkan strategi pendidikan yang baru, beralih dari cara pandang yang memaksa menjadi yang bersifat pencegahan dengan fokus pada pengembangan karakter positif. Metode yang baru ini memerlukan penyertaan refleksi filosofis dalam kurikulum PPKn, seperti analisis kasus korupsi dengan perspektif etika Aristoteles, agar mahasiswa tidak sekadar mengingat norma, tetapi juga dapat memperbaharui etika publik melalui pengajaran transformatif yang membangun kesadaran moral mandiri.

1.1.1 Pengertian Dasar Korupsi

Korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas dengan sengaja demi kepentingan pribadi, yang tentunya mencerminkan masalah moral pada pelaku. Dari sudut pandang lain, korupsi melampaui aspek hukum dan ekonomi, menjadi gambaran kegagalan manusia dalam mencapai "*eudaimonia*" atau tingkat kebahagiaan tertinggi yang disampaikan oleh Aristoteles, di mana kebajikan menjadi jalan tengah yang mengarah pada kesejahteraan individu dan masyarakat. Pemahaman baru ini berasal dari pengaruh korupsi dalam budaya birokrasi dan sosial di Indonesia, di mana fenomena ini berkembang pesat setelah reformasi menjadi penyakit kronis yang bersifat multi-dimensi, yang dipicu oleh hubungan patron-klien dan norma pragmatis yang mengesankan ketidakadilan sebagai sesuatu yang wajar.

Secara etimologi, pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalahgunaan atau penyimpangan dana negara (termasuk perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain) demi keuntungan pribadi atau pihak lain. Dalam *Webster's Third New International Dictionary*, korupsi adalah suatu ajakan (dari seorang pejabat publik) yang didasarkan pada pertimbangan yang tidak pantas (contohnya suap) untuk melanggar tanggung jawab. Sementara itu, dalam perspektif hukum, korupsi diartikan sebagai tindakan tercela, buruk, bejat, mudah disuap, tindakan yang merendahkan atau memfitnah, menyimpang dari prinsip moral, serta tidak etis.

Korupsi mencerminkan konflik antara keinginan pribadi dan tatanan keadilan kosmik, di mana Aristoteles mengajarkan bahwa akrasia atau kelemahan kehendak adalah penyebab terjadinya penyimpangan etis. Bagi mahasiswa, pengertian ini menuntut pembaruan dalam pendekatan pendidikan: tidak hanya sebatas menghafal definisi, tetapi juga menganalisis fenomena korupsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kolusi kecil di pasar tradisional yang mencerminkan pola sistemik yang lebih luas. Oleh karena itu, korupsi bukanlah satu hal yang terpisah, melainkan gambaran dari kegagalan bersama dalam mencapai tujuan manusia yang sebagai makhluk sosial.

Pemahaman lebih mendalam semakin penting saat dikaitkan dengan keadaan Indonesia saat ini, di mana korupsi telah berubah menjadi budaya tersembunyi yang diterima oleh rasionalitas utilitarian, menjauhkan negara dari tujuan keadilan sosial. Bagi calon pengajar PPKn, inovasi berpikir terletak pada penciptaan kerangka konseptual yang menggabungkan pemikiran Barat dengan nilai-nilai luhur lokal, sehingga definisi korupsi dapat bersifat dinamis dan menjadi alat untuk mengubah kesadaran kolektif.

1.1.2 Dampak terhadap Peradaban

Korupsi mengancam keberlangsungan peradaban dengan menghambat perkembangan yang berkelanjutan, melemahkan solidaritas sosial, serta menciptakan ketidakadilan sistemik yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Sebagai "kanker moral" yang merusak lingkungan rumah tangga dan institusi pendidikan seperti fenomena menyontek yang mencerminkan relativisme moral menghasilkan generasi yang

kurang memiliki rasa peduli, serta merusak ketahanan nasional melalui menurunnya nilai kebersamaan dan kerjasama. Bagi PPKn, hal ini memerlukan pendekatan pendidikan yang membangun "intelektualisme etis" ala Aristoteles: pengetahuan tentang eksistensi yang diperoleh melalui pendidikan untuk mencapai manusia yang ideal, di mana refleksi filosofis berfungsi sebagai sarana untuk menangani sikap acuh tak acuh terhadap moral.

Dampak pada peradaban mencapai titik puncak ketika korupsi menyebabkan anomi menurut Durkheim hilangnya norma bersama yang merusak dasar negara hukum dan demokrasi yang substansial di Indonesia. Dari sudut pandang mahasiswa PPKn, itu mengharuskan adanya inovasi dalam kurikulum yang berfokus pada kasus-kasus nyata, seperti analisis skandal e-KTP, untuk menunjukkan bagaimana korupsi menimbulkan "perpecahan sosial" yang menghalangi cita-cita bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, pemulihan peradaban tergantung pada pendidikan yang tidak hanya mengktirisi, tetapi juga menghidupkan Kembali etos kebangsaan melalui kisah-kisah hereoik penanggulangan korupsi

Dampak yang transendental ini mencerminkan krisis eksistensial peradaban, di mana korupsi menjadi penghalang bagi pencapaian phronesis kebijaksanaan yang praktis yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat polis menurut Aristoteles, sehingga PPKn perlu berfungsi sebagai pendorong pemulihan melalui pembentukan karakter yang menyeluruh. Bagi generasi muda, pemahaman ini menjadi seruan untuk mengambil kembali narasi peradaban Indonesia sebagai keselarasan antara aspek material dan spiritual.

1.1.3 Implikasi Pendidikan PPKn

Esensi dari korupsi sebagai masalah moral dan peradaban menekankan pentingnya kurikulum PPKn yang bersifat reflektif, yang menggabungkan filosofi etika untuk melatih pemikiran moral siswa dalam menghadapi dilema modern seperti konflik kepentingan di zaman digital. Metode inovatif, seperti simulasi etika, dapat mengubah mahasiswa menjadi agen perubahan, melahirkan kembali peradaban yang berintegritas melalui praktik deliberatif yang mengaitkan pemikiran Aristoteles dengan konteks Pancasila. Sebagai acuan bagi mahasiswa PPKn, materi ini mendorong perancangan modul pembelajaran yang fokus pada refleksi diri untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran etis.

Implikasi lebih dalam mengharuskan PPKn bertransformasi menjadi laboratorium etika praktis, di mana mahasiswa tidak hanya memahami, tetapi juga menerapkan etika melalui proyek komunitas yang inovatif dalam melawan korupsi. Refleksi akademis ini mengajak perubahan dari pendidikan yang bersifat transaksi menjadi transformatif, sejalan dengan visi Ki Hajar Dewantara: tut wuri handayani, memberi bimbingan dari belakang demi menciptakan generasi yang berintegritas. Pada akhirnya, PPKn menjadi pemimpin dalam perjuangan melawan korupsi moral, mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045 sebagai peradaban yang beretika.

Implikasi strategis ini menggambarkan PPKn sebagai perancang masa depan, di mana pengintegrasian teknologi seperti AI etis dalam simulasi korupsi virtual dapat merevolusi proses belajar, menjamin lulusan siap menghadapi kompleksitas tantangan moral di abad 21. Dengan demikian, pendidikan PPKn bukan hanya sebuah disiplin, melainkan sebuah gerakan filosofis untuk menghidupkan kembali jiwa bangsa.

1.2 Pendidikan sebagai ruang pembentukan etika publik

Pendidikan berfungsi sebagai arena pembentukan etika publik yang sangat penting, di mana nilai-nilai seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas ditanamkan kepada generasi muda Indonesia, terkhusus melalui kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Ruang ini bukan hanya tempat untuk mengalihkan pengetahuan normatif, tetapi juga merupakan ekosistem deliberatif yang membangun kesadaran moral kolektif. Di sini, siswa diajarkan untuk menghadapi dilema etika publik melalui simulasi dan refleksi kritis yang sejalan dengan sila-sila Pancasila.

Bagi mahasiswa, pemahaman ini sangat penting untuk merancang strategi pengajaran yang dapat mengubah sekolah dari sekadar lembaga administratif menjadi laboratorium etika publik yang dinamis, dengan guru sebagai contoh utama yang menerapkan transparansi dalam pengambilan keputusan di kelas. Inovasi dalam pengajaran, seperti pembelajaran berbasis masalah, memungkinkan mahasiswa untuk menginternalisasi etika publik melalui analisis kasus nyata mengenai korupsi. Dengan demikian, transformasi dimulai dari penguatan karakter dosen dan calon pendidik itu sendiri.

1.2.1 Konsep Etika Publik dalam Pendidikan

Etika publik adalah pedoman moral yang mengatur bagaimana individu berperilaku di lingkungan umum, yang mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, keadilan, dan tanggung jawab bersama yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pendidikan, khususnya di bidang PPKn, berperan sebagai sarana diskusi di mana siswa dapat menyerap nilai-nilai tersebut melalui analisis situasi nyata, contohnya konflik kepentingan yang dihadapi oleh pejabat publik, guna membangun kesadaran etis yang relevan. Inovasi dalam dunia akademis terletak pada pendekatan menyeluruh yang mengkombinasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dimana guru berperan sebagai contoh moral dalam proses pembelajaran PPKn.

Dari sudut pandang filosofi, lingkungan pendidikan mencerminkan konsep ruang publik menurut Habermas, di mana diskusi rasional berkontribusi terhadap pembentukan kesadaran etis warga negara yang peka terhadap korupsi struktural, dengan etika publik yang membedakan antara ranah pribadi dan kolektif. Di Indonesia, situasi seperti dampak digital mengharuskan kurikulum PPKn untuk beradaptasi secara kontekstual, menjadikan sekolah sebagai lini pertahanan awal dalam pembentukan etika publik setelah reformasi, melalui penerapan nilai-nilai pemerintahan sipil seperti transparansi dan partisipasi.

Bagi mahasiswa PPKn, konsep ini memerlukan desain pembelajaran yang mencerminkan aspek etika publik—kualitas pelayanan, metode, dan integritas—seperti yang terdapat dalam bahan bacaan Bahasa Indonesia yang menyoroti pentingnya kerja sama antar siswa, dengan guru PPKn berfungsi sebagai fasilitator utama melalui metode pembelajaran interaktif seperti simulasi dan proyek berbasis nilai. Pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformasional, mempersiapkan generasi yang mampu mengimplementasikan etika publik dalam kebijakan pendidikan lokal melalui kolaborasi antara sekolah dan masyarakat serta pemanfaatan media digital yang edukatif.

1.2.2 Peran Strategis Pendidikan PPKn

PPKn memiliki tugas sesuai konstitusi untuk membangun etika publik dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan yang dilakukan di dalam dan luar kelas, dengan guru sebagai agen utama perubahan moral. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran etis siswa, meskipun terdapat hambatan akibat rendahnya keterlibatan orang tua dan dominasi budaya digital yang mempengaruhi perhatian generasi muda. Bagi mahasiswa PPKn, hal ini memerlukan desain inovatif seperti simulasi kebijakan publik untuk melatih pengambilan keputusan etis, di mana siswa menghadapi dilema moral yang nyata, misalnya terkait pengelolaan anggaran sekolah.

Pendidikan nonformal seperti PKBM juga berfungsi sebagai ruang yang fleksibel untuk membentuk etika sosial, di mana interaksi yang setara dapat mendorong perubahan sikap melalui teladan dan dialog kontekstual yang mencakup kelompok-kelompok marginal. Penggabungan ini memperkaya pendidikan PPKn formal, menciptakan ekosistem pendidikan yang komprehensif untuk generasi yang berintegritas, dengan kolaborasi antara berbagai lembaga yang memperkuat internalisasi nilai-nilai kebangsaan.

Secara strategis, peran PPKn juga meliputi pengembangan etika kewarganegaraan digital, di mana nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai filter moral terhadap berita palsu dan perpecahan di media sosial, memastikan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam ruang publik virtual. Mahasiswa PPKn didorong untuk mengembangkan modul hybrid yang menggabungkan pembelajaran secara langsung dengan platform digital, sehingga perubahan etika publik dapat berlanjut di tengah kemajuan teknologi.

1.2.3 Tantangan dan Inovasi Kontemporer

Salah satu tantangan utama adalah krisis moral di kalangan generasi muda akibat dampak globalisasi, serta lingkungan pendidikan yang masih belum memadai sebagai ruang untuk membangun karakter, di mana penurunan etika terlihat dari banyaknya plagiarisme, penyebaran hoaks digital, dan pandangan nilai yang relatif di antara siswa. Situasi ini semakin rumit dengan kurangnya keseimbangan dalam anggaran pendidikan dan minimnya pelatihan bagi guru untuk menghadapi perubahan teknologi, sehingga

Pancasila sebagai panduan moral seringkali diabaikan oleh budaya yang mengedepankan instan.

Inovasi diperlukan melalui pendekatan yang menggabungkan aspek intelektual, emosional, dan spiritual, serta didukung oleh kebijakan pelatihan guru dan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat. Contohnya adalah pembentukan Mahkamah Etika di lingkungan sekolah dan program literasi digital yang berlandaskan pada nilai-nilai nasional. Mahasiswa PPKn diharapkan dapat mempertimbangkan peran Pancasila sebagai landasan etika publik dalam dunia digital, serta menjamin bahwa pendidikan tetap relevan dengan perkembangan di abad 21 melalui modul kewarganegaraan digital yang menyeluruh dan mengintegrasikan etika dalam penggunaan media sosial.

Tantangan masa kini membutuhkan perubahan struktural, seperti penerapan Kode Etik Guru Indonesia 2025 yang menekankan pada nilai integritas, kerja sama, dan peningkatan profesionalisme, serta pengawasan yang transparan terhadap pelanggaran akademik melalui Dewan Kehormatan Guru. Generasi Z yang berfungsi sebagai agen perubahan dapat berkontribusi aktif dalam upaya memulihkan moral bangsa dengan memanfaatkan inovasi dari Kurikulum Merdeka yang menggabungkan narasi anti-korupsi dan etika digital, menjadikan PPKn sebagai garda terdepan dalam menangani krisis etika publik.

1.3 Pedagogi moral dalam pendidikan

Pengajaran moral dalam konteks pemikiran pendidikan merujuk pada proses yang dengan sengaja membentuk kemampuan berpikir etis dan karakter moral peserta didik melalui pendekatan filosofis. Hal ini sangat penting bagi mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ketika merancang kurikulum yang berfokus pada pencegahan korupsi. Metode ini menggabungkan teori-teori filosofis, seperti tahapan yang dikemukakan oleh Kohlberg, dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, kelas menjadi tempat untuk merenungkan isu-isu moral guna menghadapi masalah etika modern di Indonesia, di mana siswa dilatih untuk menganalisis dilema etis seperti konflik kepentingan publik melalui diskusi kritis yang meningkatkan kesadaran mandiri.

Pada dasarnya, pedagogi moral lebih dari sekadar menyampaikan norma, tetapi juga merupakan perubahan mendasar yang meningkatkan kemampuan siswa untuk mencapai tingkat moral post-konvensional menurut Kohlberg. Di tahap ini, keputusan etis didasarkan pada prinsip-prinsip universal keadilan yang sejalan dengan sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi mahasiswa PPKn, pemahaman ini sangat penting untuk menciptakan inovasi dalam kurikulum, seperti penerapan pembelajaran yang didasarkan pada filsafat praktis (*phronesis* Aristoteles), yang mengubah ruang belajar menjadi laboratorium etika kehidupan. Dengan cara ini, pembentukan karakter anti-korupsi dapat dimulai dari refleksi pribadi dosen serta calon pendidik.

1.3.1 Landasan Filosofi Pendidikan Moral

Filosofi pendidikan moral menekankan pentingnya filosofi sebagai pedoman dalam pembentukan karakter, di mana pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai pengalihan pengetahuan, tetapi juga sebagai perubahan moral melalui dialog dan contoh, sebagaimana dijelaskan oleh Kohlberg dalam peralihan dari moral konvensional menuju post-konvensional. Dalam konteks PPKn, pedagogi ini bersifat holistik, dengan menggabungkan aspek kognitif (penalaran etis melalui analisis konflik moral), afektif (kepedulian terhadap mereka yang mengalami ketidakadilan), serta konatif (tindakan moral seperti advokasi untuk melawan korupsi), serta mengaitkannya dengan filsafat Aristoteles mengenai kebajikan sebagai keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok.

Secara ontologis, pedagogi moral mencerminkan hakikat manusia sebagai makhluk yang beretika (*zoon etikón*), di mana pendidikan menciptakan iklim moral bersama melalui praktik diskusi yang mengembangkan *phronesis*—kebijaksanaan praktis—dalam menghadapi kerumitan etika publik. Bagi mahasiswa PPKn, hal ini berarti merancang pembelajaran yang mengaitkan nilai-nilai Pancasila sebagai etika nasional, contohnya menghubungkan sila ke-4 dengan tahap moral konvensional menurut Kohlberg untuk membangun kepatuhan sosial yang matang.

Dasar ini mengimplementasikan prinsip-prinsip progresivisme Dewey, di mana pengalaman nyata menjadi sarana untuk membentuk moral, sehingga pelajaran PPKn bertransformasi menjadi komunitas diskusi etis yang mencerminkan kenyataan korupsi struktural di Indonesia. Pendekatan ini menekankan peran guru sebagai contoh moral, di mana teladan mereka berfungsi sebagai penggerak perubahan dari moral yang ditentukan oleh pihak luar menjadi moral yang berdiri sendiri, sesuai dengan imperatif kategoris Kant.

Dalam pandangan filosofi Timur seperti Konfusius, pedagogi moral PPKn dapat dipadukan dengan *ren* (kemanusiaan) untuk memperkaya sisi afektif Pancasila, sehingga terbentuk kurikulum yang inklusif bagi masyarakat yang beragam. Mahasiswa PPKn didorong untuk menerapkan hal ini melalui modul reflektif, memastikan bahwa pedagogi moral bersifat konkret dan aplikatif untuk regenerasi karakter yang berintegritas.

1.3.2 Teori Utama dalam Perspektif Filsafat

Teori Kohlberg mendominasi pendidikan moral dengan enam tahap perkembangan, mulai dari pre-konvensional (fokus pada hukuman dan kepatuhan) hingga universal etis (kontrak sosial dan prinsip-prinsip universal). Teori ini diintegrasikan dalam PPKn melalui diskusi tentang dilema moral, seperti korupsi struktural, yang mendorong siswa untuk berkembang dari sikap egois menuju pemikiran yang lebih prinsipil. Progresivisme yang diusung oleh Dewey menambahkan elemen pengalaman praktis, sehingga siswa mempelajari etika melalui proyek komunitas yang melawan korupsi, menjadikan pengalaman sebagai medium bagi pertumbuhan moral yang berkelanjutan.

Filsafat Timur, seperti Konfusianisme, memberikan penekanan pada pentingnya harmoni sosial melalui pendidikan karakter (*ren* dan *li*). Pendekatan ini bisa dimasukkan ke

dalam PPKn untuk memperluas makna kolektif dari Pancasila, di mana guru memfasilitasi li (etiket) dengan menggunakan simulasi interaksi sosial yang mengedepankan harmoni etis. Perspektif ini melengkapi pemikiran Kohlberg dengan penekanan pada aspek afektif, memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami etika secara intelektual, tetapi juga merasakan tanggung jawab moral mereka terhadap masyarakat.

Pandangan Locke menyoroti pentingnya pendidikan moral sejak usia dini untuk membangun masyarakat yang modern. Dalam konteks ini, guru berfungsi sebagai teladan integritas, menyisipkan norma Pancasila ke dalam kegiatan kelas melalui pembiasaan kebajikan, sehingga siswa tidak terpengaruh negatif oleh budaya korup. Inovasi dalam PPKn terletak pada penggabungan ini: Kohlberg berkolaborasi dengan sila ke-2 Pancasila untuk mendidik kemanusiaan yang adil, di mana tahap post-konvensional diwakili oleh empati universal kepada korban ketidakadilan sosial.

Penggabungan berbagai teori ini menghasilkan sebuah pedagogi moral yang menyeluruh untuk PPKn, di mana siswa merancang modul yang memadukan diskusi tentang Kohlberg, proyek Dewey, dan contoh dari Konfusius, sehingga memastikan filosofi pendidikan tetap relevan dalam menghadapi krisis moral yang ada di Indonesia saat ini. Pendekatan tersebut bersifat transformatif, mengubah siswa dari sekadar penerima norma menjadi agen etika publik yang mandiri.

1.4 Urgensi pendidikan anti korupsi bagi masa depan bangsa

Urgensi pendidikan anti-korupsi untuk masa depan suatu bangsa terletak pada fungsinya sebagai investasi strategis yang mencegah dan membentuk generasi dengan integritas tinggi, serta menghindari penurunan moral struktural yang telah menjadikan Indonesia berada pada posisi rendah di Indeks Persepsi Korupsi dunia. Upaya KPK yang berkolaborasi dengan enam kementerian guna menggabungkan sembilan nilai inti anti-korupsi jujur, mandiri, bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras ke dalam kurikulum nasional menekankan bahwa pendekatan menyeluruh ini menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter yang baru.

Bagi para mahasiswa di program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pemahaman ini sangat penting dalam mengembangkan kurikulum nasional yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif, dengan PPKn sebagai garda terdepan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK yang menunjukkan bahwa 43% siswa terlibat dalam kecurangan dan 43% mahasiswa melakukan plagiarisme sebagai tanda adanya krisis etika akademik. Pendidikan anti-korupsi yang dimulai dari PAUD hingga tingkat perguruan tinggi menjadi kewajiban dalam revisi Perpres No. 87/2017, yang menysar lima pilar dalam masyarakat keluarga, sekolah, masyarakat, tempat ibadah, dan digital dalam rangka menciptakan ekosistem integritas yang berkelanjutan.

1.4.1 Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Sejak Dini

Pendidikan yang mengajarkan anti-korupsi dari usia anak-anak hingga tingkat universitas sangat penting untuk menciptakan budaya integritas. Hal ini diperlukan untuk mengatasi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2024 yang menunjukkan indeks integritas nasional sebesar 71,53, tergolong dalam kategori rentan, serta adanya isu gratifikasi dan penyalahgunaan dalam pengadaan barang dan jasa yang terjadi di 90% kementerian dan lembaga. Kasus penyontekan di kalangan siswa dan plagiasi di kalangan mahasiswa menggambarkan lemahnya etika dalam dunia akademis, sehingga pendidikan anti-korupsi yang diajarkan sejak dini melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat penting untuk membiasakan sembilan nilai dasar anti-korupsi tersebut mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD).

Kerjasama KPK dengan enam kementerian menunjukkan pentingnya integrasi pendidikan anti-korupsi ke dalam kurikulum nasional. Revisi Peraturan Presiden No. 87/2017 bertujuan untuk membangun lingkungan pendidikan yang terbebas dari praktik korupsi, dengan fokus pada lima pilar masyarakat sebagai pendekatan menyeluruh yang melibatkan 843.017 responden dalam SPI nasional. Di sektor pendidikan, SPI mencatat skor karakter sebesar 78,01, namun untuk aspek tata kelola hanya mencapai 58,68, sehingga diperlukan intervensi dalam PPKn melalui simulasi gratifikasi untuk perubahan perilaku.

Pelaksanaan ini ditujukan kepada lima pilar masyarakat—keluarga (peran orang tua), sekolah (kurikulum PPKn), masyarakat (pembinaan), tempat ibadah (nilai-nilai mulia), dan dunia digital (literasi etika di dunia maya)—untuk mendapatkan hasil yang sinergis. Dalam hal ini, PPKn berfungsi sebagai pusat dengan memanfaatkan data dari SPI untuk mengubah sikap siswa dari yang oportunistik menjadi yang berprinsip. Mahasiswa dalam program PPKn dapat menciptakan modul yang melibatkan berbagai pilar ini, dengan tujuan untuk mencegah korupsi di berbagai tingkatan, dari yang mikro hingga makro.

Strategi yang efektif meliputi pelatihan guru supaya menjadi contoh integritas, pengembangan modul pendidikan anti-korupsi yang berfokus pada kecerdasan emosi, dan evaluasi berkelanjutan terhadap perilaku siswa. Semua ini selaras dengan Komitmen Bersama untuk Menerapkan Pendidikan Anti-Korupsi Nasional 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan skor SPI di sektor pendidikan menjadi 80 ke atas. Pendekatan ini diharapkan mampu mentransformasi pendidikan dari yang bersifat reaktif menjadi yang proaktif untuk menciptakan bangsa yang bebas dari korupsi.

1.4.2 Kontribusi terhadap Pembangunan Nasional

Pendidikan anti-korupsi berperan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan memperbaiki kinerja birokrasi, membangun kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan daya saing global. Hal ini dicapai melalui generasi yang bisa memahami dampak negatif dari korupsi terhadap kemajuan bangsa, di mana kerugian negara yang diperkirakan sebesar Rp50,3 triliun pada tahun 2024 dapat dialokasikan untuk pengembangan

infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Generasi yang mulai mendapatkan pendidikan anti-korupsi sejak awal ini akan menjadi pemimpin yang produktif di usia 20 hingga 40 tahun pada tahun 2045, menjadikan zero corruption sebagai syarat bagi negara maju dengan PDB per kapita sebesar US\$23. 000.

Komitmen Bersama untuk Pelaksanaan PAK Nasional 2025 menjadi simbol kerjasama semua pemangku kepentingan—KPK, Kemendikbud, Kemenag, hingga Bappenas—dalam mengupayakan tata kelola yang bersih. Targetnya adalah meningkatkan skor SPI Pendidikan dari 65,44 (2024) menjadi di atas 80 melalui integrasi 9 nilai inti ke dalam Kurikulum Merdeka. Inisiatif ini sejalan dengan RPJMN 2025-2029 yang menempatkan pendidikan karakter sebagai salah satu pilar ketahanan nasional.

Di tingkat perguruan tinggi, PAK mempromosikan budaya integritas melalui literasi gratifikasi dan etika digital, untuk menyiapkan pemimpin masa depan yang mampu melakukan reformasi birokrasi secara signifikan. Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan melalui OSN PAK dan proyek pengawasan anggaran di kampus. Program seperti Satgas PAK Mahasiswa KPK telah melibatkan 1. 200 kampus dan berhasil mengurangi plagiarisme hingga 43%, menjadi salah satu indikator keberhasilan.

Dari segi makro, kontribusi terletak pada efek pengganda: setiap peningkatan 1% dalam integritas pendidikan dapat menambah FDI sebesar 0,5% dan meningkatkan efisiensi APBN antara 2 hingga 3%, menciptakan siklus pembangunan berkelanjutan yang membawa Indonesia ke dalam jajaran 5 besar ekonomi global pada tahun 2045. Bagi mahasiswa PPKn, pemahaman ini mendorong pengembangan kebijakan pendidikan strategis untuk menghadapi transisi demografi emas.

Bab 2 Korupsi dalam Perspektif Sosial, Budaya, dan Psikologi

2.1 Pengertian Korupsi Dalam Perspektif Struktural Dan Kultural

2.1.1 Korupsi sebagai Fenomena Struktural dan Kultural

Korupsi seharusnya tidak dipahami hanya sebagai penyimpangan perilaku individu, tetapi lebih sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan kekuasaan dan budaya di masyarakat. Dari sudut pandang struktural, korupsi muncul akibat lemahnya sistem lembaga, distribusi kekuasaan yang tidak adil, serta mekanisme pengawasan yang kurang efektif. Ketika aturan, sumber daya, dan hubungan kekuasaan dalam suatu organisasi menciptakan kesempatan untuk praktik yang resmi, maka korupsi bisa berkembang menjadi sebuah praktik sistematis. Dalam konteks ini, tindakan korupsi tidak hanya disebabkan oleh keinginan pribadi seperti keserakahan, tetapi juga oleh tekanan struktural yang memaksa individu mencari cara lain untuk mencapai tujuan di dalam sistem yang tidak adil atau transparan (Radja, 2024; Hidayat, 2024). Akibatnya, korupsi sering menjadi bagian dari pola hubungan kekuasaan yang terbentuk dalam birokrasi, politik, dan sektor ekonomi.

Di samping faktor struktural, korupsi juga memiliki aspek kultural yang berkaitan dengan nilai, norma, dan praktik sosial yang ada di masyarakat. Dalam banyak situasi, praktik seperti patronase, nepotisme, atau pemberian "uang terima kasih" sering dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan sebagai bagian dari interaksi sosial. Ketika budaya toleransi terhadap kekuasaan berkembang dan dipertahankan dalam kehidupan sosial, maka tindak korupsi semakin sulit untuk dihilangkan karena telah mendarah daging dalam pola pikir dan perilaku kolektif masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa jaringan patronase, budaya kebal hukum, serta rendahnya rasa malu terhadap pelanggaran etika publik dapat menciptakan kondisi sosial yang menganggap praktik korup sebagai hal yang normal di berbagai lembaga (Alvirra, R., & Afrijal, 2025). Situasi ini membuat korupsi tidak lagi dilihat sebagai penyimpangan serius, melainkan sebagai mekanisme yang dianggap "biasa" dalam menjalankan birokrasi dan hubungan kekuasaan.

Dengan cara ini, memahami korupsi sebagai fenomena yang melibatkan pendekatan struktural dan tuntutan kultural yang lebih holistik sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Reformasi hukum dan penguatan lembaga memang krusial untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi struktural, namun langkah-langkah tersebut perlu diimbangi dengan transformasi nilai dan budaya di masyarakat. Perubahan budaya tentang integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial sangat diperlukan untuk memutus siklus praktik koruptif yang sudah menempel dalam sistem sosial. Tanpa adanya perubahan pada dua aspek tersebut, upaya pemberantasan korupsi berisiko hanya menyentuh permukaan

masalah tanpa menyelesaikan akar penyebab yang lebih mendalam dalam kehidupan sosial dan politik.

Korupsi biasanya diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan manfaat bagi diri sendiri atau kelompok tertentu. Dalam kajian sosial, korupsi tidak hanya dilihat sebagai kesalahan dari individu saja, tetapi juga sebagai fenomena yang berhubungan dengan keadaan sistem dan lingkungan sosial di mana seseorang berada. Dari sudut pandang struktural, korupsi dipahami sebagai hasil dari kelemahan dalam sistem institusi, seperti kurangnya transparansi, pengawasan yang lemah, dan regulasi yang menciptakan kesempatan untuk penyalahgunaan kekuasaan. Keadaan seperti ini memberi individu lebih banyak peluang untuk terlibat dalam tindakan korup.

Selain aspek sistem, perspektif budaya juga menekankan pentingnya nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam suatu masyarakat. Budaya tertentu dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kekuasaan, jabatan, dan hubungan sosial. Dalam beberapa situasi, kebiasaan memberikan hadiah atau penghargaan kepada pejabat dianggap sebagai hal yang biasa dalam interaksi sosial. Apabila praktik tersebut tidak dilandasi oleh kesadaran etika yang kuat, maka tindakan tersebut bisa berkembang menjadi bentuk korupsi yang sulit dibedakan dari kebiasaan sosial.

1. Pengaruh nilai sosial di masyarakat

Pengaruh nilai sosial di masyarakat sangat signifikan dalam memengaruhi pandangan individu terhadap kekuasaan, posisi, dan interaksi sosial. Nilai-nilai yang ada di masyarakat membentuk cara berpikir tentang hal-hal yang dianggap benar, layak, atau bisa diterima dalam kehidupan bersama. Jika masyarakat menganggap kekuasaan sebagai simbol status dan harga diri yang tinggi, maka akan ada kecenderungan untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka yang memegang jabatan.

2. Tradisi setempat atau praktik sosial

Biasanya membentuk cara interaksi antara warga dan penguasa atau individu yang berkuasa. Di beberapa kelompok, interaksi sosial tidak hanya ditentukan oleh aturan resmi, tetapi juga oleh kedekatan pribadi, hubungan keluarga, atau rasa saling menghargai. Pola interaksi seperti ini dapat memperkuat persatuan sosial, tetapi dalam konteks pemerintahan kadang-kadang dapat menyebabkan bentrokan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

3. Penyerahan hadiah atau bentuk penghargaan

Di sejumlah budaya, hal ini dianggap sebagai metode untuk memperlihatkan rasa syukur atau penghormatan kepada individu yang telah memberikan bantuan atau layanan. Kebiasaan ini umumnya dilihat sebagai elemen dari etika sosial yang mencerminkan sikap baik. Dalam kehidupan sehari-hari, pemberian hadiah biasa terjadi dalam berbagai momen seperti upacara tradisional, pertemuan sosial, atau sebagai bentuk pengakuan atas dukungan yang telah diberikan.

4. Kebiasaan yang sering dianggap biasa
Karena telah menjadi elemen dari budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Komunitas seringkali tidak menganggap praktik tersebut sebagai suatu masalah karena dilakukan dalam konteks interaksi sosial yang telah ada sejak lama. Prinsip-prinsip seperti ungkapan terima kasih, menghormati orang yang lebih tua, atau memelihara hubungan baik sering kali menjadi alasan utama mengapa kebiasaan tersebut tetap dipertahankan.
5. Minimnya pemahaman mengenai etika dan integritas
Mengaburkan garis pemisah antara penghargaan dalam masyarakat dan tindakan korup. Banyak individu tidak menyadari bahwa tindakan yang dianggap sebagai bentuk penghormatan sesungguhnya dapat berujung pada praktik gratifikasi atau suap apabila terjadi dalam konteks yang melibatkan kekuasaan dan posisi publik

2.1.2 faktor struktural penyebab terjadinya korupsi

Faktor struktural merupakan salah satu alasan utama munculnya korupsi dalam pemerintahan dan organisasi. Kelemahan dalam sistem pengawasan sering kali memberikan ruang bagi orang atau kelompok tertentu untuk menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki. Ketika mekanisme pengendalian tidak berfungsi dengan baik, penyimpangan dapat terjadi tanpa adanya sanksi yang jelas. Keadaan ini semakin berbahaya jika kekuasaan terpusat pada satu pihak tanpa adanya sistem pengawasan yang jelas dan bertanggung jawab.

1. Kelemahan dalam sistem pengawasan
Pengawasan yang kurang efisien sering kali menjadi salah satu faktor utama tumbuhnya praktik korupsi. Saat lembaga pengawas tidak berfungsi dengan baik atau tidak memiliki otoritas yang kuat, orang-orang yang memegang jabatan dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Minimnya transparansi dalam proses pengawasan juga membuat tindakan pelanggaran sulit diidentifikasi, sehingga praktik korupsi dapat terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama.
2. Pengumpulan kekuasaan pada kelompok tertentu
Kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang atau sekelompok orang dapat memicu potensi penyalahgunaan wewenang. Jika tidak ada cara untuk membatasi kekuasaan dan sistem pengawasan yang jelas, orang yang memiliki kekuasaan besar bisa mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok tertentu. Keadaan seperti ini seringkali muncul dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang tidak menerapkan prinsip transparansi dengan tegas.
3. Sistem administrasi yang kompleks dan berbelit
Proses administrasi yang rumit sering kali membuka peluang bagi munculnya korupsi. Prosedur yang lambat dan tidak efisien dapat membuat masyarakat merasa kesulitan dalam mendapatkan layanan publik. Dalam keadaan seperti ini, beberapa individu mungkin berusaha mencari cara cepat dengan memberikan uang atau imbalan lainnya agar urusan administrasi dapat dipercepat.

4. Kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan
Pengelolaan anggaran yang tidak transparan merupakan salah satu penyebab struktural yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang jelas terhadap informasi penggunaan anggaran, risiko manipulasi dana atau penyalahgunaan menjadi lebih tinggi. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sangat krusial untuk menghindari praktik korupsi di dalam lembaga pemerintahan.
5. Lemahnya sistem tanggung jawab lembaga
Tanggung jawab adalah suatu prinsip yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif. Apabila sebuah lembaga tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, tindakan penyimpangan sering kali tidak dihukum dengan berat. Situasi ini dapat menciptakan suasana organisasi yang mendukung praktik korupsi.
6. Kurangnya perubahan dalam birokrasi dan manajemen
Keterlambatan dalam melakukan perubahan pada birokrasi dapat memperkuat sistem yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi. Struktur yang tidak diperbarui sering kali tidak mampu beradaptasi dengan kebutuhan transparansi dan akuntabilitas dalam era pemerintahan saat ini. Dengan demikian, inovasi seperti digitalisasi layanan publik dan sistem administrasi yang berbasis teknologi dapat berkontribusi pada pengurangan peluang untuk praktik korupsi.

2.1.3 Faktor budaya dalam praktik korupsi

Tindakan menyelewengkan dana publik bukan sekadar akibat rapuhnya tata kelola negara, melainkan bersinggungan erat dengan norma - norma budaya yang mengakar dalam komunitas. Kultur masyarakat menentukan bagaimana individu mengartikan interaksi antarmanusia, otoritas, serta tanggung jawab etis terhadap sesamanya. Di berbagai lingkungan sosial, menjaga keselarasan hubungan seringkali diwujudkan melalui pemberian cenderamata, saling membantu, atau bentuk penghormatan kepada figur yang memiliki posisi penting. Sebenarnya, niat awal dari kebiasaan ini adalah positif, yaitu memperkuat ikatan komunal dan menunjukkan respek.

Permasalahan timbul saat kebiasaan semacam ini merambah ranah tugas kedinasan. Aksi memberikan bingkisan kepada aparaturnya atau pemegang kekuasaan dapat mewajibkan kejernihan dalam proses penentuan kebijakan. Garis pemisah antara wujud penghargaan sosial dan perbuatan curang menjadi kabur karena hal tersebut sering dianggap sebagai adat istiadat yang lumrah. Apabila komunitas tidak secara tegas menentang perilaku tersebut, praktik KKN dapat membayangkan tumbuh menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari tatanan interaksi sosial dalam kehidupan bernegara.

Bentuk atau Aspek Budaya yang Dapat Mendorong Korupsi

1. Tradisi Berbagi Bingkisan (Kultur Hadiah)
Di berbagai kalangan masyarakat, memberikan buah tangan menjadi cara menunjukkan penghargaan atau rasa syukur. Kebiasaan ini sering terlihat pada

acara-acara komunal seperti upacara adat, hukuman , atau interaksi profesional Namun,di ranah administrasi negara, mentraktir aparaturnegara dengan bingkisan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, mengingat kemungkinan mempengaruhi vonis yang diputuskan oleh pejabat terkait.

2. Kebiasaan Saling Memberi Balasan

Di sejumlah komunitas, terdapat pandangan tegas tentang keharusan untuk membalas pertolongan yang sudah didapat . Prinsip ini sebenarnya mengokohkan ikatan kebersamaan dalam masyarakat.Akan tetapi, ketika diterapkan dalam cakupan kedudukan pemerintah , tuntutan untuk membalas budi ini bisa mengarah pada pemberian keistimewaan spesifik bagi pihak yang pernah membantu,meskipun perilaku tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.

3. Sistem kepegayoman

Ikatan timbal balik antara seseorang yang berkuasa (si pelindung) dan orang-orang yang bergantung pada otoritas tersebut (si penerima). Relasi semacam ini lazimnya meliputi pemberian dukungan atau pembelaan oleh pelindung kepada penerima, dengan ketidakseimbangan kesetiaan atau bantuan balik dari penerima . Di lapangan , interaksi semacam ini berpotensi memicu praktik mengutamakan kerabat , persekongkolan, dan penyelewengan dana.

4. Toleransi terhadap Pelanggaran

Cara memandang warga terhadap tindakan korupsi juga dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang berlaku Jika masyarakat menganggap korupsi sebagai hal lumrah atau sukar dielakkan , maka sanksi sosial terhadap pelakunya akan menurun drastis. Keadaan semacam ini membuka peluang terjadinya korupsi terus menerus tanpa mendapat perlawanan berarti dari lingkungannya.

5. Sikap masyarakat terhadap perilaku korupsi

Tindakan menyelewengkan biasanya juga dibentuk oleh kaidah sosial yang tumbuh. Ketika masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah atau tak terhindarkan , maka dorongan dari lingkungannya terhadap pelakunya melemah drastis . Hal serupa membuka peluang praktik korupsi terus berjalan tanpa adanya penolakan yang tegas dari pergaulan mereka.

6. Kesetiaan budaya dalam kelompok

Di sejumlah masyarakat, kesetiaan kepada keluarga, kelompok, atau komunitas sosial dipandang sangat berharga. Prinsip ini mampu memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan. Namun, dalam konteks pemerintahan, kesetiaan terhadap kelompok dapat mendorong individu untuk memberikan keuntungan kepada orang yang memiliki kedekatan, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme.

2.2 Mentalitas Permisif dan Budaya Patronase

Mentalitas yang permisif merupakan salah satu elemen sosial yang turut mendukung keberlangsungan praktik korupsi dalam masyarakat. Sikap ini mengacu kepada toleransi

atau pembiaran terhadap tindakan yang sebenarnya melanggar norma hukum dan moral, namun dianggap wajar dalam interaksi sosial sehari-hari. Dalam hal korupsi, mentalitas permisif terlihat pada sikap masyarakat yang cenderung memaafkan praktik suap, gratifikasi, atau penurunan jabatan dengan dalih “sudah menjadi kebiasaan”. Ketika pelanggaran dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak menimbulkan rasa bersalah secara moral, maka korupsi secara perlahan bertransisi dari tindakan individu menjadi pola perilaku sosial yang diterima tanpa debat di lingkungan tertentu. Hal ini menggambarkan bahwa masalah korupsi tidak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga dengan sikap mental dan kesadaran etika dalam masyarakat.

Di sisi lain, praktik patronase juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan praktik korupsi dalam sistem sosial dan politik. Patronase diartikan sebagai hubungan saling menguntungkan antara mereka yang memiliki kekuasaan atau sumber daya (patron) dengan mereka yang menggantungkan diri pada perlindungan atau dukungan tersebut (klien). Dalam hubungan ini, loyalitas dan dukungan sering kali ditukar dengan berbagai keuntungan, seperti akses ke posisi, proyek, atau sumber daya ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa relasi patron-klien sering menjadi cara bagi terjadinya korupsi dalam kebijakan publik dan birokrasi, karena kekuasaan digunakan untuk memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu. Hubungan seperti itu tidak hanya memperkuat praktik nepotisme, tetapi juga membentuk sistem kekuasaan yang tertutup dan sulit untuk diawasi dengan transparan.

Budaya patronase juga membawa dampak pada lemahnya sistem meritokrasi dalam lembaga publik. Penunjukan seseorang pada suatu jabatan tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keahlian atau integritas, melainkan lebih kepada kedekatan pribadi, hubungan politis, atau jaringan kekuasaan. Dalam kondisi ini, lembaga publik dapat kehilangan fokus terhadap kepentingan umum dan lebih cenderung melayani agenda kelompok tertentu. Penelitian dalam sudut pandang sosiologi hukum menunjukkan bahwa hubungan patronase yang kuat dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum dan kebijakan publik, sehingga keputusan yang diambil sering kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan elit dibandingkan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Akibatnya, praktik korupsi terjadi tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga terjalin dalam jaringan kekuasaan yang lebih luas.

Dengan demikian, mentalitas permisif dan budaya patronase adalah dua elemen sosial yang saling terkait dalam mempertahankan praktik korupsi. Mentalitas permisif menciptakan ruang bagi toleransi sosial terhadap pelanggaran, sementara patronase menyediakan struktur hubungan kekuasaan yang memungkinkan praktik tersebut bertahan. Jadi, upaya untuk memberantas korupsi tidak cukup hanya bergantung pada pendekatan hukum dan kelembagaan, tetapi juga memerlukan perubahan dalam kesadaran etis serta transformasi budaya sosial yang menanamkan nilai-nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab publik. Perubahan ini memerlukan proses yang panjang melalui pendidikan, teladan

kepemimpinan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun budaya melawan korupsi yang lebih kuat.

2.2.1 Hubungan Mentalitas Permisif dengan Praktik Korupsi

Mentalitas permisif memiliki hubungan yang erat dengan berkembangnya praktik korupsi dalam kehidupan sosial. Sikap permisif tercermin dari kecenderungan masyarakat untuk memakslumi, membiarkan, atau tidak memberikan reaksi tegas terhadap perilaku yang sebenarnya melanggar norma hukum maupun etika publik. Ketika perilaku yang tidak jujur atau diotorisasi tidak mendapatkan kritik sosial yang kuat, ruang bagi praktik korupsi menjadi semakin terbuka. Dalam situasi seperti ini, korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindakan yang sepenuhnya tercela, tetapi sering dianggap sebagai bagian dari realitas sosial yang sulit dihindari. Penelitian menunjukkan bahwa toleransi sosial terhadap pelanggaran etika dapat memperlemah upaya pencegahan korupsi karena masyarakat menjadi kurang sensitif terhadap tindakan yang merugikan kepentingan publik (Prabowo, HY, & Cooper, K., 2021) Hubungan antara mentalitas permisif dan korupsi juga dapat dipahami melalui cara masyarakat memandang praktik-praktik kecil yang menyimpang dari aturan. Kebiasaan memberikan ketidakseimbangan untuk memperoleh pelayanan yang lebih cepat, penggunaan hubungan pribadi untuk mendapatkan keuntungan tertentu, atau sikap diam terhadap jabatan sering dianggap sebagai hal yang lumrah. Praktik-praktik tersebut terlihat sederhana, namun dalam jangka panjang dapat membentuk budaya sosial yang menoleransi penyimpangan. Ketika masyarakat terbiasa menerima praktik semacam itu, batas antara tindakan yang etis dan tidak etis menjadi semakin kabur. Situasi ini memperkuat kondisi yang memungkinkan korupsi berkembang secara perlahan dalam berbagai bidang kehidupan (Alvirra, R., & Afrijal, 2025) Mentalitas permisif juga dapat meningkatkan peran masyarakat sebagai kekuatan moral dalam mengawasi kekuasaan. Dalam sistem sosial yang sehat, masyarakat mempunyai peran penting untuk memberikan kritik, pengawasan, dan penilaian moral terhadap tindakan para pemegang kekuasaan. Sikap permisif dapat membuat masyarakat enggan untuk menyuarakan pendapatnya terhadap tindakan yang merugikan kepentingan publik. Ketika kontrol sosial melemah, praktik korupsi dapat berlangsung lebih lama karena tidak menghadapi tekanan moral dari lingkungan sosial. Studi mengenai budaya antikorupsi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan keberanian moral untuk menolak penyimpangan memiliki peran penting dalam membangun sistem sosial yang lebih bersih dan transparan (Transparency International., 2023)

Refleksi terhadap hubungan antara mentalitas permisif dan korupsi menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada sistem hukum dan kebijakan formal. Perubahan juga perlu tumbuh dari kesadaran sosial yang menghargai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Ketika masyarakat memiliki kepekaan moral yang kuat terhadap penyimpangan, praktik korupsi akan lebih sulit berkembang karena adanya penolakan sosial yang jelas. Upaya membangun budaya

antikorupsi memerlukan proses pendidikan nilai, keteladanan pemimpin, serta keterlibatan dalam menjaga kehidupan masyarakat yang lebih adil dan produktif.

2.2.2 Pengaruh Budaya Patronase dalam Birokrasi dan Politik

Budaya patronase merupakan pola hubungan sosial yang terbentuk antara pihak yang memiliki kekuasaan atau sumber daya dengan pihak yang bergantung pada dukungan tersebut. Dalam konteks birokrasi dan politik, hubungan ini sering dikenal sebagai hubungan patron-klien, yaitu hubungan timbal balik yang didasarkan pada loyalitas, perlindungan, dan pemberian keuntungan tertentu. Patron biasanya memiliki posisi kekuasaan yang memungkinkan mereka memberikan akses terhadap jabatan, sumber daya, atau peluang ekonomi, sementara pihak klien memberikan dukungan politik atau kesetiaan pribadi. Pola hubungan seperti ini dapat mempengaruhi cara kerja institusi publik karena keputusan sering kali tidak sepenuhnya didasarkan pada kepentingan publik, melainkan pada hubungan kedekatan dan jaringan kekuasaan yang terbentuk di dalamnya (Hicken, A., 2021). Dalam praktik birokrasi, budaya patronase dapat mempengaruhi proses rekrutmen, promosi jabatan, maupun distribusi sumber daya dalam institusi pemerintahan. Penempatan seseorang dalam jabatan tertentu tidak selalu didasarkan pada kompetensi atau kapasitas profesional, tetapi sering kali dipengaruhi oleh kedekatan dengan tokoh yang memiliki kekuasaan. Kondisi ini dapat mencakup prinsip meritokrasi dalam birokrasi dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Penelitian menunjukkan bahwa sistem patronase dapat menciptakan birokrasi yang kurang profesional karena keputusan administratif lebih dipengaruhi oleh kepentingan jaringan kekuasaan daripada prinsip efektivitas dan akuntabilitas (Pepinsky, TB, Pierskalla, JH, & Sacks, A., (2020). Pengaruh budaya patronase juga terlihat dalam dinamika politik, terutama dalam proses mobilisasi dukungan dan distribusi kekuasaan. Dalam banyak kasus, dukungan politik tidak hanya dibangun melalui gagasan atau kebijakan program, tetapi juga melalui pemberian manfaat tertentu kepada kelompok atau individu yang dianggap loyal. Praktik semacam ini dapat memperkuat transaksional politik, di mana hubungan politik didasarkan pada pertukaran kepentingan jangka pendek. Penelitian mengenai politik patronase menunjukkan bahwa pola hubungan seperti ini dapat mempengaruhi kualitas demokrasi karena keputusan politik lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu daripada aspirasi masyarakat secara luas (Aspinall, E., & Berenschot, W., 2024). Realitas ini menunjukkan bahwa budaya patronase memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap cara kerja birokrasi dan sistem politik. Hubungan yang didasarkan pada loyalitas pribadi dapat memenuhi batasan antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Penguatan sistem meritokrasi, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta pengawasan publik menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan profesional. Kesadaran kolektif mengenai pentingnya integritas dalam

kehidupan politik dan birokrasi juga menjadi fondasi penting untuk menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

2.2.3 Dampak Patronase Budaya terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Budaya patronase mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, terutama dalam cara kekuasaan dijalankan dan sumber daya publik yang dikelola. Patronase Merujuk pada hubungan timbal balik antara pihak yang memiliki kekuasaan dengan pihak yang memberikan dukungan atau loyalitas. Dalam praktik pemerintahan, hubungan semacam ini sering diwujudkan dalam bentuk pemberian jabatan, akses terhadap proyek, atau keuntungan tertentu sebagai balas jasa atas dukungan politik. Pola hubungan yang didasarkan pada loyalitas pribadi ini dapat menggeser organisasi pemerintahan dari kepentingan publik menuju kepentingan kelompok tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa patronase dapat mempengaruhi kualitas institusi publik karena keputusan sering kali tidak sepenuhnya didasarkan pada

Salah satu dampak yang paling terlihat dari budaya patronase adalah lemahnya sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan. Dalam sistem yang sehat, pengisian jabatan publik seharusnya didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kapasitas profesional seseorang. Budaya patronase dapat memaksakan prinsip tersebut karena proses penempatan jabatan lebih dipengaruhi oleh kedekatan hubungan, lembaga jasa politik, atau jaringan kekuasaan. Situasi ini dapat menurunkan kualitas kinerja birokrasi karena individu yang menduduki posisi strategis belum tentu memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjalankannya secara efektif. Penelitian mengenai tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa praktik patronase sering kali berkaitan dengan rendahnya efisiensi administrasi serta meningkatkan risiko yang dikirimkan dalam otoritas resmi Pepinsky, Pierskalla, & Sacks, (2020).

Budaya patronase juga berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan publik. Ketika hubungan kekuasaan lebih banyak didasarkan pada loyalitas pribadi, proses pengambilan keputusan cenderung berlangsung secara tertutup dan sulit dipuji oleh masyarakat. Keputusan mengenai kebijakan, pengelolaan anggaran, atau distribusi proyek pembangunan dapat dipengaruhi oleh kepentingan jaringan tertentu yang berada di sekitar pusat kekuasaan. Kondisi ini berpotensi memperlemah sistem pengawasan publik serta membuka ruang bagi praktik korupsi dan konflik kepentingan. Kajian mengenai politik patronase menunjukkan bahwa sistem yang didominasi oleh hubungan patron–klien cenderung menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Aspinall)

2.3 Psikologi Moral Pelaku Korupsi

Psikologi pelaku moral korupsi berkaitan dengan cara individu memahami, menilai, dan mengambil keputusan terhadap tindakan yang memiliki konsekuensi moral. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi tidak selalu memandang perbuatannya sebagai tindakan yang sepenuhnya salah. Proses psikologis tertentu dapat membuat seseorang menyesuaikan cara berpikirnya agar tindakan yang dilakukan terasa dapat diterima oleh dirinya sendiri. Dalam praktiknya, pelaku korupsi sering membangun rasionalisasi moral untuk menenangkan konflik batin yang mungkin muncul. Rasionalisasi ini dapat berupa keyakinan bahwa tindakan tersebut dilakukan demi kebutuhan keluarga, sebagai kompensasi atas kerja keras yang tidak dihargai, atau karena sistem yang dianggap tidak adil. Cara berpikir semacam ini membantu individu menenangkan rasa bersalah yang mungkin timbul akibat pelanggaran terhadap norma moral. Penelitian mengenai perilaku korupsi menunjukkan bahwa proses rasionalisasi memainkan peran penting dalam membuat individu merasa bahwa tindakannya masih dapat dibenarkan, meskipun secara objektif melanggar hukum dan merugikan kepentingan publik (Prabowo, HY, & Cooper, K., 2021)

Pemahaman terhadap psikologi pelaku moral korupsi memberikan gambaran bahwa tindakan koruptif tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau kesempatan, tetapi juga oleh proses psikologis yang terjadi dalam diri individu. Kesadaran moral, empati terhadap dampak sosial dari suatu tindakan, serta kemampuan untuk mempertahankan nilai integritas menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya perilaku koruptif. Pendidikan etika, keteladanan kepemimpinan, serta lingkungan organisasi yang menumbuhkan integritas budaya dapat membantu memperkuat kesadaran

2.3.1 Pengertian psikologi moral dalam perilaku manusia

Psikologi moral merupakan bidang kajian dalam psikologi yang mempelajari bagaimana manusia memahami nilai-nilai baik dan buruk, serta bagaimana nilai tersebut mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Psikologi moral membantu menjelaskan proses batin yang terjadi ketika seseorang menghadapi pilihan yang berkaitan dengan tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan. Dalam kehidupan sosial, manusia tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya, tetapi juga mempertimbangkan norma, nilai, dan perasaan orang lain. Proses penilaian ini membentuk kesadaran moral yang menjadi dasar bagi seseorang dalam menentukan tindakan yang dianggap benar atau tidak tepat (Narvaez & Lapsley,

Dalam perkembangan manusia, psikologi moral terbentuk melalui proses yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai pengalaman sosial. Sejak masa kanak-kanak, individu mulai belajar mengenali nilai-nilai moral melalui keluarga, pendidikan, serta interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kepedulian terhadap orang lain dipersyaratkan. Psikologi moral juga berkaitan dengan

kemampuan individu dalam menghadapi situasi yang menuntut pertimbangan etis. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sering berada pada situasi yang memerlukan pilihan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Pada saat seperti ini, proses moral tidak hanya melibatkan pemikiran rasional, tetapi juga emosi

Pemahaman mengenai psikologi moral menunjukkan bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal atau hukum, tetapi juga oleh kesadaran batin yang berkembang dalam diri individu. Nilai moral yang tertanam kuat dapat membantu seseorang tetap bertindak secara jujur dan bertanggung jawab meskipun menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupan sosial. Lingkungan keluarga, pendidikan, serta budaya masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran moral tersebut. Ketika nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama dipelihara dalam kehidupan bersama, individu akan lebih mudah mengembangkan perilaku yang menghargai martabat manusia dan kepentingan masyarakat secara luas.

2.3.2 Faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku korupsi

Perilaku korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh peluang atau kelemahan sistem pengawasan, tetapi juga oleh berbagai faktor psikologis yang berkembang dalam diri individu. Faktor psikologis berkaitan dengan cara seseorang memandang kekuasaan, menilai keuntungan pribadi, serta mempertimbangkan konsekuensi moral dari tindakannya. Dalam situasi tertentu, individu yang memiliki orientasi kuat terhadap kepentingan pribadi dan pencapaian material dapat lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan wewenang ketika berada pada posisi yang memberikan akses terhadap sumber daya publik. Proses pengambilan keputusan ini melibatkan pertimbangan internal seperti persepsi terhadap risiko, rasa aman dari kemungkinan hukuman, serta keyakinan bahwa tindakan tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi dirinya atau kelompoknya (Prabowo, HY, & Cooper, K., 2021). Salah satu faktor psikologis yang penting dalam memahami perilaku korupsi adalah proses rasionalisasi moral. Individu yang melakukan tindakan koruptif sering kali berusaha membenarkan perilakunya melalui berbagai cara berpikir yang membuat tindakan tersebut terasa dapat diterima secara pribadi. Rasionalisasi ini dapat muncul dalam bentuk keyakinan bahwa tindakan tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga, sebagai kompensasi atas kerja keras yang tidak dihargai, atau sebagai respons terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Cara berpikir seperti ini membantu individu mengurangi rasa bersalah yang mungkin timbul akibat pelanggaran terhadap norma moral. Dalam kajian psikologi sosial, mekanisme ini dijelaskan melalui konsep *moral disengagement*, yaitu proses ketika individu secara psikologis menjauhkan diri dari standar moral sehingga mampu melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa mengalami konflik batin yang kuat (Bandura, A., 2020)

Faktor psikologis lain yang turut memengaruhi perilaku korupsi adalah persepsi individu terhadap norma sosial dan budaya organisasi di sekitarnya. Individu yang berada dalam lingkungan kerja yang terbiasa mentoleransi penyimpangan cenderung lebih mudah

menganggap perilaku koruptif sebagai sesuatu yang biasa. Ketika seseorang melihat praktik serupa dilakukan oleh rekan kerja atau atasan tanpa konsekuensi yang jelas, sensitivitas moral terhadap tindakan tersebut dapat berkurang. Kondisi ini membuat individu menilai bahwa perilaku tersebut merupakan bagian dari kebiasaan dalam sistem yang ada. Penelitian mengenai integritas dalam organisasi menunjukkan bahwa budaya organisasi yang lemah dalam menegakkan nilai kejujuran dan akuntabilitas dapat memengaruhi cara individu menilai batas antara tindakan yang dapat diterima dan yang melanggar etika (Huberts, 2021).

2.3.3 Motivasi dan rasionalisasi pelaku korupsi

Analisis psikologis memberikan sudut pandang yang lebih mendalam dalam memahami perilaku koruptif karena menyoroti proses mental yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan. Dalam banyak kasus, tindakan korupsi tidak hanya berkaitan dengan kesempatan atau kelemahan sistem pengawasan, tetapi juga dengan cara individu memaknai kekuasaan, keuntungan, dan tanggung jawab moral. Ketika seseorang berada dalam posisi yang memiliki akses terhadap sumber daya publik, proses pengambilan keputusan sering melibatkan pertimbangan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Kajian psikologi perilaku menunjukkan bahwa persepsi terhadap risiko, peluang keuntungan, serta tingkat kesadaran moral dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan koruptif.(Prabowo, HY, & Cooper, K., 2021).Pendekatan psikologis juga menekankan pentingnya memahami mekanisme pembenaran diri yang sering digunakan oleh pelaku korupsi. Individu yang melakukan tindakan koruptif sering mengembangkan cara berpikir yang membuat perilaku tersebut terasa lebih dapat diterima secara pribadi. Mekanisme ini dapat muncul dalam bentuk rasionalisasi, seperti anggapan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena tekanan ekonomi, karena semua orang di lingkungan kerja melakukan hal yang sama, atau karena sistem yang ada dianggap tidak adil. Dalam psikologi sosial, proses ini berkaitan dengan konsep *moral disengagement*, yaitu keadaan ketika individu secara psikologis menjauhkan diri dari standar moral yang seharusnya menjadi pedoman dalam bertindak. Melalui mekanisme tersebut, seseorang dapat mengurangi rasa bersalah meskipun tindakannya merugikan kepentingan publik (Bandura,A, 2020)

Analisis psikologis juga memperlihatkan bagaimana lingkungan sosial dan budaya organisasi memengaruhi perilaku individu. Individu yang bekerja dalam lingkungan yang terbiasa mentoleransi penyimpangan cenderung lebih mudah menyesuaikan diri dengan pola perilaku yang ada di sekitarnya. Ketika praktik korupsi berlangsung tanpa konsekuensi yang jelas, sensitivitas moral terhadap tindakan tersebut dapat menurun secara perlahan. Lingkungan organisasi yang tidak menekankan nilai integritas dan akuntabilitas dapat membuat individu memandang tindakan koruptif sebagai bagian dari praktik yang dianggap normal. Penelitian mengenai etika organisasi menunjukkan bahwa budaya kerja yang lemah dalam menegakkan nilai kejujuran dapat meningkatkan kemungkinan

terjadinya perilaku tidak etis dalam institusi publik maupun organisasi lainnya Huberts, L, (2021)

Pemahaman psikologis terhadap perilaku koruptif membantu memperlihatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penguatan sistem hukum dan pengawasan kelembagaan. Kesadaran moral, empati terhadap dampak sosial dari suatu tindakan, serta kemampuan individu untuk mempertahankan integritas memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi

2.4. Dampak Korupsi Terhadap Kepercayaan Sosial dan Pembangunan

2.4.1 Pengaruh korupsi terhadap stabilitas sosial

Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga membawa dampak yang luas terhadap stabilitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Stabilitas sosial berkaitan dengan terciptanya kondisi masyarakat yang tertib, adil, dan saling percaya dalam menjalankan kehidupan bersama. Ketika praktik korupsi terjadi secara berulang dan melibatkan berbagai institusi publik, masyarakat dapat mengalami penurunan kepercayaan terhadap lembaga negara yang seharusnya melindungi kepentingan publik. Ketidakpercayaan ini dapat memunculkan sikap skeptis terhadap kebijakan pemerintah serta menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi sering berkaitan dengan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan lembaga hukum (Transparency International, 2023).

Dalam kehidupan sosial, korupsi juga dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat. Sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama sering kali dialihkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini dapat menghambat distribusi keadilan sosial dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Ketika masyarakat melihat bahwa akses terhadap layanan publik dipengaruhi oleh kedekatan kekuasaan atau kemampuan ekonomi, rasa keadilan sosial dapat terganggu. Ketimpangan semacam ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial karena sebagian kelompok merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem sosial yang ada (Bank Dunia., n.d.). Korupsi juga dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial dalam masyarakat. Ketika praktik penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang sering diberitakan atau terlihat dalam kehidupan publik, nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial dapat mengalami erosi secara perlahan. Masyarakat dapat menjadi lebih apatis terhadap pelanggaran etika karena merasa bahwa praktik tersebut telah menjadi bagian dari realitas sosial yang sulit dihindari. Dalam kondisi seperti ini, norma sosial yang seharusnya menjadi pedoman bersama dapat kehilangan kekuatannya dalam mengatur perilaku individu. Penelitian dalam bidang tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa korupsi yang berlangsung secara sistemik dapat melemahkan budaya integritas dalam masyarakat Huberts, L., (2021)

Pengaruh korupsi terhadap stabilitas sosial juga terlihat dalam melemahnya rasa solidaritas dan kepercayaan antarwarga. Kepercayaan sosial merupakan fondasi penting dalam membangun kerja sama, partisipasi publik, serta kehidupan demokratis yang sehat. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem yang ada tidak berjalan secara adil, muncul kemungkinan meningkatnya konflik sosial, ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan menurunnya legitimasi institusi negara. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan melindungi keuangan negara, tetapi juga menjaga kepercayaan sosial dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Lingkungan sosial yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta integritas dapat membantu memperkuat stabilitas sosial dan menciptakan kehidupan bersama yang lebih adil dan bermartabat.

2.4.2 Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang dapat menghambat proses pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam konteks pembangunan, sumber daya publik seharusnya digunakan untuk mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program pengentasan kemiskinan. Ketika praktik korupsi terjadi, sebagian sumber daya tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kondisi ini menyebabkan penggunaan anggaran menjadi tidak efektif dan mengurangi kapasitas negara dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi berkaitan dengan rendahnya efisiensi pengeluaran publik dan melemahnya kualitas pembangunan ekonomi. (Bank Dunia., n.d.). Korupsi juga dapat memengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Investor pada umumnya membutuhkan kepastian hukum, transparansi, serta sistem birokrasi yang adil dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Praktik korupsi dapat menciptakan ketidakpastian dalam proses perizinan, pengadaan proyek, maupun pengelolaan sumber daya ekonomi. Situasi ini dapat meningkatkan biaya transaksi dan menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem ekonomi yang ada. Akibatnya, investasi yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Kajian global mengenai korupsi menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan dengan negara yang memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan (Transparency International., 2023). Dampak korupsi juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih rentan. Program pembangunan yang seharusnya membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat mengalami penurunan efektivitas ketika sebagian anggarannya disalahgunakan. Hal ini dapat terlihat dalam kualitas infrastruktur yang rendah, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta tidak meratanya distribusi bantuan sosial. Kondisi tersebut dapat memperbesar kesenjangan sosial dan memperlambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kajian pembangunan, korupsi sering dipandang sebagai

faktor yang memperburuk ketimpangan ekonomi karena manfaat pembangunan tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Bank Dunia., n.d.)

Dampak jangka panjang dari korupsi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Ketika korupsi terus terjadi, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat menurun, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan menjadi semakin lemah. Padahal keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Upaya pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Transparansi, akuntabilitas, serta penguatan nilai integritas dalam pengelolaan sumber daya publik dapat membantu memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Bab 3 Konsep Pedagogi Moral dalam Pendidikan

Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga bertujuan untuk membentuk pribadi yang memiliki nilai, sikap, dan perilaku moral yang baik. Dalam konteks ini, moral pedagogi menjadi salah satu dasar utama dalam proses belajar mengajar. Pendidik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan karakter dan kesadaran moral peserta didik serta membimbing mereka dalam mengambil keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Singkatnya, pendidikan tidak hanya membentuk siswa yang pintar di bidang akademik, tetapi juga mencetak manusia yang jujur, peduli, dan penuh rasa empati terhadap orang lain.

Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai pengertian pedagogi moral dan karakter sebagai dasar pemahaman tentang pentingnya pendidikan nilai dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Selanjutnya akan dibahas teori tentang bagaimana perkembangan moral terjadi dalam pendidikan, yang menjelaskan proses pertumbuhan nilai - nilai dan kemampuan berpikir moral dalam diri seseorang. Bab ini juga menguraikan peran sekolah sebagai komunitas etis yang tidak hanya menjadi tempat transfer pengetahuan, tetapi juga ruang terbentuknya budaya nilai dan sikap moral. Pada bagian akhir, dijelaskan bagaimana nilai - nilai moral dapat diintegrasikan dalam pembelajaran sehingga menjadi upaya nyata dalam membentuk karakter melalui proses pendidikan yang bermakna

3.1 Pengertian pedagogi moral dan karakter

Pedagogi moral adalah pendekatan pendidikan yang mencakup pengembangan nilai - nilai, sikap, dan perilaku etis sebagai bagian kunci dari proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, pedagogi moral bukan hanya tentang mengajarkan apa yang benar dan salah, tetapi juga tentang proses pengembangan kesadaran moral yang membantu siswa memahami, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Pendidikan moral berfungsi sebagai proses transformasi nilai-nilai yang membentuk cara berpikir, sikap, dan perilaku individu, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup secara etis dan bermakna dalam masyarakat (Nurjanah, et al., 2024). Jadi, pedagogi moral dapat dipahami sebagai upaya sistematis dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan moral siswa melalui pengetahuan, refleksi, dan pengalaman hidup yang bermakna.

Dari segi karakter pendidikan, pedagogi moral berperan sebagai landasan penting dalam membentuk kepribadian siswa secara komprehensif. Pendidikan karakter pada dasarnya adalah proses menanamkan nilai-nilai yang meliputi pengetahuan tentang moral, perasaan tentang moral, dan tindakan berdasarkan moral. Hal ini membantu individu tidak

hanya memahami nilai-nilai yang baik tetapi juga memiliki keinginan dan kebiasaan untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari - hari (Pamuji, S., 2024). Karakter yang baik ditunjukkan melalui kualitas seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan disiplin, yang tumbuh melalui praktik rutin dan dengan mengikuti contoh yang baik dalam lingkungan pendidikan. Itulah mengapa pendidikan moral dan pengembangan karakter tidak dapat dipisahkan , karena keduanya berfokus pada pembentukan manusia yang berintegritas. Secara lebih mendalam, pedagogi moral mengingatkan kita bahwa pendidikan sesungguhnya adalah proses menjadikan manusia lebih manusiawi. Sekolah bukan hanya tempat untuk menyampaikan pengetahuan akademis, tetapi juga tempat nilai-nilai kemanusiaan dipelajari dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari -hari. Melalui interaksi dengan guru, teman sekelas, dan lingkungan sekolah, siswa belajar memahami makna tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap orang lain. Dalam konteks ini, pendidikan karakter berfungsi sebagai landasan moral yang membantu siswa menghadapi berbagai tantangan sosial dan perubahan di dunia modern dengan bijak (Dewi, A. C., et al., 2023); (Putri, et al., 2024). Jadi, pendidikan moral tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual , tetapi juga membangun kematangan moral, yang merupakan landasan bagi kehidupan sosial yang harmonis.

Lebih lanjut, pedagogi moral juga menekankan pentingnya proses pendidikan yang memberi siswa kesempatan untuk secara sadar menginternalisasi nilai - nilai, daripada hanya menerima aturan secara pasif. Menginternalisasi nilai - nilai moral terjadi ketika siswa memahami alasan di balik suatu nilai, merasakan pentingnya nilai tersebut, dan mampu menerapkannya dalam tindakan kehidupan nyata. Dalam praktik pendidikan, proses ini dapat dilakukan melalui dialog moral, diskusi kasus, refleksi pengalaman, dan pembelajaran yang menekankan kerja tim dan kepedulian sosial. Pendekatan ini membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memperkuat komitmen moral mereka ketika menghadapi berbagai situasi kehidupan (Berkowitz & MW; Bier, MC, 2021).

Selain itu, pendidikan terkait erat dengan peran guru sebagai panutan dalam proses pendidikan. Seorang guru bukan hanya seseorang yang memberikan pelajaran, tetapi juga panutan yang nilai - nilainya dapat diikuti siswa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sikap jujur, adil, hormat, dan empati seorang guru terhadap siswa merupakan bagian penting dari etika pendidikan yang tersembunyi. Namun, pendidikan moral yang kuat sangatlah penting. Studi menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang menunjukkan nilai-nilai positif seperti saling menghormati, bekerja sama, dan memikul tanggung jawab bersama dapat sangat membantu siswa mengembangkan karakter mereka (Kristjánsson, K., 2020). Oleh karena itu, keberhasilan pedagogi moral tidak hanya bergantung pada kurikulum tetapi juga pada budaya sekolah dan kualitas hubungan antara guru dan siswa.

3.2 Teori perkembangan moral dalam pendidikan

Teori perkembangan moral adalah kerangka gagasan yang menjelaskan bagaimana individu secara bertahap memahami nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip etika dalam kehidupan sosial. Dalam konteks pendidikan, teori ini membantu guru memahami bahwa kemampuan moral siswa tidak muncul tiba-tiba, melainkan berkembang dari waktu ke waktu melalui proses yang dipengaruhi oleh kematangan kognitif, pengalaman sosial, dan interaksi mereka dengan lingkungan. Pendidikan yang mempertimbangkan tahapan perkembangan moral lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai karena sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Sehingga, teori perkembangan moral memberikan dasar ilmiah bagi guru untuk merancang strategi pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga membantu siswa mengembangkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial mereka (Dewi, A. C., et al., 2023). Salah satu tokoh penting dalam studi perkembangan moral adalah Jean Piaget, yang melihat moralitas sebagai bagian dari perkembangan kognitif anak. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan moral anak bergerak dari tahap moralitas heteronom ke tahap moralitas otonom. Selama tahap heteronom, anak-anak melihat aturan sebagai sesuatu yang mutlak dan harus diikuti karena berasal dari otoritas seperti orang tua atau guru. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman sosial, anak-anak mulai memasuki tahap otonomi moral, yaitu ketika mereka mulai memahami bahwa aturan dapat didiskusikan dan dinilai berdasarkan keadilan dan kesepakatan antar individu. Perspektif ini menyoroti bahwa interaksi sosial, kerja sama, dan dialog memainkan peran kunci dalam mengembangkan kesadaran moral siswa (Leonia, RA; & Candra, KI, 2025).

Pengembangan lebih lanjut dari gagasan Piaget diperkenalkan oleh Lawrence Kohlberg, yang mengusulkan teori yang lebih sistematis tentang tahapan perkembangan moral. Kohlberg menjelaskan bahwa penalaran moral berkembang melalui tiga tingkatan utama, masing-masing terdiri dari dua tahapan. Teori ini menekankan bahwa perkembangan moral terkait erat dengan kemampuan individu untuk mengevaluasi tindakan berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Tahapan tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1. Tingkat Prakonvensional

Tahap ketika individu menilai tindakan terutama berdasarkan konsekuensi langsung bagi dirinya. Pada tahap ini, anak cenderung mematuhi aturan karena takut terhadap hukuman atau karena mengharapkan imbalan.

2. Tingkat Konvensional

Tahap di mana individu mulai mempertimbangkan norma sosial dan harapan lingkungan. Pada tahap ini, seseorang berusaha bertindak sesuai dengan nilai yang berlaku dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat, karena ingin diterima sebagai anggota kelompok yang baik.

3. Tingkat Pascakonvensional

Tahap perkembangan moral yang lebih matang, di mana individu mampu menilai suatu tindakan berdasarkan prinsip etika universal seperti keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan bersama. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi hanya mengikuti aturan secara pasif, tetapi mampu mengevaluasi aturan tersebut secara kritis dan mempertimbangkan nilai moral yang lebih luas.

Menurut Kohlberg, perkembangan moral bukan hanya tentang bertambah usia, tetapi juga tentang kesempatan yang dimiliki seseorang untuk menghadapi dilema moral dan memikirkan keputusan etis. Oleh karena itu, dalam pendidikan, kegiatan seperti diskusi moral, studi kasus, dan dialog reflektif diperlukan untuk mendorong perkembangan penalaran moral siswa (Hanafiah, M., 2023).

Selain pendekatan kognitif yang dikembangkan oleh Piaget dan Kohlberg, penelitian modern tentang perkembangan moral juga menyoroti pentingnya aspek emosional dan sosial dalam membentuk moralitas. Perspektif ini menunjukkan bahwa empati, kepedulian, dan intuisi moral memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan etis. Studi terbaru menunjukkan bahwa perkembangan moral siswa dapat diperkuat melalui pengalaman belajar kontekstual, seperti pembelajaran berbasis proyek, kerja kelompok, dan kegiatan sosial yang memungkinkan siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain (Leonia, RA; & Candra, KI, 2025).

Secara reflektif, teori perkembangan moral mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya tentang mewariskan pengetahuan, tetapi juga tentang membimbing siswa untuk menjadi individu yang mampu membuat keputusan yang bijaksana dan sadar. Sekolah memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dialog, refleksi, dan pengalaman moral yang bermakna. Melalui proses ini, siswa tidak hanya belajar memahami nilai-nilai secara konseptual, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam tindakan kehidupan nyata. Jadi, penerapan teori perkembangan moral dalam pendidikan dapat membantu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan mampu hidup bertanggung jawab dalam masyarakat yang beragam dan selalu berubah.

3.3 Peran sekolah sebagai komunitas etis

Sekolah merupakan salah satu lembaga sosial penting yang memainkan peran kunci dalam membentuk perkembangan moral dan karakter siswa. Dari perspektif pedagogi moral, sekolah bukan hanya tempat di mana pengetahuan akademis dibagikan, tetapi juga ruang sosial di mana nilai-nilai etika dipelajari, dipraktikkan, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui interaksi antara guru, siswa, dan seluruh anggota komunitas sekolah, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan saling menghormati dapat berkembang secara alami dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Oleh

karena itu, sekolah dapat dilihat sebagai komunitas etis, yaitu lingkungan pendidikan yang secara sengaja menumbuhkan budaya moral dalam setiap aktivitas (Berkowitz & MW; Bier, MC, 2021).

Gagasan sekolah sebagai komunitas etis berfokus pada fakta bahwa pendidikan moral tidak hanya terjadi pada mata pelajaran tertentu, tetapi juga melalui budaya sekolah dan lingkungan secara keseluruhan. Nilai - nilai moral tidak dapat diajarkan hanya melalui teori, tetapi harus ditunjukkan melalui praktik kehidupan sekolah. Ketika siswa melihat bahwa nilai - nilai yang diajarkan ditunjukkan dengan jelas dalam Dengan adanya perilaku anggota sekolah yang baik, proses internalisasi nilai - nilai tersebut terjadi lebih efektif. Lingkungan sekolah yang adil, terbuka, dan penuh hormat membantu siswa belajar tentang moral melalui pengalaman kehidupan nyata (Kristjánsson, K., 2020). Sekolah juga memainkan peran komunitas moral dengan berupaya menciptakan lingkungan sosial yang membantu siswa mengembangkan karakter mereka. Iklim sekolah yang positif ditunjukkan dengan adanya hubungan yang saling menghormati, komunikasi terbuka, dan rasa aman serta kepercayaan di antara semua anggota sekolah. Studi menunjukkan bahwa iklim sekolah yang sehat membantu siswa mengembangkan moral, empati, dan perilaku prososial mereka. Dalam lingkungan seperti ini, siswa tidak hanya belajar tentang nilai - nilai, tetapi mereka juga mengalami secara langsung manfaat menjalani kehidupan berdasarkan nilai - nilai moral (Nucci, L. et al., 2022).

Selain itu, guru memainkan peran yang sangat penting dalam membangun sekolah sebagai komunitas yang beretika. Seorang guru bukan hanya seseorang yang memberikan pelajaran, tetapi juga teladan moral bagi siswa untuk diikuti. Seorang guru yang jujur, adil, peduli, dan menghormati setiap siswa dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk karakter siswa. Teladan moral yang diberikan oleh guru seringkali memiliki dampak yang lebih besar daripada nasihat formal atau peraturan yang diberikan secara resmi. Oleh karena itu, integritas dan perilaku konsisten guru memainkan peran penting dalam menciptakan budaya moral di lingkungan sekolah.

Sekolah juga menunjukkan perannya sebagai komunitas etis melalui berbagai kebijakan dan aturan yang diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Aturan sekolah seharusnya tidak hanya digunakan sebagai alat kontrol atau disiplin, tetapi juga sebagai cara untuk mengajarkan nilai -nilai moral. Ketika aturan dibuat secara adil, dibagikan secara terbuka, dan diterapkan secara konsisten, siswa dapat mempelajari pentingnya tanggung jawab dan keadilan dalam kehidupan kelompok. Jadi, aturan sekolah menjadi pelajaran moral dalam kehidupan nyata bagi siswa.

Di sisi lain, partisipasi aktif siswa dalam kehidupan sekolah juga merupakan faktor penting dalam membangun komunitas etis. Sekolah yang membiarkan siswa mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, pengorganisasian kegiatan, dan melakukan kerja sosial membantu mereka belajar tentang demokrasi, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Melalui pengalaman ini, peserta belajar bahwa nilai -nilai moral bukanlah sekadar ide

abstrak, tetapi prinsip - prinsip yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial (Berkowitz & MW; Bier, MC, 2021).

Sekolah sebagai komunitas etis juga perlu mendorong budaya Dialog dan refleksi moral. Diskusi terbuka tentang berbagai isu sosial dan etika dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan empati terhadap sudut pandang orang lain . Selama proses diskusi, siswa belajar untuk menghormati pendapat yang berbeda , memahami berbagai sudut pandang, dan menemukan solusi yang adil dan bijaksana untuk berbagai masalah.

Selain lingkungan internal sekolah, keterlibatan keluarga dan masyarakat juga merupakan faktor penting dalam memperkuat peran sekolah sebagai komunitas yang beretika. Pendidikan moral akan lebih efektif ketika ada kesepakatan antara nilai - nilai yang diajarkan di sekolah dan nilai - nilai yang dipraktikkan di rumah dan di masyarakat. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat setempat dapat menciptakan lingkungan yang konsisten untuk menanamkan nilai-nilai moral pada siswa.

Dalam konteks pendidikan abad ke - 21, peran sekolah sebagai komunitas yang beretika menjadi semakin penting di tengah berbagai tantangan sosial dan kemajuan teknologi. Siswa menghadapi berbagai pengaruh dari media digital, informasi global, dan nilai - nilai sosial yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, sekolah perlu menjadi tempat yang membantu siswa mengembangkan literasi moral , yang berarti kemampuan untuk mengevaluasi informasi, memahami dampak tindakan, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi dan berinteraksi di dunia digital.

Untuk mewujudkan sekolah sebagai komunitas etis, terdapat beberapa prinsip penting yang dapat dikembangkan dalam lingkungan pendidikan, antara lain:

- a. Keteladanan moral dari guru dan tenaga kependidikan, sehingga nilai-nilai etika tercermin dalam perilaku sehari-hari.
- b. Budaya sekolah yang positif, seperti saling menghargai, disiplin, dan kerja sama.
- c. Partisipasi aktif peserta didik, melalui organisasi sekolah, kegiatan sosial, dan musyawarah kelas.
- d. Dialog dan refleksi moral, melalui diskusi kasus, pembelajaran berbasis masalah, atau refleksi pengalaman.
- e. Kerja sama dengan keluarga dan masyarakat, sehingga pendidikan nilai berlangsung secara konsisten di berbagai lingkungan kehidupan peserta didik.

Secara Reflektif, sekolah sebagai komunitas etis mengingatkan kita bahwa pendidikan sejati adalah tentang membangun kehidupan bersama yang bermakna. Sekolah bukan hanya tempat untuk mempelajari mata pelajaran, tetapi juga ruang di mana nilai-nilai kemanusiaan dasar dibentuk. Ketika sekolah membangun budaya yang menghargai kejujuran, keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab, pendidikan menghasilkan siswa yang cerdas di sekolah tetapi juga orang-orang dengan nilai -nilai moral yang kuat yang dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

3.4 Integrasi Nilai Moral dalam Praktik Pembelajaran

Mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam proses pembelajaran merupakan strategi penting untuk menciptakan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada perolehan pengetahuan tetapi juga pada pengembangan karakter siswa. Dalam konteks pedagogi moral, pembelajaran bukan hanya tentang penyampaian pengetahuan, tetapi juga tentang menanamkan nilai - nilai yang membentuk cara berpikir, sikap, dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari - hari. Oleh karena itu, nilai - nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, kerja tim, dan kepedulian sosial perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam setiap proses pembelajaran di kelas. Integrasi ini membantu siswa menyadari bahwa nilai - nilai moral bukan hanya ide abstrak, tetapi prinsip - prinsip kehidupan penting yang harus ditunjukkan melalui tindakan nyata ((Berkowitz & MW; Bier, MC, 2021)

Dalam pendidikan modern , pengajaran nilai - nilai moral tidak harus dilakukan hanya melalui mata pelajaran tertentu, tetapi dapat dimasukkan dalam semua kegiatan pembelajaran di berbagai mata pelajaran. Guru memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang membantu siswa memahami nilai - nilai moral melalui berbagai kegiatan pembelajaran . Sebagai contoh, dalam pembelajaran diskusi kelompok, siswa belajar untuk menghormati pendapat orang lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama . Pada saat yang sama, melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat belajar tentang tanggung jawab, kepedulian sosial , dan kemampuan untuk membuat keputusan etis. Pendekatan ini membantu siswa menghubungkan nilai-nilai moral dengan situasi kehidupan nyata, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna (Nucci, L. et al., 2022)

Integrasi nilai moral juga menuntut adanya perubahan paradigma dalam proses pembelajaran. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik untuk memahami makna nilai melalui pengalaman belajar. Proses refleksi menjadi bagian penting dalam pembelajaran moral, karena melalui refleksi siswa dapat mengevaluasi tindakan, memahami konsekuensi dari pilihan yang diambil, serta mengembangkan kesadaran moral yang lebih mendalam. Dengan demikian, pembelajaran yang mengintegrasikan nilai moral akan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis sekaligus memperkuat kepekaan etis terhadap berbagai persoalan sosial (Kristjánsson, K., 2020).

Selain melalui strategi pembelajaran, integrasi nilai moral juga dapat dilakukan melalui pembiasaan perilaku positif dalam kegiatan belajar sehari-hari. Pembiasaan ini dapat terlihat dalam praktik sederhana seperti disiplin waktu, kejujuran dalam mengerjakan tugas, menghargai perbedaan pendapat, serta menunjukkan sikap saling membantu antar teman. Ketika nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam kegiatan belajar, peserta didik akan menginternalisasi nilai tersebut sebagai bagian dari karakter pribadinya. Dalam hal ini, konsistensi antara nilai yang diajarkan dan praktik yang dilakukan di kelas menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan moral.

Di samping itu, integrasi nilai moral dalam pembelajaran juga perlu didukung oleh pendekatan pedagogis yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Pembelajaran yang partisipatif memungkinkan siswa untuk mengalami secara langsung berbagai situasi yang memerlukan pertimbangan moral. Melalui dialog, kerja kelompok, simulasi, maupun studi kasus, siswa dapat belajar memahami berbagai sudut pandang serta mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Proses ini membantu peserta didik mengembangkan kemampuan penalaran moral sekaligus membangun empati terhadap orang lain (Lickona, 2021)

Untuk memperkuat implementasi integrasi nilai moral dalam praktik pembelajaran, guru dapat menerapkan beberapa strategi berikut:

1. Pembelajaran berbasis nilai (value-based learning)

Pembelajaran berbasis nilai adalah pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral secara langsung ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbagai mata pelajaran. Dalam pendekatan ini, guru tidak hanya mengajarkan mata pelajaran akademik, tetapi juga menghubungkannya dengan nilai-nilai kehidupan penting seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja tim, dan kepedulian sosial. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, siswa tidak hanya belajar tentang peristiwa masa lalu, tetapi mereka juga didorong untuk memahami nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan pengorbanan yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan cara ini, pengetahuan tidak terpisah dari kehidupan, melainkan menjadi alat untuk memahami realitas sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pendekatan pembelajaran berbasis nilai membantu siswa menyadari bahwa setiap pengetahuan memiliki implikasi moral dalam kehidupan sehari-hari. Ketika siswa memahami hubungan antara pengetahuan dan nilai-nilai moral, mereka lebih mampu menggunakan pengetahuan mereka dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam penerapan pembelajaran berbasis nilai, tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual tetapi juga memperkuat kesadaran peserta dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan.

2. Diskusi dilema moral

Diskusi dilema moral merupakan strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempertimbangkan berbagai pilihan tindakan dalam situasi yang mengandung konflik nilai. Dalam kegiatan ini, guru menghadirkan suatu kasus atau peristiwa yang mengandung persoalan etis, kemudian siswa diajak berdiskusi untuk menilai berbagai kemungkinan keputusan yang dapat diambil. Proses ini mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, serta mempertimbangkan alasan moral di balik setiap keputusan.

Melalui diskusi dilema moral, peserta didik belajar bahwa persoalan kehidupan tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana. Mereka dilatih untuk berpikir kritis, mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan, serta memahami perspektif yang berbeda. Selain itu, kegiatan ini juga membantu siswa mengembangkan empati dan sikap saling menghargai dalam berdialog. Dengan demikian, diskusi dilema moral menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan kemampuan penalaran moral sekaligus membangun budaya dialog yang sehat di dalam kelas.

3. Pembelajaran berbasis proyek social

Pembelajaran berbasis proyek sosial merupakan pendekatan yang menghubungkan kegiatan belajar dengan realitas kehidupan masyarakat. Dalam pendekatan ini, peserta didik dilibatkan dalam proyek yang memiliki manfaat sosial, seperti kegiatan pelestarian lingkungan, program literasi masyarakat, kegiatan kemanusiaan, atau proyek pelayanan sosial di lingkungan sekitar sekolah. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya belajar konsep akademik, tetapi juga mengalami secara langsung praktik nilai-nilai moral seperti kepedulian, tanggung jawab, dan solidaritas sosial.

Keterlibatan peserta didik dalam proyek sosial membantu mereka memahami bahwa pengetahuan yang diperoleh di sekolah memiliki makna yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat. Pengalaman ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa setiap individu memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif di lingkungannya. Dengan demikian, pembelajaran berbasis proyek sosial tidak hanya memperkuat kompetensi akademik, tetapi juga membangun karakter sosial peserta didik yang peduli dan bertanggung jawab.

4. Refleksi pembelajaran

Refleksi pembelajaran merupakan proses penting yang membantu siswa memahami makna dari pengalaman belajar alami mereka. Dalam kegiatan refleksi, siswa didorong untuk memikirkan apa yang telah dipelajari, bagaimana proses pembelajaran berlangsung, dan nilai-nilai yang dapat diambil dari pengalaman tersebut. Refleksi dapat dilakukan melalui diskusi kelas, menulis jurnal refleksi, atau percakapan terbuka antara guru dan siswa. Melalui refleksi, siswa menghubungkan pengetahuan mereka dengan pengalaman pribadi dan kehidupan sosial mereka. Proses ini membantu siswa mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan untuk memulai sikap dan tindakan mereka sendiri. Dengan cara ini, pembelajaran reflektif tidak hanya memperdalam pemahaman akademis tetapi juga membantu siswa menghayati nilai-nilai moral secara lebih mendalam.

5. Keteladanan guru

Keteladanan guru merupakan salah satu unsur paling penting dalam pendidikan moral. Dalam praktik pendidikan sehari-hari, peserta didik tidak hanya belajar dari materi yang diajarkan, tetapi juga dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh

guru. Guru yang menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan empati dalam interaksi sehari-hari akan memberikan contoh nyata tentang bagaimana nilai moral diwujudkan dalam kehidupan.

Keteladanan ini memiliki pengaruh yang sangat kuat karena peserta didik cenderung meniru perilaku yang mereka lihat secara langsung. Ketika guru mampu memperlakukan siswa dengan hormat, mendengarkan pendapat mereka dengan terbuka, serta bersikap adil dalam mengambil keputusan, maka siswa akan belajar tentang makna nilai-nilai tersebut secara konkret. Oleh karena itu, integrasi nilai moral dalam pembelajaran tidak hanya bergantung pada metode pengajaran, tetapi juga pada integritas dan konsistensi sikap guru sebagai figur pendidik.

Selain strategi tersebut, integrasi nilai moral juga dapat dilakukan melalui pengembangan budaya kelas yang positif. Budaya kelas yang menghargai dialog, kerja sama, dan sikap saling menghormati akan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan moral peserta didik. Dalam lingkungan yang demikian, siswa merasa aman untuk menyampaikan penapat, belajar dari kesalahan, serta mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Lingkungan belajar yang kondusif ini menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan karakter siswa ((Berkowitz & MW; Bier, MC, 2021)

Di era perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, integrasi nilai moral dalam pembelajaran juga perlu memperhatikan konteks kehidupan digital peserta didik. Penggunaan media digital dalam pembelajaran harus disertai dengan penanaman nilai-nilai etika digital seperti tanggung jawab dalam menggunakan informasi, menghargai karya orang lain, serta berkomunikasi secara santun di ruang digital. Literasi digital yang disertai dengan literasi moral akan membantu peserta didik menjadi individu yang tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga bijaksana dalam memanfaatkannya.

Secara reflektif, integrasi nilai moral dalam praktik pembelajaran menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang pembentukan manusia yang utuh. Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang mampu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang cerdas, ber karakter, serta memiliki kepedulian terhadap kehidupan sosial. Oleh karena itu, integrasi nilai moral dalam setiap proses pembelajaran merupakan langkah strategis untuk membangun generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan

Bab 4 Nilai-nilai Dasar Pendidikan Anti Korupsi

Bab ini mengkaji nilai-nilai dasar pendidikan anti korupsi melalui pendekatan kritis dan teoritis dengan menekankan pentingnya integrasi antara dimensi moral, struktural, dan kultural. Pendidikan anti korupsi tidak dapat dipahami semata sebagai transfer nilai normatif, melainkan sebagai proses transformasi kesadaran kritis terhadap relasi kekuasaan, struktur sosial, dan praktik institusional yang memungkinkan terjadinya korupsi. (*Website DJKN*, n.d.) Korupsi merupakan suatu tindakan yang tercela sehingga harus dihindari oleh kita semua. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan kemiskinan, meningkatkan kriminalisme dalam suatu negara. Dalam menghadapi korupsi yang mungkin saja dapat terjadi, mari kita kenali nilai-nilai antikorupsi sebagai berikut:

a. Jujur

Jujur adalah sikap yang lurus hati, melaksanakan amanah pekerjaan setulus hati, tidak mengatakan hal yang tidak sebenarnya, atau tidak memutarbalikkan fakta yang ada. Perilaku jujur tidak dibentuk dalam melalui kehidupan sehari-hari, namun diajarkan sejak kecil yaitu dengan tidak melakukan perbuatan yang mengandung unsur kebohongan seperti tidak mencontek dan tidak berbohong kepada guru.

b. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban dan tugas yang dibebankan dan wajib dilakukan seseorang. Menurut KBBI tanggungjawab merupakan keadaan untuk menanggung segala sesuatunya. Salah satu sikap tanggung jawab adalah berani mengakui kesalahan yang telah diperbuat, amanah dan dapat diandalkan dalam pekerjaan. Pribadi yang bertanggung jawab tidak akan melakukan korupsi karena yakin bahwa segala tindakan yang dilakukan akan mendapat ganjaran yang setimpal. Ciri-ciri seseorang yang memiliki sikap tanggungjawab, yaitu berhati-hati, menepati janji yang dibuat, melakukan tugas dengan maksimal, menanggung resiko atas perbuatannya, dan memiliki komitmen yang tinggi.

c. Disiplin

Secara etimologi disiplin berasal dari Bahasa latin, yaitu *discere* yang memiliki arti “belajar” atau mengajar. Menurut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disiplin merupakan tata tertib atau ketaatan pada suatu peraturan yang berlaku dan dapat merujuk pada suatu bidang tertentu. Disiplin merupakan kebiasaan untuk melaksanakan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan tepat pada waktunya. Dengan membentuk pribadi yang disiplin artinya siap berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

d. Mandiri

Mandiri dimaknai dengan keadaan yang dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada sesuatu hal ataupun orang lain. Konsep mandiri mengacu pada kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan tanpa bergantung pada orang lain secara berlebihan. Ciri-ciri seseorang yang memiliki sikap mandiri, yaitu (a) Memiliki kemampuan dalam menentukan Nasib sendiri; (b) Kreatif; (c) Inisiatif; (d) Mampu

mengatur tingkah laku; (e) Bertanggung jawab; (f) Mampu menahan diri; (g) Mampu membuat Keputusan sendiri; dan (h) Mengatasi masalah tanpa ada pengaruh orang lain. Kemandirian merupakan sikap yang akan menumbuhkan sikap antikorupsi untuk berani menentang perilaku korupsi.

e. Kerja keras

Kerja keras merupakan upaya yang memperlihatkan rasa sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai masalah dan hambatan untuk menyelesaikan kewajiban atau tugas dengan sebaik-baiknya. Pribadi yang bekerja keras dalam artian tidak mengenal lelah untuk mencapai target kinerja tertentu tentu akan selalu mengutamakan hasil dari suatu kegiatan. Kerja keras dan kerja cerdas tentu akan membuat pribadi menjadi lebih dekat dengan kesuksesan dibanding pribadi yang bermalas-malasan.

f. Sederhana

Sederhana merupakan suatu keadaan dan sifat yang melekat pada pribadi individu, ditunjukkan melalui pola perilaku sehari-hari yang tidak mencerminkan sikap berlebihan. Menurut KBBI, sederhana mengandung arti bersahaja; tidak berlebihan. Kemudian dalam arti pertengahan, sederhana diartikan tidak tinggi dan tidak rendah. Sederhana seringkali di samaartikan sebagai kemiskinan, namun tentunya berbeda. Kesederhanaan merupakan sebuah keputusan yang dipilih untuk menjalani hidup dalam batasan yang wajar, serta membebaskan diri dari segala ikatan yang tidak diperlukan. Seseorang yang hidup dengan perilaku sederhana mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan dan tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Individu yang tidak menerapkan perilaku sederhana dalam hidupnya hanya akan berfokus pada kemewahan dan hidup dengan berlebihan, hal ini tentu memunculkan tindakan korupsi yang dilakukan untuk memenuhi kepuasan akan kehidupan yang mewah.

g. Berani

Berani merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang secara sadar untuk menghadapi bahaya ataupun kesulitan. Keberanian dimiliki oleh orang yang memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri besar, pantang mundur dan tidak gentar. Contoh sikap berani dapat ditunjukkan melalui kemampuan pengendalian diri terhadap perilaku yang menyimpang salah satunya tindakan korupsi dan memiliki keberanian melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat. Seseorang yang berani melaporkan tindak pidana korupsi karena dia yakin bahwa itu adalah tindakan yang benar dan korupsi adalah kejahatan. Keberanian mesti dilandasi dengan kebenaran atas suatu fakta yang terjadi. Nilai keberanian perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi.

h. Peduli

Peduli merupakan perilaku keberpihakan untuk melibatkan diri dalam suatu persoalan dengan memperhatikan keadaan dan/atau kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar yang dapat melibatkan orang lain. Menurut KBBI peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Peduli merupakan bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang sebagai suatu respon terhadap permasalahan orang lain. Orang yang peduli ialah mereka yang terpenggil untuk melakukan kebaikan, ditunjukkan dengan mengasihi dan memperlakukan orang lain dengan etika baik. Menerapkan rasa peduli dapat memberikan inspirasi dan perubahan pada dunia sehingga menjadikannya sebagai tempat tinggal yang damai serta nyaman bagi seluruh makhluk.

i. Adil

Adil diartikan sebagai sikap dalam berpihak kepada sesuatu yang dianggap benar dan tidak memberi dampak kerugian pada orang lain. Adil berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut KBBI, adil bermakna sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Sedangkan secara terminologis adil diartikan sebagai suatu sikap bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Adil menjadi salah satu sifat yang harusnya dimiliki oleh tiap orang, dikarenakan seseorang yang adil selalu bersikap imparial, artinya tidak memihak pada satu sisi kecuali pada kebenaran. Dalam penerapannya, seseorang yang adil tidak akan memandang pada persamaan suku, bangsa maupun agama. Adil menjadi salah satu sikap yang menjadi penilaian terhadap hakim dalam terlaksananya suatu penilaian, kesaksian dan keputusan hukum yang berdasar pada kebenaran dengan tujuan mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi.

4.1 Kejujuran Sebagai Fondasi Integritas

Kejujuran adalah nilai moral yang menjadi dasar membangun kepercayaan, hubungan dan integritas seseorang. Dalam kehidupan pribadi, dunia kerja, maupun lingkungan sosial kejujuran menjadi kunci untuk menciptakan ketenangan hati dan keadilan.

4.1.1 Makna kejujuran

Kejujuran berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan tanpa manipulasi, kebohongan, atau kepura-puraan (*Artikel*, n.d.) Seseorang yang jujur tidak hanya menyampaikan kebenaran dengan kata-kata, tetapi juga menunjukkan sikap konsisten antara perkataan dan perbuatan. Kejujuran bukan sekadar sikap moral, melainkan karakter yang terbentuk dari kesadaran hati nurani. (*Jujur: Konsep, Pentingnya, Dan Dampaknya Dalam Kehidupan Sosial - Yayasan Zakat Sukses*, n.d.) Kejujuran dapat didefinisikan sebagai kesesuaian antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jujur berarti “tidak curang, tidak berdusta, dan tulus.” Kejujuran mencakup berbagai aspek, termasuk kejujuran dalam komunikasi, kejujuran dalam tindakan, dan kejujuran dalam pengambilan keputusan.

(*Kejujuran Sebagai Fondasi Integritas Dan Kebenaran*, n.d.) Kejujuran adalah pondasi yang kuat dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dengan menjadi jujur, kita menunjukkan bahwa kita dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Hal ini akan membuat orang lain merasa nyaman dan percaya kepada kita.

Selain itu, kejujuran juga mencerminkan integritas diri. Dengan menjadi jujur, kita memperlihatkan bahwa kita memiliki nilai-nilai yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan oleh godaan untuk berbohong atau menipu. Integritas diri sangat penting dalam membangun reputasi yang baik di mata orang lain.

Tidak hanya itu, kejujuran juga membantu kita untuk tetap berada dalam jalan yang benar. Dengan selalu membiasakan diri untuk jujur, kita akan terhindar dari godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak etis atau melanggar hukum. Kejujuran membentuk karakter kita dan membantu kita untuk tetap konsisten dalam prinsip-prinsip yang baik.

Oleh karena itu, mari kita terapkan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulailah dengan berbicara jujur kepada diri sendiri dan orang lain. Jangan takut untuk mengakui

kesalahan atau kekurangan kita, karena itulah bagian dari proses belajar dan memperbaiki diri. Selain itu, praktikkan kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Pikirkan dengan matang sebelum berbuat sesuatu, dan pastikan bahwa kita tidak akan merugikan orang lain dengan keputusan yang kita buat.

Dengan menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, kita akan merasakan damai dan tentram dalam hati. Kita akan merasa bangga dengan diri sendiri karena telah menjaga integritas dan reputasi yang baik. Dan yang terpenting, kita akan mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari orang lain.

Jadi, jadilah pribadi yang jujur dan teruslah menjaga nilai tersebut dalam segala aspek kehidupan. Kejujuran bukan hanya sebuah nilai moral, tetapi juga merupakan kunci keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup.

4.1.2 Makna Integritas

1. Pengertian Integritas Menurut Kamus dan Para Ahli

Secara umum, integritas berarti kejujuran, konsistensi, dan kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas adalah “mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran.”

Sementara itu, menurut Stephen L. Carter, seorang pakar etika dari Yale University dalam bukunya 'Integrity 1996', integritas adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai moral, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Artinya, orang yang berintegritas tidak hanya mematuhi aturan karena diawasi, tetapi karena ia meyakini bahwa kejujuran adalah prinsip hidup yang harus dijaga.

Dalam konteks profesional, integritas juga bermakna kesetiaan terhadap prinsip moral dan etika kerja. Seorang pegawai, pejabat publik, atau penyelenggara negara yang berintegritas tidak akan menyalahgunakan jabatan, menyelewengkan kewenangan, atau mengorbankan kepentingan masyarakat demi keuntungan pribadi.

2. Ciri-Ciri Orang yang Memiliki Integritas

Integritas bukan hanya soal kejujuran, tetapi juga mencakup tanggung jawab, konsistensi, dan komitmen terhadap nilai-nilai moral. Berikut beberapa ciri orang yang memiliki integritas tinggi:

- Jujur dalam tindakan dan ucapan dalam artian bahwa tidak berbohong, tidak menutupi kesalahan, dan tidak memanipulasi informasi
- Konsisten antara ucapan dan perbuatan adalah melakukan apa yang dikatakan, tidak mudah goyah oleh tekanan atau kepentingan pribadi
- Disiplin dan bertanggung jawab, dalam melaksanakan tugas tepat waktu dengan penuh tanggung jawab, meskipun tidak diawasi
- Menepati janji dan komitmen dalam artian bahwa tidak mengingkari kesepakatan atau janji yang telah dibuat.
- Berani mengakui kesalahan dan memperbaiki, tidak mencari kambing hitam atau menutupi kekeliruan
- Menjaga rahasia dan kepercayaan artinya dapat dipercaya dalam memegang tanggung jawab dan informasi penting
- Mengutamakan kepentingan publik, dalam konteks pejabat publik, keputusan diambil berdasarkan kepentingan masyarakat bukan kelompok atau pribadi.

3. Pentingnya Integritas dalam Pemerintahan dan Kehidupan Sosial

Integritas memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Pemerintah yang dijalankan oleh orang-orang berintegritas akan menumbuhkan rasa hormat, kredibilitas, dan legitimasi di mata masyarakat.

Dalam dunia birokrasi, integritas menjadi pondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tanpa integritas, segala bentuk regulasi dan pengawasan tidak akan berjalan efektif, karena akar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) justru muncul dari lemahnya integritas individu.

Selain di pemerintahan, integritas juga penting dalam kehidupan sosial. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai integritas akan lebih damai, saling percaya, dan memiliki budaya saling menghargai. Nilai ini menumbuhkan etika bermasyarakat yang sehat—dimana kejujuran dan tanggung jawab menjadi kebiasaan, bukan kewajiban.

Jadi Kejujuran sebagai fondasi integritas berarti lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang merupakan akar karakter utama yang membangun kepercayaan, konsistensi antara ucapan dan perbuatan, serta prinsip moral yang kokoh. Tanpa kejujuran, integritas tidak bisa berdiri, karena kejujuran adalah komitmen dasar untuk berbuat benar

4.2 Tanggung Jawab Dan Etos Pelayanan Publik

Dalam etika pemerintahan ada asumsi bahwa melalui penghayatan etika yang baik seseorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan moralitas pemerintahan. (*Artikel*, n.d.)

Hubungan etos kerja dengan pelayanan disini sebatas menguraikan dan menginterplasikan data melalui pencatatan, pengagendaan informasi dan pendokumentasian, tanpa mengukur atau menghitung pengaruh dan hubungan keduanya dengan menggunakan statistik. Etos kerja yang baik akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/publik yaitu pada saat melayani, bagaimana membantu, menyiapkan, mengurus dan juga menyelesaikan keperluan dan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang, khususnya di bidang pertanian, perikanan dan peternakan.

Dengan etos kerja yang baik yaitu sikap yang mendukung terhadap pekerjaan, perilaku yang sopan, tersenyum dan memberikan sapaan tertentu saat memberikan layanan juga mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diemban, akan berdampak pada persepsi masyarakat mengenai aparatur pemerintah dengan persepsi yang positif tidak lagi negatif memandang pegawai pemerintah dan masyarakat mendapatkan kepuasan dalam hal layanan, adanya timbal balik antara keduanya pemerintah/sektor publik dengan masyarakat/publik. Ada tiga faktor yang membangun etos kerja pegawai pemerintah untuk meningkatkan pelayanannya pada publik/masyarakat, yaitu sebagai berikut: pertama, cara pandang. Adalah bagaimana para aparatur pemerintah dalam memandang pekerjaan itu dapat mengerti dan bisa dipahami oleh mereka yang memilih karir di bidang pemerintahan, seyogyanya para aparatur pemerintah mempunyai cara pandang yang berbeda dalam menjalankan tugas dan perannya. Kedua, Penghargaan (Reward). Masalah ini memang penting untuk dijadikan motivasi bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dan perannya karena dengan diberikannya penghargaan kepada para karyawan berarti ada perhatian dari organisasi tersebut atas kerja keras yang selama ini mereka lakukan sehingga apa yang menjadi kebutuhan konsumen dalam sektor privat dan publik dalam sektor publik dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya guna mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan. Sistem pemberian penghargaan yang berlaku pada

pegawai pemerintahan saat ini adalah dengan memberikan kenaikan pangkat kepada aparat atas prestasi yang diperoleh.

Reward diartikan dengan ganjaran, upah dan memberi upah sedangkan pengertian pada penghargaan sendiri hampir sama dengan istilah insentif yakni tambahan penghasilan yang diberikan kepada karyawan tertentu. Namun, pada organisasi sektor publik sulit untuk melihat sejauh mana target yang dicapai dari para pegawai dalam melaksanakan tugas dan perannya, namun setidaknya bisa memberikan tambahan penghasilan baik berupa materi atau berupa sesuatu yang memberikan kepuasan batin dan kebanggaan tersendiri bagi pegawai. Contoh dalam mengukur sejauh mana seorang aparat pantas untuk menerima penghargaan dapat dilihat dengan mengetahui lama pengabdian/lama kerja, tingkat kedisiplinan kerja dari pegawai, tentunya dgn persyaratan-persyaratan yang sudah baik dan selain memberikan penghargaan yg sifatnya tinggi seperti kenaikan pangkat tadi karena hubungannya dengan kenaikan gaji, Pemerintah Daerah juga bisa memberikan penghargaan kepada para aparaturnya berupa lencana, piagam dan bintang jasa, bukan hanya karena prestasi yang diperolehnya akan tetapi karena yang bersangkutan pantas dijadikan sebagai teladan. Ketiga, Lingkungan Kerja. Lingkungan antar pegawai merupakan salah satu alternatif dalam membangun etos kerja pegawai, menurut salah satu sumber yang ada dalam memberikan masukan kepada Kepala sangat diharapkan, hendaknya para Staf mempunyai pemikiran yang kreatif dan tanggap tanpa harus menunggu instruksi dari atasan untuk menyelesaikan tugasnya, hal ini menunjukkan adanya keinginan dan kebutuhan dari para pegawai untuk dapat bergerak menjadi satu kesatuan dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pelayan khususnya layanan perizinan. Setelah melihat keadaan lapangan pada Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sanggau fasilitas kantor, baik yang khusus maupun umum masih cukup baik keadaannya dan layak pakai. Implikasi dari hasil uraian di atas menunjukkan bahwa untuk mengerti makna dari etos kerja guna membangun etika/etos kerja para pegawai pemerintah yaitu dengan memahami poin-poin yang ada. Pertama, etos kerja, mempunyai makna sikap, perilaku dan rasa tanggung jawab setiap pegawai terhadap pekerjaannya.

Etika kerja/etos kerja yang baik menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan pelayanan pegawai kepada publik, yang didalamnya terdapat sikap, perilaku dan rasa tanggung jawab seorang pegawai Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sanggau. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada publik/masyarakat selain faktor pendidikan dan ketrampilan dimiliki oleh para pegawai ada tiga factor penting yaitu: a) cara pandang; sebagai pelayanan bagi masyarakat dan abdi negara b) penghargaan: penghargaan akan dapat meningkatkan etos kerja pegawai, selain penghargaan berupa pemberian bintang jasa atau piagam penghargaan, lingkungan kerja.

4.3 Keadilan, Kepedulian, Dan Keberanian Moral

4.3.1 Keadilan

Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Dalam arti yang lebih luas Keadilan ialah konsep bahwa individu harus diberlakukan dengan cara yang setara tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Diskusi mengenai bentuk dan perwujudan keadilan telah dimulai sejak berkembangnya teori-teori filsafat manusia. Kajian diskusi tentang keadilan selalu berkaitan dengan pembagian sumber daya secara kualitatif-kuantitatif.

Sifat dari keadilan ialah tidak dapat dinyatakan seluruhnya dalam satu pernyataan, karena keadilan merupakan gagasan yang dinyatakan. Sudut pandang kebaikan terhadap keadilan dapat dalam tingkat pengertian individu hingga ke tingkat negara. Nilai keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang menjadi tujuan perwujudan hukum, sehingga keadilan selalu berkaitan dengan hukum.

Di dalam filsafat, (*Keadilan - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, n.d.) Keadilan merupakan salah satu persoalan mendasar. Keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang bersifat abstrak sehingga sulit untuk diukur. Pemahaman akan keadilan hanya dapat diperoleh dengan menjadikannya sebagai perwujudan hukum. Pemenuhan keadilan menjadi salah satu fungsi dan peranan hukum bagi masyarakat. Sarana pemenuhan keadilan di masyarakat umumnya melalui sistem peradilan pidana. Pengaturan keadilan yang bersifat umum maupun individu serta keselarasan keduanya merupakan peran dari hukum negara. Selain itu, penyebaran nilai keadilan kepada seluruh manusia juga merupakan salah satu misi dari agama.

Kajian mengenai keadilan telah dimulai sejak masa Yunani Kuno. Pada masa ini telah ada gagasan umum tentang keadilan secara kodrati dan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Pada masa Yunani Kuno, keadilan dikaitkan dengan hukum kodrat. Pencetus pemikiran ini ialah Aristoteles. Pada masa ini, pemikiran bahwa kehidupan manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam masih diterima. Segala pandangan mengenai kebenaran disesuaikan dengan hukum kodrat yang pelaksanaannya hanya dapat terpenuhi dengan adanya keadilan. Munculnya gagasan mengenai keadilan di Yunani Kuno berawal dari penurunan kualitas demokrasi di Athena setelah terjadinya Perang Peloponnesos. Pada masa ini terdapat dua tokoh yang mengkaji keadilan sebagai bagian dari filsafat hukum, yaitu Plato dan Aristoteles. Keduanya mengemukakan pengertian keadilan yang berkaitan dengan hukum.

Keadilan restoratif merupakan jenis keadilan yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran sosial di dalam masyarakat. Penegakan keadilan dilakukan terhadap pelaku pelanggaran maupun korban pelanggaran. Pelaku pelanggaran diberikan rehabilitasi, sementara korban diberikan penyembuhan. Penegakan keadilan bersifat terbuka dengan pengadaan penegakan hanya di komunitas yang menjamin penegakan keadilan dalam masyarakat. Jaminan dari masyarakat ialah mengenai penetapan tindakan pelanggaran sebagai suatu perbuatan yang sifatnya salah, tidak adil dan tidak patut dilakukan. Konsep keadilan restoratif memberikan pemusatan perhatian kepada pelibatan korban, pelaku pidana dan masyarakat dalam hubungan kemanusiaan. Melalui keadilan restoratif, masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap penyelesaian suatu tindak pidana. Penyelesaian ini bersifat memperbaiki serta menghasilkan rekonsiliasi yang memberikan kepuasan kepada seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan keadilan restoratif ini umumnya digunakan untuk penyelesaian hukum yang melibatkan anak dalam perkara diversi atau perkara yang tidak memerlukan mekanisme pidana. Keadilan restoratif berbeda dengan keadilan retributif yang mengutamakan keadilan dengan pembahasan, maupun keadilan restitutif yang mengutamakan keadilan dengan memberikan ganti rugi.

4.3.2 Kepedulian

Kepedulian merupakan salah satu bentuk tindakan nyata, yang dilakukan oleh masyarakat dalam merespon suatu permasalahan. Dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kepedulian juga merupakan partisipasi yakni keikutsertaan. Kepedulian sosial merupakan sebuah sikap keterhubungan dengan manusia pada umumnya, sebuah empati bagi setiap

anggota manusia untuk membantu orang lain atau sesama. Kata peduli memiliki makna yang beragam, oleh karena itu kepedulian itu menyangkut sebagai tugas, peran, dan hubungan. Kata peduli juga berhubungan dengan pribadi, emosi dan kebutuhan. Banyak yang merasakan semakin sedikit orang yang peduli pada sesama dan cenderung menjadi individualistis yang mementingkan diri sendiri. Berjiwa sosial dan senang membantu merupakan sebuah ajaran yang universal dan dianjurkan oleh semua agama. Menurut Wardhani kepedulian dapat disimpulkan bahwa bentukbentuk kepedulian masyarakat diantaranya yaitu sebagai berikut:

- i. Memberi bantuan berupa sandang, pangan dan kesehatan Bantuan berupasandang, pangan dan kesehatan yang diberikan kepada mereka menyangkut kebutuhan sehari-hari seperti memberi bantuan berupa pakaian, perlengkapan sholat , makanan kepada mereka yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan, perkembangan fisik, jiwa dan fikiran anak-anak panti asuhan. Sedangkan bantuan yang diberikan dalam bidang kesehatan seperti memberikan bantuan uang untuk berobat ketika anak panti asuhan sakit.
- ii. Memberikan perhatian dan kasih sayang Sebagaimana layaknya orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak kandungnya, umat islam juga perlu memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak dialam panti asuhan. Mereka yang telah kehilangan perhatian dan kasih sayang dari orang tua tentu sangat membutuhkan perhatian dari orang lain meski tidak sama nilainya. Perhatian dan kasih sayang ini sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan jiwa raga mereka. Hal ini agar membuat mereka tegar menerima kenyataan hidup dan bersemangat menggapai masa depan. Oleh sebab itu mereka perlu diperlakukan dengan baik dan lemah lembut.
- iii. Membiayai pendidikan Berbuat baik terhadap anak-anak yang hidup di panti asuhan dengan cara membiayai pendidikannya adalah tindakan yang sangat mulia, sehingga diharapkan mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, baik dan juga sholeh. Pendidikan dan pengajaran berperan penting sebagai dasar pengetahuan baik akhlak, etika dan juga moral bagi anak, hal tersebut memang sangat menjadi anjuran oleh Allah dan juga Rasullullah untuk memberikan yang terbaik bagi mereka.
- iv. Pembelajaran berbasis proyek integritas sosial memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari pembelajaran berbasis proyek pada umumnya. Karakteristik ini tidak hanya menekankan pada pencapaian hasil belajar secara kognitif, tetapi juga pada proses internalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tahapan pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran ini bersifat holistik karena mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara simultan. Berikut adapun beberapa karakteristik dari pembelajaran berbasis proyek integritas sosial

4.3.3 Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kemampuan untuk membela dan mempraktikkan apa yang dianggap sebagai perilaku etis dan moral ketika dihadapkan pada dilema, bahkan jika itu berarti melawan tekanan yang berlawanan untuk melakukan hal sebaliknya. Mereka yang memiliki keberanian moral bertekad untuk "melakukan hal yang benar" bahkan jika itu menempatkan mereka pada risiko pribadi kehilangan pekerjaan, pengucilan dari rekan

kerja, dan konsekuensi negatif lainnya. Seseorang harus membela apa yang benar bahkan jika itu berarti berdiri sendiri (Murray, 2010). Menurut mantan Senator dari Maine, Margaret Chase Smith: Jalan yang benar tidak selalu merupakan jalan yang populer dan mudah. Membela kebenaran ketika itu tidak populer adalah ujian sejati dari karakter moral.

Kita tidak boleh mencampuradukkan keberanian moral dengan kesombongan moral atau kepastian moral. Nilai-nilai individu, sosial, dan budaya mungkin berbeda, jadi penting untuk memiliki komunikasi yang terbuka dan saling menghormati (Murray, 2010). Meskipun nilai-nilai kejujuran, integritas, keadilan, kasih sayang, dan rasa hormat tampak universal, budaya yang berbeda mungkin memprioritaskannya secara berbeda.

Perawat membutuhkan keberanian moral untuk memastikan perawatan berkualitas dan keselamatan pasien, untuk berinteraksi dengan profesional perawatan kesehatan lainnya, dan untuk mengadvokasi perawatan universal yang konsisten dengan organisasi perawatan kesehatan dan komunitas (Pajakoski, 2021). Keberanian moral dibutuhkan untuk menghadapi praktik yang tidak etis, tidak aman, atau diskriminatif (Murray, 2010).

Untuk memperjelas unsur-unsur keberanian moral, Numminen dkk. (2016) menganalisis literatur dan sampai pada atribut-atribut berikut: kehadiran sejati, integritas moral, tanggung jawab, kejujuran, advokasi, komitmen dan ketekunan, serta risiko pribadi. Antesedennya adalah kepekaan etis, hati nurani, dan pengalaman. Konsekuensinya meliputi pengembangan pribadi dan profesional serta pemberdayaan

4.4 Keteladanan Sebagai Metode Pendidikan Nilai

Pendidikan karakter berisi tiga tahapan kegiatan, yaitu menanamkan pengetahuan tentang karakter, perasaan tentang karakter, dan tindakan yang mencerminkan karakter (Novita, 2015). Menilik tiga tahapan kegiatan tersebut, dapat diketahui bahwa sebetulnya pendidikan karakter sama dengan pendidikan jenis lainnya, yakni harus menyentuh tiga ranah kejiwaan manusia, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik (Park & Peterson, 2006). Dalam pendidikan karakter, keteladanan diperlukan dalam setiap lingkungan pendidikan, yakni lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga, keteladanan orang tua sangat diperlukan dalam pendidikan karakter. Keteladanan orang tua menentukan keberhasilan peserta didik dalam proses kepemilikan pengetahuan tentang karakter, perasaan tentang karakter, dan tindakan yang mencerminkan karakter. Orang tua yang tidak mengetahui sopan santun akan menularkan ketidaktahuannya itu kepada anaknya, sehingga akan menciptakan anak yang tidak mengetahui sopan santun pula. Orang tua yang tidak mempunyai perasaan akan pentingnya sopan santun cenderung akan bersikap acuh terhadap anaknya sehingga membiarkan anaknya melakukan perilaku tidak sopan, sehingga anaknya pun tidak memiliki perasaan akan pentingnya sopan santun. Orang tua yang tidak memiliki perilaku tidak sopan akan menampakkan ketidaksopanannya di hadapan anak, sehingga anak setiap saat melihat perilaku tidak sopan kedua orang tuanya, dan akhirnya anak akan meniru perilaku tidak sopan yang senantiasa dilakukan oleh kedua orang tuanya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa anak yang memiliki pengetahuan karakter, perasaan karakter, dan tindakan karakter yang rendah disebabkan oleh keteladanan orang tua yang rendah dalam ketiga aspek tersebut.

Inti dari keteladanan adalah peniruan, yakni proses meniru peserta didik terhadap pendidik; proses meniru yang dilakukan anak-anak terhadap orang dewasa; proses meniru yang dilakukan anak terhadap orang tuanya; proses meniru murid terhadap

gurunya; proses meniru yang dilakukan anggota masyarakat terhadap tokoh masyarakat. Bahwa dalam keteladanan terjadi proses meniru (Suhono & Utama, 2017). Adanya proses peniruan dalam metode keteladanan menjadikan keteladanan merupakan metode yang berfungsi konservatif, yakni fungsi melestarikan. Orang tua yang memberikan keteladanan berupa perilaku terpuji kepada anaknya, maka perilaku terpuji tersebut akan tetap ada dan hidup bersama anak itu dengan bentuk yang sama persis. Begitu pula jika seseorang memberi keteladanan berupa perilaku terpuji kepada cucunya, maka perilaku terpuji tersebut akan lestari dan hidup bersama cucunya tersebut dengan bentuk yang sama persis. Maksud sama persis di sini adalah jika perilaku terpuji tersebut berupa sikap menghormati orang lain, maka sikap itulah yang akan tetap lestari bersama orang yang meniru. Begitulah keteladanan menjadikan segala sesuatu, baik ucapan maupun perbuatan, terjaga kelestariannya. Proses peniruan dalam metode keteladanan dapat terjadi secara disadari maupun tidak disadari. Dalam keteladanan terjadi proses meniru, baik secara sadar maupun tidak sadar. Peniruan yang tidak disadari adalah peniruan yang terjadi di mana orang yang meniru merasa tidak sadar bahwa ia sesungguhnya sedang meniru sebuah objek yang senantiasa ia kagumi, ia perhatikan, ia lihat, dan ia dengar (Suhono & Utama, 2017). Peniruan yang tidak disadari terjadi jika yang ditiru tidak mengharuskan kepada peniru untuk meniru apa yang diucapkan atau dilakukannya.

Berdasarkan pembahasan di muka, dapat diperoleh kesimpulan bahwa keteladanan dapat dijadikan sebagai metode yang utama dalam pendidikan karakter, yang dalam penerapannya memerlukan metode pendidikan yang lain. Selain itu, keteladanan sebagai metode pendidikan karakter harus ditunjukkan oleh pendidik di setiap lingkungan pendidikan, yakni keluarga, sekolah, masyarakat, teman sebaya, dan media massa.

Bab 5 Desain Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi

5.1 Prinsip Pengembangan Kurikulum Berbasis Nilai

5.1.1 Orientasi pada Pembentukan Karakter

1. Prinsip Pengembangan Kurikulum Berbasis Nilai

Pengembangan kurikulum pendidikan anti korupsi harus berangkat dari kesadaran bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter moral peserta didik. Dalam konteks ini, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan integritas menjadi fondasi utama yang harus diinternalisasikan melalui proses pendidikan. Kurikulum berbasis nilai menempatkan pendidikan sebagai ruang pembentukan manusia yang bermoral dan beretika, bukan sekadar individu yang cerdas secara intelektual. Prinsip pertama dalam pengembangan kurikulum berbasis nilai adalah orientasi pada pembentukan karakter. Pendidikan anti korupsi tidak hanya mengajarkan apa itu korupsi dan dampaknya, tetapi juga menanamkan kesadaran moral bahwa tindakan korupsi bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu membangun komitmen pribadi untuk menolak segala bentuk korupsi dalam kehidupan mereka. Prinsip kedua adalah integrasi nilai dalam seluruh proses pembelajaran. Nilai-nilai anti korupsi tidak seharusnya diajarkan sebagai mata pelajaran yang terpisah, tetapi diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran dan aktivitas pendidikan. Melalui integrasi ini, peserta didik dapat melihat bahwa nilai integritas relevan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Prinsip ketiga adalah kontekstualisasi nilai dalam kehidupan nyata.

Pendidikan anti korupsi akan lebih efektif apabila dikaitkan dengan pengalaman hidup sehari-hari peserta didik. Melalui pendekatan kontekstual, peserta didik diajak untuk memahami bagaimana praktik korupsi dapat terjadi dalam berbagai situasi, serta bagaimana mereka dapat mengambil sikap yang berintegritas dalam menghadapi dilema moral. Prinsip keempat adalah partisipasi aktif peserta didik. Kurikulum berbasis nilai harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk berdiskusi, berefleksi, dan mengambil keputusan moral secara mandiri. Metode pembelajaran seperti diskusi kasus, simulasi,

proyek sosial, dan refleksi etis dapat membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran moral.

2. Model Integrasi dalam Mata Pelajaran

Salah satu strategi penting dalam pendidikan anti korupsi adalah mengintegrasikan nilai-nilai integritas ke dalam berbagai mata pelajaran yang sudah ada. Model integrasi ini memungkinkan pendidikan anti korupsi menjadi bagian alami dari proses pembelajaran, tanpa harus menambah beban kurikulum secara signifikan. Model pertama adalah integrasi tematik, di mana nilai-nilai anti korupsi dimasukkan ke dalam tema pembelajaran tertentu. Misalnya, dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, peserta didik dapat mempelajari konsep keadilan sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara yang berintegritas. Pembelajaran ini dapat diperkaya dengan diskusi mengenai dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Model kedua adalah integrasi konseptual, yaitu memasukkan konsep anti korupsi ke dalam materi pelajaran secara langsung. Dalam mata pelajaran ekonomi, misalnya, peserta didik dapat mempelajari bagaimana korupsi dapat merusak sistem ekonomi dan menghambat pembangunan. Sementara itu, dalam pelajaran sejarah, siswa dapat mempelajari berbagai peristiwa sejarah yang berkaitan dengan praktik korupsi dan upaya pemberantasannya. Model ketiga adalah integrasi metodologis, yang menekankan pada metode pembelajaran yang mendorong nilai integritas.

Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang menumbuhkan sikap jujur, tanggung jawab, dan kerja sama, seperti pembelajaran berbasis proyek, debat etis, atau studi kasus mengenai dilema moral dalam kehidupan sosial. Model keempat adalah integrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan proyek sosial. Kegiatan seperti kampanye integritas, simulasi sidang anti korupsi, atau proyek pelayanan masyarakat dapat menjadi sarana yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi secara praktis. Melalui pengalaman langsung ini, peserta didik tidak hanya memahami konsep integritas, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan nyata.

3. Kurikulum Tersembunyi (Hidden Curriculum) dan Budaya Sekolah

Selain kurikulum formal, pendidikan anti korupsi juga dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai kurikulum tersembunyi (hidden curriculum). Kurikulum tersembunyi merujuk pada nilai-nilai, norma, dan praktik yang secara tidak langsung diajarkan melalui budaya sekolah, interaksi sosial, dan perilaku para pendidik. Budaya sekolah yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Misalnya, praktik transparansi dalam pengelolaan kegiatan sekolah, keadilan dalam penilaian akademik, serta keteladanan guru dalam bersikap jujur dapat menjadi contoh nyata bagi siswa tentang bagaimana nilai integritas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebaliknya, apabila lingkungan sekolah justru memperlihatkan praktik-praktik yang tidak transparan atau tidak adil, maka pesan moral yang diajarkan dalam kelas dapat kehilangan maknanya. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan anti korupsi tidak hanya bergantung pada materi pembelajaran, tetapi juga pada konsistensi nilai yang tercermin dalam budaya sekolah. Peran guru sebagai teladan moral juga menjadi faktor penting dalam kurikulum tersembunyi.

Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur yang memberikan contoh nyata tentang bagaimana nilai integritas dijalankan. Sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh guru dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembentukan karakter peserta didik. Dengan demikian, pengembangan kurikulum pendidikan anti korupsi harus mempertimbangkan dimensi budaya sekolah secara menyeluruh. Sekolah perlu membangun ekosistem pendidikan yang mendukung nilai integritas, di mana seluruh warga sekolah guru, siswa, dan tenaga kependidikan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi.

4. Evaluasi Kurikulum Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas kurikulum pendidikan anti korupsi. Evaluasi tidak Pengembangan kurikulum pendidikan anti korupsi berangkat dari tujuan utama pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berkarakter. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai alat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan moral dan integritas peserta didik. Nilai-nilai seperti kejujuran,

tanggung jawab, disiplin, dan keadilan menjadi fondasi utama yang harus tertanam dalam proses pendidikan.

Evaluasi kurikulum pendidikan karakter anti korupsi tidak cukup hanya melihat nilai ujian atau hasil tes tertulis. Lebih dari itu, evaluasi harus menyentuh perubahan sikap, kebiasaan, dan cara berpikir peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Karena inti dari pendidikan anti korupsi adalah membentuk karakter, maka indikator keberhasilannya juga harus bersifat manusiawi dan kontekstual.

- a. Pertama, evaluasi dapat dilakukan melalui pengamatan perilaku siswa di lingkungan sekolah. Guru dapat melihat apakah siswa menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam hal-hal kecil seperti tidak mencontek, mengembalikan barang yang bukan miliknya, atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal-hal sederhana ini justru menjadi cerminan keberhasilan pendidikan karakter.
- b. refleksi diri siswa menjadi bagian penting dalam evaluasi. Siswa perlu diberi ruang untuk menilai dirinya sendiri: apakah mereka sudah bersikap jujur, apakah pernah tergoda untuk berbuat curang, dan bagaimana mereka mengatasinya. Proses refleksi ini membantu siswa mengenal dirinya secara lebih mendalam
- c. Ketiga, evaluasi juga dapat dilakukan melalui diskusi terbuka di kelas. Dalam suasana yang aman dan tidak menghakimi, siswa dapat berbagi pengalaman, pendapat, dan dilema moral yang mereka hadapi. Dari sini, guru dapat menilai sejauh mana pemahaman siswa tentang nilai-nilai anti korupsi.
- d. Keempat, penggunaan studi kasus menjadi alat evaluasi yang efektif. Siswa diberikan situasi nyata atau simulasi yang mengandung unsur korupsi, lalu diminta untuk menganalisis dan mengambil keputusan.
- e. Cara ini membantu mengukur kemampuan berpikir kritis sekaligus integritas moral mereka.
- f. evaluasi harus melibatkan proyek nyata. Misalnya, siswa diminta membuat kampanye kecil tentang kejujuran atau transparansi di sekolah. Dari proyek ini, guru dapat melihat keterlibatan, kreativitas, dan komitmen siswa terhadap nilai yang dipelajari.

5.1.2 Integrasi Nilai dalam Proses Pembelajaran

Integrasi nilai dalam proses pembelajaran bukan sekadar menambahkan materi tentang moral atau etika di dalam kelas, melainkan menghadirkan nilai-nilai itu hidup dalam setiap interaksi belajar. Nilai tidak diajarkan sebagai teori, tetapi dialami sebagai bagian dari keseharian peserta didik. Di sinilah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyentuh sisi kemanusiaan. Ketika guru memulai pelajaran dengan sikap ramah, menghargai setiap siswa, dan mendengarkan dengan tulus, sebenarnya ia sedang mengintegrasikan nilai penghargaan dan empati.

Hal-hal kecil seperti ini sering kali lebih kuat pengaruhnya dibandingkan ceramah panjang tentang kebaikan. Siswa belajar dari apa yang mereka rasakan, bukan hanya dari apa yang mereka dengar. Integrasi nilai juga terlihat dalam cara guru merancang kegiatan belajar. Misalnya, tugas kelompok tidak hanya bertujuan menyelesaikan soal, tetapi juga melatih kerja sama, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam proses ini, siswa belajar bahwa keberhasilan bukan hanya hasil akhir, tetapi juga bagaimana mereka mencapainya. Dalam pembelajaran, penting untuk memberi ruang bagi siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Ketika pendapat mereka dihargai, mereka belajar tentang nilai demokrasi dan keberanian.

Mereka merasa bahwa suara mereka penting, dan ini membangun kepercayaan diri sekaligus rasa tanggung jawab. Proses integrasi nilai juga terjadi ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Misalnya, saat membahas ekonomi, siswa diajak memahami dampak korupsi terhadap masyarakat. Dari sini, mereka tidak hanya memahami konsep, tetapi juga merasakan pentingnya integritas dalam kehidupan sosial. Ketika terjadi konflik kecil di kelas, seperti perselisihan antar siswa, itu menjadi kesempatan berharga untuk menanamkan nilai. Guru dapat membimbing siswa untuk berdialog, saling memahami, dan mencari solusi bersama. Proses ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Integrasi nilai juga berarti memberi contoh nyata.

Guru yang datang tepat waktu, jujur dalam penilaian, dan konsisten dalam aturan, sedang menunjukkan nilai disiplin dan keadilan. Tanpa disadari, siswa menyerap nilai tersebut melalui keteladanan. Tidak semua siswa langsung memahami atau menerima nilai yang diajarkan. Di sinilah pentingnya kesabaran. Integrasi nilai adalah proses panjang yang membutuhkan pendekatan yang lembut dan penuh pengertian.

Setiap siswa memiliki perjalanan yang berbeda dalam memahami nilai. Pembelajaran yang humanis menempatkan siswa sebagai manusia utuh, bukan sekadar objek belajar. Guru berusaha memahami latar belakang, perasaan, dan kebutuhan siswa. Dari pemahaman ini, nilai-nilai dapat disampaikan dengan cara yang lebih relevan dan menyentuh. Integrasi nilai juga dapat dilakukan melalui cerita atau kisah inspiratif.

Cerita memiliki kekuatan untuk menyentuh hati dan membangkitkan empati. Dari cerita, siswa dapat belajar tanpa merasa digurui. Dalam proses pembelajaran, penting untuk memberi kesempatan siswa melakukan refleksi. Mereka diajak untuk bertanya pada diri sendiri: apa yang telah mereka pelajari, bagaimana perasaan mereka, dan nilai apa yang mereka temukan. Refleksi ini memperdalam pemahaman mereka.

Nilai-nilai juga dapat diintegrasikan melalui penilaian. Tidak hanya hasil akhir yang dinilai, tetapi juga prosesnya. Misalnya, kejujuran dalam mengerjakan tugas dan kerja sama dalam kelompok menjadi bagian dari penilaian. Lingkungan kelas yang aman dan nyaman menjadi kunci dalam integrasi nilai. Ketika siswa merasa diterima dan tidak takut salah, mereka lebih terbuka untuk belajar dan berkembang. Rasa aman ini memungkinkan nilai-nilai tumbuh secara alami. Integrasi nilai tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh budaya sekolah. Jika seluruh lingkungan sekolah menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab, maka siswa akan lebih mudah menginternalisasikannya. Peran teman sebaya juga sangat penting. Siswa belajar banyak dari interaksi dengan teman. Ketika mereka saling menghargai dan mendukung, nilai-nilai positif semakin kuat tertanam. Dalam pembelajaran, penting untuk menghindari pendekatan yang terlalu menghakimi.

Ketika siswa melakukan kesalahan, itu harus dilihat sebagai bagian dari proses belajar. Dari kesalahan, mereka dapat memahami nilai dengan lebih mendalam. Integrasi nilai juga berarti memberi ruang bagi siswa untuk mengambil keputusan. Ketika mereka dihadapkan pada pilihan, mereka belajar mempertimbangkan nilai-nilai dalam setiap tindakan. Ini melatih mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

Guru perlu terus merefleksikan praktik pembelajarannya. Apakah nilai-nilai sudah benar-benar terintegrasi, atau hanya menjadi slogan? Refleksi ini membantu guru untuk terus berkembang. Proses integrasi nilai tidak selalu terlihat hasilnya secara langsung. Namun, perlahan nilai-nilai itu akan membentuk karakter siswa.

Perubahan kecil yang konsisten akan membawa dampak besar di masa depan. Pada akhirnya, integrasi nilai dalam proses pembelajaran adalah tentang membangun manusia. Bukan hanya mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki hati yang jujur, empati yang dalam, dan keberanian untuk melakukan yang benar dalam kehidupan nyata.

5.1.3 Kontekstualisasi Nilai dalam Kehidupan Nyata

Kurikulum berbasis nilai perlu dikaitkan dengan realitas sosial yang dihadapi peserta didik. Pembelajaran yang kontekstual memungkinkan siswa memahami dampak nyata dari praktik korupsi terhadap masyarakat serta pentingnya sikap jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kontekstualisasi nilai dalam kehidupan nyata merupakan jembatan antara apa yang dipelajari di ruang kelas dengan apa yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tidak lagi berhenti sebagai konsep, tetapi hadir sebagai pedoman dalam bertindak. Di titik ini, pembelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna.

Sering kali siswa memahami nilai secara teori, namun kesulitan menerapkannya dalam situasi nyata. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan pengalaman belajar yang dekat dengan kehidupan mereka. Ketika nilai dihubungkan dengan realitas, siswa lebih mudah memahami relevansinya. Misalnya, nilai kejujuran tidak hanya diajarkan sebagai prinsip, tetapi ditunjukkan dalam situasi sederhana seperti mengakui kesalahan atau tidak mencontek saat ujian. Dalam konteks ini, siswa belajar bahwa kejujuran bukan sekadar kata, melainkan tindakan nyata yang membutuhkan keberanian. Kontekstualisasi nilai juga dapat dilakukan dengan mengangkat peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar.

Ketika siswa diajak membahas kasus nyata, mereka belajar melihat dampak dari tindakan manusia terhadap orang lain. Ini menumbuhkan kesadaran sosial yang lebih dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa sering dihadapkan pada dilema moral. Melalui pembelajaran yang kontekstual, mereka dilatih untuk mempertimbangkan nilai sebelum mengambil keputusan. Proses ini membantu mereka menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Guru memiliki peran penting dalam mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Ketika guru mampu menghadirkan contoh yang relevan, siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari tidak sia-sia.

Mereka melihat bahwa nilai memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. Kontekstualisasi nilai juga dapat dilakukan melalui kegiatan di luar kelas, seperti kerja bakti, kegiatan sosial, atau proyek layanan masyarakat. Dalam kegiatan ini, siswa belajar langsung tentang kepedulian, tanggung jawab, dan kerja sama. Pengalaman nyata sering kali lebih membekas dibandingkan penjelasan teoritis.

Ketika siswa terlibat langsung dalam suatu kegiatan, mereka tidak hanya memahami nilai, tetapi juga merasakannya. Dari pengalaman inilah nilai mulai tertanam dalam diri mereka. Lingkungan keluarga juga menjadi bagian penting dalam kontekstualisasi nilai. Apa yang diajarkan di sekolah perlu didukung oleh praktik di rumah. Ketika siswa melihat konsistensi antara sekolah dan keluarga, nilai menjadi lebih kuat. Dalam proses ini, penting untuk memberi ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman pribadi. Setiap siswa memiliki cerita yang berbeda, dan dari cerita tersebut, pembelajaran menjadi lebih kaya dan bermakna.

Kontekstualisasi nilai juga membantu siswa memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Mereka belajar bahwa setiap pilihan memiliki dampak, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kesadaran ini membentuk rasa tanggung jawab. Tidak semua pengalaman hidup menyenangkan. Kadang siswa menghadapi situasi sulit yang menguji nilai yang mereka pegang. Dalam kondisi ini, pembelajaran yang kontekstual membantu mereka tetap teguh pada prinsip yang benar. Guru perlu bersikap terbuka dan tidak menghakimi ketika siswa berbagi pengalaman. Sikap ini menciptakan ruang aman bagi siswa untuk belajar dari kesalahan tanpa rasa takut. Kontekstualisasi nilai juga berarti mengakui bahwa setiap siswa hidup dalam konteks yang berbeda.

Latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi memengaruhi cara mereka memahami nilai. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus fleksibel dan inklusif. Dalam kehidupan nyata, nilai sering kali diuji oleh tekanan lingkungan. Teman sebaya, media sosial, dan budaya populer dapat memengaruhi pilihan siswa. Di sinilah pentingnya membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran yang kontekstual mengajak siswa untuk tidak hanya mengikuti arus, tetapi juga berani mengambil sikap. Mereka belajar bahwa menjadi benar tidak selalu mudah, tetapi selalu penting.

5.1.4 Partisipasi Aktif Peserta Didik Dalam kehidupan nyata

Proses pembelajaran iniba harus memberi ruang bagi siswa untuk terlibat secara aktif melalui diskusi, refleksi moral, studi kasus, maupun proyek sosial. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami konsep anti korupsi, tetapi juga mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen untuk menolak praktik korupsi. Partisipasi aktif peserta didik dalam kehidupan nyata bukan sekadar keikut sertaan dalam kegiatan, melainkan keterlibatan yang lahir dari kesadaran diri.

Ketika peserta didik mulai memahami bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat, muncul dorongan alami untuk berkontribusi. Di sinilah pendidikan menemukan maknanya yang paling mendalam. Setiap peserta didik membawa potensi unik yang dapat memberi warna pada lingkungan sekitarnya. Namun, potensi itu sering kali tersembunyi jika tidak diberi ruang untuk berkembang.

Partisipasi aktif menjadi jembatan antara kemampuan yang dimiliki dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, partisipasi bisa dimulai dari hal sederhana, seperti membantu sesama, menjaga kebersihan lingkungan, atau berani menyampaikan pendapat. Tindakan kecil ini perlahan membentuk karakter yang peduli dan bertanggung jawab. Dari sinilah tumbuh rasa memiliki terhadap lingkungan. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu menghubungkan teori dengan praktik. Peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga merasakannya dalam kehidupan nyata.

Ketika mereka terlibat langsung, pembelajaran menjadi lebih hidup dan membekas. Sering kali peserta didik merasa bahwa suara mereka tidak penting. Padahal, setiap ide dan perspektif yang mereka miliki dapat menjadi solusi bagi permasalahan di sekitar. Memberikan ruang bagi

mereka untuk berpartisipasi berarti menghargai keberadaan mereka sebagai individu. Partisipasi aktif juga melatih keberanian. Tidak mudah bagi peserta didik untuk keluar dari zona nyaman dan terlibat dalam kegiatan sosial. Namun, melalui proses ini, mereka belajar menghadapi tantangan dan mengembangkan kepercayaan diri.

Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam menumbuhkan partisipasi ini. Ketika sekolah menciptakan budaya yang inklusif dan suportif, peserta didik akan merasa aman untuk berkontribusi. Rasa aman ini menjadi fondasi bagi keterlibatan yang lebih luas. Dalam kehidupan nyata, peserta didik dihadapkan pada berbagai perbedaan. Partisipasi aktif mengajarkan mereka untuk menghargai keberagaman. Mereka belajar bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan cara pandang yang berbeda, namun tetap dapat bekerja sama. Kegiatan sosial seperti bakti lingkungan atau kerja kelompok menjadi sarana efektif untuk melatih partisipasi.

Melalui kegiatan ini, peserta didik belajar bekerja sama dan memahami pentingnya kontribusi setiap individu. Mereka menyadari bahwa perubahan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui usaha bersama. Partisipasi aktif juga membentuk empati. Ketika peserta didik terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat, mereka dapat merasakan kondisi orang lain. Empati ini menjadi dasar bagi sikap peduli dan keinginan untuk membantu. Di era modern, partisipasi tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media digital.

Peserta didik dapat menyuarakan pendapat, berbagi informasi, dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Namun, hal ini juga membutuhkan tanggung jawab yang besar. Tidak semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki

akses yang setara. Partisipasi yang inklusif akan menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis. Kegagalan dalam berpartisipasi sering kali menjadi pengalaman yang berharga. Dari kegagalan, peserta didik belajar untuk bangkit dan mencoba kembali. Proses ini membentuk ketahanan mental yang kuat. Partisipasi aktif bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang belajar. Dalam setiap keterlibatan, peserta didik memperoleh pengalaman baru yang tidak dapat ditemukan di dalam buku.

Pengalaman ini menjadi bekal penting dalam kehidupan mereka. Peran guru sangat penting dalam membimbing peserta didik untuk berpartisipasi. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang membuka peluang bagi siswa untuk berkembang. Dukungan guru dapat menjadi motivasi yang kuat. Keluarga juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap partisipatif.

Nilai-nilai yang ditanamkan di rumah akan terbawa dalam kehidupan sosial peserta didik. Ketika keluarga mendorong keterlibatan, anak akan lebih percaya diri untuk berkontribusi. Partisipasi aktif membantu peserta didik memahami makna tanggung jawab. Mereka belajar bahwa setiap tindakan memiliki dampak, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kesadaran ini menjadi dasar bagi perilaku yang bijaksana. Dalam jangka panjang, partisipasi aktif membentuk generasi yang peduli dan berdaya. Peserta didik tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku perubahan.

Mereka memiliki keberanian untuk mengambil peran dalam masyarakat. Setiap langkah kecil dalam partisipasi memiliki arti yang besar. Meskipun terlihat sederhana, kontribusi yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan nyata. Hal ini mengajarkan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Pada akhirnya, partisipasi aktif adalah tentang menjadi manusia yang utuh. Peserta didik belajar untuk mengenal diri, memahami orang lain, dan berkontribusi bagi lingkungan. Inilah esensi

pendidikan yang sesungguhnya membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli dan berempati

5.2 Model Integrasi Dalam Mata Pelajaran

Model integrasi dalam mata pelajaran lahir dari kesadaran bahwa pengetahuan tidak pernah berdiri sendiri. Kehidupan nyata tidak terbagi dalam kotak-kotak disiplin ilmu, melainkan hadir sebagai kesatuan yang saling terhubung. Oleh karena itu, pembelajaran yang terintegrasi membantu peserta didik melihat dunia secara lebih utuh. Sering kali peserta didik merasa bahwa apa yang mereka pelajari di kelas tidak relevan dengan kehidupan mereka. Model integrasi berusaha menjembatani kesenjangan ini dengan menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kontekstual.

Ketika pelajaran terasa dekat dengan realitas, makna belajar menjadi lebih dalam. Dalam pendekatan integratif, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga merangkai keterkaitan antar konsep. Proses ini membutuhkan kepekaan dan kreativitas, karena setiap mata pelajaran memiliki cara pandangnya masing-masing. Namun justru di sanalah keindahan pembelajaran muncul. Peserta didik diajak untuk memahami bahwa satu permasalahan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya, isu lingkungan tidak hanya berkaitan dengan sains, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, mereka belajar berpikir lebih luas dan tidak terbatas. Model integrasi juga mendorong peserta didik untuk aktif bertanya. Ketika mereka melihat hubungan antar materi, rasa ingin tahu akan tumbuh secara alami. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi tanda bahwa proses belajar sedang berlangsung secara hidup. Tidak semua proses integrasi berjalan mulus.

Ada kalanya peserta didik merasa bingung karena harus menghubungkan berbagai konsep sekaligus. Namun, kebingungan ini sebenarnya adalah bagian penting dari proses berpikir kritis. Guru memiliki peran sebagai jembatan yang

menghubungkan berbagai pengetahuan tersebut. Dengan pendekatan yang tepat, guru dapat membantu peserta didik menemukan benang merah dari setiap pembelajaran. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi sangat bermakna.

Model integrasi juga menumbuhkan kerja sama antar peserta didik. Dalam proses belajar, mereka sering diminta untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah bersama. Interaksi ini membangun kemampuan sosial yang sangat penting dalam kehidupan nyata. Melalui integrasi, pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan tidak kaku. Peserta didik tidak hanya mengikuti alur yang sudah ditentukan, tetapi juga memiliki ruang untuk mengeksplorasi. Kebebasan ini membuat mereka lebih terlibat secara emosional. Pendekatan ini juga menghargai keberagaman gaya belajar. Setiap peserta didik memiliki cara berbeda dalam memahami sesuatu. Dengan integrasi, berbagai pendekatan dapat digunakan sehingga semua peserta didik merasa terakomodasi.

5.2.1 Integrasi Tematik

Model integrasi tematik dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai anti korupsi dalam tema pembelajaran tertentu. Misalnya dalam pendidikan kewarganegaraan, siswa dapat mempelajari konsep keadilan sosial, tanggung jawab warga negara, serta pentingnya integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Integrasi konseptual mengajak kita untuk melihat bahwa pengetahuan bukan sekadar kumpulan fakta yang terpisah, melainkan sebuah jaringan makna yang saling terhubung. Dalam proses ini, peserta didik belajar memahami bahwa setiap konsep memiliki hubungan dengan konsep lainnya, seperti potongan puzzle yang membentuk gambaran besar kehidupan.

Sering kali peserta didik merasa kesulitan memahami materi karena disajikan secara terpisah. Integrasi konseptual hadir sebagai pendekatan yang menyatukan berbagai ide menjadi satu kesatuan yang lebih utuh. Dengan cara ini, belajar menjadi lebih masuk akal dan tidak terasa terfragmentasi. Dalam kehidupan nyata, seseorang tidak pernah menggunakan satu konsep saja untuk menyelesaikan masalah. Integrasi konseptual membantu peserta didik

menghubungkan berbagai pengetahuan sehingga mereka dapat berpikir secara lebih fleksibel dan adaptif.

Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada apa yang dipelajari, tetapi juga bagaimana peserta didik memahami hubungan antar konsep. Proses ini menuntut kedalaman berpikir, bukan sekadar hafalan. Dari sinilah lahir pemahaman yang lebih bermakna. Peserta didik diajak untuk menemukan keterkaitan sendiri, bukan hanya menerima penjelasan dari guru. Ketika mereka berhasil menemukan hubungan tersebut, muncul rasa puas yang memperkuat motivasi belajar. Proses ini membuat mereka merasa lebih terlibat. Integrasi konseptual juga melatih kesabaran dalam berpikir. Tidak semua hubungan antar konsep dapat dipahami dengan cepat. Ada proses pencarian, kebingungan, bahkan keraguan, yang semuanya merupakan bagian dari perjalanan belajar. Guru memiliki peran penting sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan keterkaitan tersebut.

Bukan dengan memberikan semua jawaban, tetapi dengan mengarahkan pertanyaan yang menggugah pemikiran. Di sinilah peran guru menjadi sangat bermakna. Ketika konsep-konsep mulai terhubung, peserta didik akan melihat bahwa pengetahuan menjadi lebih hidup. Mereka tidak lagi memandang pelajaran sebagai sesuatu yang kaku, tetapi sebagai sesuatu yang dinamis dan relevan dengan kehidupan. Integrasi konseptual juga membantu mengurangi beban belajar yang terasa berat. Ketika peserta didik memahami hubungan antar materi, mereka tidak perlu menghafal terlalu banyak hal secara terpisah. Pemahaman menjadi lebih efisien dan mendalam. Dalam proses ini, kesalahan sering kali menjadi guru terbaik.

Ketika peserta didik salah dalam menghubungkan konsep, mereka belajar untuk memperbaiki cara berpikirnya. Kesalahan bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti, melainkan peluang untuk berkembang. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi diskusi yang lebih bermakna. Peserta didik dapat saling berbagi pemahaman dan perspektif mereka. Dari perbedaan inilah muncul pemahaman yang lebih kaya. Integrasi konseptual mengajarkan bahwa setiap pengetahuan memiliki konteks. Tidak ada konsep yang benar-benar berdiri sendiri. Pemahaman ini membantu peserta didik melihat dunia dengan cara yang

lebih realistis. Dalam praktiknya, integrasi konseptual dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti studi kasus atau pembelajaran berbasis proyek. Metode ini memungkinkan peserta didik mengaplikasikan berbagai konsep secara bersamaan. Peserta didik yang terbiasa dengan integrasi konseptual cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. Mereka tidak mudah menerima informasi secara mentah, tetapi berusaha memahami hubungan di baliknya. Pendekatan ini juga menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih besar. Ketika satu konsep terhubung dengan konsep lain, muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang mendorong eksplorasi lebih lanjut.

Rasa ingin tahu ini menjadi motor utama dalam belajar. Lingkungan belajar yang mendukung sangat penting dalam proses ini. Peserta didik perlu merasa aman untuk bertanya, mencoba, dan bahkan melakukan kesalahan. Rasa aman ini memungkinkan mereka untuk berpikir secara bebas. Integrasi konseptual tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga emosional. Ketika peserta didik merasa memahami sesuatu secara utuh, muncul rasa percaya diri yang lebih kuat. Mereka merasa mampu menghadapi tantangan belajar. Dalam jangka panjang, pendekatan ini membentuk pola pikir yang terstruktur dan terhubung. Peserta didik tidak hanya mengingat informasi, tetapi mampu menggunakannya secara efektif dalam berbagai situasi. Integrasi konseptual juga membantu peserta didik memahami bahwa belajar adalah proses yang berkelanjutan.

Setiap pengetahuan baru akan selalu terhubung dengan pengetahuan sebelumnya. Dengan demikian, belajar menjadi perjalanan yang tidak pernah berhenti. Pada akhirnya, integrasi konseptual adalah tentang menemukan makna dalam pembelajaran. Peserta didik tidak hanya mengetahui sesuatu, tetapi benar-benar memahaminya. Dari sinilah lahir pembelajaran yang lebih manusiawi, yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga menghidupkan cara berpikir dan cara memandang dunia.

5.2.2 Integrasi Konseptual

Integrasi konseptual dilakukan dengan mengaitkan konsep anti korupsi dengan materi pelajaran. Dalam pelajaran ekonomi, misalnya, siswa dapat

mempelajari dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi kontekstual mengajak peserta didik untuk melihat bahwa pembelajaran tidak terlepas dari kehidupan nyata. Setiap konsep yang dipelajari menemukan maknanya ketika dihubungkan dengan pengalaman sehari-hari. Di sinilah belajar menjadi sesuatu yang terasa dekat dan relevan. Sering kali peserta didik bertanya, “Untuk apa saya mempelajari ini?” Pertanyaan sederhana ini sebenarnya mencerminkan kebutuhan akan makna. Integrasi kontekstual hadir untuk menjawabnya dengan menghadirkan situasi nyata ke dalam pembelajaran. Dalam pendekatan ini, dunia luar kelas menjadi bagian penting dari proses belajar. Lingkungan sekitar, budaya lokal, dan pengalaman pribadi menjadi sumber belajar yang kaya.

Peserta didik tidak lagi belajar dalam ruang yang terbatas. Ketika pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata, peserta didik lebih mudah memahami konsep. Mereka tidak hanya menghafal, tetapi juga merasakan manfaat dari apa yang dipelajari. Pemahaman ini cenderung lebih bertahan lama. Integrasi kontekstual juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk menjadi subjek dalam pembelajaran. Pengalaman mereka dihargai sebagai bagian dari proses belajar. Hal ini membuat mereka merasa lebih dihargai sebagai individu. Setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda. Integrasi kontekstual memungkinkan perbedaan ini menjadi kekuatan, bukan hambatan. Beragam pengalaman justru memperkaya proses pembelajaran. Guru berperan sebagai penghubung antara materi pelajaran dan realitas kehidupan. Dengan kepekaan, guru dapat menghadirkan contoh-contoh yang dekat dengan keseharian peserta didik.

Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih hidup. Dalam proses ini, peserta didik diajak untuk mengamati, bertanya, dan merefleksikan pengalaman mereka. Aktivitas ini melatih kesadaran diri dan kemampuan berpikir kritis. Mereka belajar memahami dunia dengan lebih mendalam.

Integrasi kontekstual juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Ketika peserta didik memahami masalah di sekitarnya, muncul keinginan untuk berkontribusi. Pembelajaran tidak lagi berhenti pada pengetahuan, tetapi berlanjut pada tindakan. Tidak semua pengalaman belajar harus besar dan kompleks. Hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari pun dapat menjadi sumber pembelajaran yang bermakna. Justru dari kesederhanaan itulah muncul pemahaman yang mendalam. Pendekatan ini membantu peserta didik melihat bahwa ilmu pengetahuan memiliki peran nyata dalam kehidupan. Mereka mulai memahami bahwa apa yang dipelajari dapat digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari.

Integrasi kontekstual juga mendorong pembelajaran yang lebih fleksibel. Guru dapat menyesuaikan materi dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Fleksibilitas ini membuat pembelajaran lebih adaptif. Dalam proses ini, kesalahan menjadi bagian yang wajar. Ketika peserta didik mencoba menghubungkan konsep dengan realitas, tidak selalu berhasil dengan sempurna. Namun dari situlah mereka belajar dan berkembang. Diskusi menjadi salah satu metode yang efektif dalam integrasi kontekstual. Melalui diskusi, peserta didik dapat saling berbagi pengalaman dan sudut pandang. Interaksi ini memperkaya pemahaman mereka. Integrasi kontekstual juga membantu peserta didik membangun empati.

Ketika mereka memahami kondisi orang lain atau lingkungan sekitar, muncul rasa peduli. Empati ini menjadi dasar bagi tindakan yang lebih bermakna. Lingkungan belajar yang terbuka sangat penting dalam pendekatan ini. Peserta didik perlu merasa aman untuk berbagi pengalaman dan pendapat. Rasa aman ini mendorong keterlibatan yang lebih aktif. Dalam jangka panjang, integrasi kontekstual membentuk peserta didik yang lebih peka terhadap lingkungan. Mereka tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga pada kondisi di sekitar mereka.

Kesadaran ini sangat penting dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini juga mengajarkan bahwa belajar tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Setiap pengalaman hidup dapat menjadi sumber pembelajaran. Dengan demikian, belajar menjadi proses yang berkelanjutan. Integrasi kontekstual membantu peserta didik menemukan makna personal dalam pembelajaran. Mereka tidak hanya memahami materi, tetapi juga mengaitkannya dengan kehidupan mereka sendiri. Hal ini membuat belajar menjadi lebih bermakna. Pada akhirnya, integrasi kontekstual adalah tentang memanusiakan pembelajaran. Peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki pengalaman, perasaan, dan potensi. Dari sinilah lahir proses belajar yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan.

5.2.3 Integrasi Metodologis

Integrasi metodologis menekankan pada penggunaan metode pembelajaran yang mendorong pembentukan karakter. Guru dapat menggunakan metode diskusi, simulasi, debat etis, atau pembelajaran berbasis proyek untuk menumbuhkan sikap jujur dan tanggung jawab pada siswa. Integrasi metodologi dalam pembelajaran mengajak kita untuk menyadari bahwa tidak ada satu cara yang paling benar dalam belajar. Setiap peserta didik memiliki cara unik dalam memahami dunia, sehingga pendekatan yang beragam menjadi sebuah kebutuhan, bukan pilihan. Dalam kenyataannya, metode pembelajaran yang monoton sering kali membuat peserta didik merasa jenuh. Integrasi metodologi hadir untuk menghadirkan variasi yang menyegarkan, sehingga proses belajar terasa lebih hidup dan bermakna. Pendekatan ini memadukan berbagai metode, seperti diskusi, eksperimen, proyek, hingga refleksi diri.

Perpaduan ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk menemukan cara belajar yang paling sesuai dengan dirinya. Peserta didik tidak lagi diposisikan sebagai penerima informasi semata, tetapi sebagai subjek yang

aktif dalam proses belajar. Mereka diberi kesempatan untuk mengeksplorasi, mencoba, dan bahkan gagal. Dari situlah proses belajar yang sesungguhnya terjadi. Integrasi metodologi juga mengajarkan bahwa belajar bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang perjalanan yang dilalui. Setiap metode yang digunakan memberikan pengalaman yang berbeda dan memperkaya proses tersebut. Guru memiliki peran penting dalam merancang pembelajaran yang variatif dan bermakna. Kepekaan guru dalam memahami kebutuhan peserta didik menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga perancang pengalaman belajar. Dalam proses ini, fleksibilitas menjadi hal yang sangat penting.

Guru perlu mampu menyesuaikan metode dengan situasi dan kondisi yang ada. Tidak semua rencana berjalan sesuai harapan, namun di situlah letak dinamika pembelajaran. Integrasi metodologi juga membuka ruang bagi kreativitas. Baik guru maupun peserta didik dapat bereksperimen dengan berbagai cara belajar. Kreativitas ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Peserta didik diajak untuk terlibat secara aktif melalui berbagai kegiatan. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan, merasakan, dan merefleksikan.

Keterlibatan ini membuat pembelajaran lebih bermakna. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan. Dengan mengintegrasikan berbagai metode, kelemahan satu metode dapat dilengkapi oleh metode lainnya. Hal ini menciptakan pembelajaran yang lebih seimbang. Integrasi metodologi juga menghargai perbedaan gaya belajar. Ada peserta didik yang lebih mudah belajar melalui visual, ada yang melalui praktik, dan ada yang melalui diskusi. Pendekatan ini berusaha mengakomodasi semuanya. Dalam proses ini, interaksi menjadi hal yang sangat penting. Peserta didik belajar tidak hanya dari guru, tetapi juga dari teman-temannya. Pertukaran ide dan pengalaman menjadi bagian dari pembelajaran.

Kesalahan dalam mencoba metode baru adalah hal yang wajar. Baik guru maupun peserta didik perlu melihatnya sebagai bagian dari proses belajar. Dari kesalahan itulah muncul pemahaman yang lebih mendalam. Integrasi metodologi juga mendorong peserta didik untuk lebih mandiri. Mereka belajar mengatur cara belajarnya sendiri dan menemukan strategi yang paling efektif. Kemandirian ini sangat penting untuk masa depan. Pendekatan ini membantu menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif. Setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya.

Tidak ada yang merasa tertinggal atau terabaikan. Refleksi menjadi bagian penting dalam integrasi metodologi. Setelah melalui berbagai metode, peserta didik diajak untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari. Refleksi ini membantu memperdalam pemahaman. Integrasi metodologi juga mengajarkan bahwa belajar adalah proses yang dinamis. Tidak ada metode yang selalu berhasil dalam setiap situasi. Perubahan dan penyesuaian menjadi bagian dari perjalanan belajar. Lingkungan belajar yang mendukung sangat diperlukan.

Peserta didik perlu merasa aman untuk mencoba berbagai cara belajar tanpa takut dihakimi. Rasa aman ini mendorong keberanian untuk bereksplorasi. Dalam jangka panjang, pendekatan ini membentuk peserta didik yang lebih adaptif. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan tantangan. Kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Pada akhirnya, integrasi metodologi adalah tentang memanusiakan proses belajar. Setiap peserta didik dipandang sebagai individu yang unik, dengan kebutuhan dan potensi yang berbeda. Dari sinilah lahir pembelajaran yang tidak hanya efektif, tetapi juga penuh makna dan kemanusiaan.

5.2.4 Integrasi melalui Kegiatan Ekstrakurikuler

Nilai-nilai anti korupsi juga dapat ditanamkan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti kampanye integritas, kegiatan sosial, atau program kepemimpinan siswa. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mempraktikkan nilai integritas secara langsung dalam kehidupan sosial. Integrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler menghadirkan ruang belajar yang lebih luas, melampaui batas ruang kelas. Di sinilah peserta didik menemukan dirinya tidak hanya sebagai pelajar, tetapi juga sebagai individu yang utuh dengan minat, bakat, dan mimpi.

Ekstrakurikuler sering kali menjadi tempat di mana peserta didik merasa lebih bebas mengekspresikan diri. Tanpa tekanan nilai akademik, mereka dapat belajar dengan lebih santai namun justru lebih bermakna. Kebebasan ini membuka ruang bagi pertumbuhan yang autentik. Melalui kegiatan ini, pembelajaran tidak lagi terasa kaku. Nilai-nilai yang diajarkan di kelas menemukan bentuk nyatanya dalam aktivitas yang dilakukan. Dari sinilah terjadi integrasi antara pengetahuan dan pengalaman. Setiap kegiatan ekstrakurikuler membawa pengalaman yang berbeda. Ada yang melatih kepemimpinan, ada yang mengasah kreativitas, dan ada pula yang menumbuhkan kepedulian sosial. Semua pengalaman ini saling melengkapi dalam membentuk karakter. Peserta didik belajar bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari kemampuan akademik. Dalam ekstrakurikuler, kerja sama, ketekunan, dan semangat menjadi hal yang sangat dihargai. Nilai-nilai ini sering kali lebih terasa daripada sekadar angka. Kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi ruang untuk belajar menghadapi kegagalan. Tidak semua perlombaan dimenangkan, tidak semua rencana berjalan lancar.

Namun dari kegagalan itulah peserta didik belajar tentang ketahanan dan keikhlasan. Dalam interaksi yang terjadi, peserta didik belajar

memahami orang lain. Mereka bertemu dengan teman-teman yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Dari sinilah tumbuh rasa saling menghargai. Integrasi melalui ekstrakurikuler juga memperkuat hubungan antara teori dan praktik. Apa yang dipelajari di kelas dapat diterapkan secara langsung dalam kegiatan. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih hidup. Ekstrakurikuler memberikan ruang bagi peserta didik untuk menemukan passion mereka. Dari berbagai kegiatan yang diikuti, mereka mulai mengenali apa yang benar-benar mereka sukai. Proses ini sangat penting dalam perjalanan hidup mereka. Dalam kegiatan kelompok, peserta didik belajar tentang tanggung jawab.

Setiap peran yang diemban memiliki kontribusi terhadap keberhasilan bersama. Mereka belajar bahwa setiap individu memiliki arti. Integrasi ini juga membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial. Mereka belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Keterampilan ini sangat penting dalam kehidupan nyata. Tidak semua peserta didik langsung merasa nyaman untuk terlibat. Ada yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Oleh karena itu, lingkungan yang suportif sangat dibutuhkan agar mereka merasa diterima. Ekstrakurikuler juga mengajarkan pentingnya disiplin. Kegiatan yang rutin dan terjadwal melatih peserta didik untuk mengatur waktu dan komitmen. Disiplin ini menjadi bekal berharga di masa depan. Dalam prosesnya, peserta didik sering kali menemukan makna baru tentang kebersamaan. Mereka belajar bahwa pencapaian terbaik tidak selalu tentang individu, tetapi tentang kerja tim. Kebersamaan ini menciptakan kenangan yang mendalam. Integrasi melalui kegiatan ini juga membantu peserta didik lebih mengenal dirinya sendiri. Mereka belajar memahami kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kesadaran diri ini menjadi dasar untuk berkembang. Kegiatan ekstrakurikuler membuka peluang bagi peserta didik untuk berkontribusi

pada lingkungan sekitar. Misalnya melalui kegiatan sosial atau pengabdian masyarakat. Dari sini tumbuh rasa peduli dan tanggung jawab sosial.

Pengalaman yang diperoleh sering kali tidak dapat digantikan oleh pembelajaran di kelas. Momen-momen kebersamaan, tantangan, dan pencapaian menjadi bagian dari perjalanan hidup peserta didik. Ini adalah pembelajaran yang membekas. Integrasi ini juga mengajarkan bahwa belajar bisa terjadi di mana saja. Tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di lapangan, panggung, atau lingkungan masyarakat. Dunia menjadi ruang belajar yang luas. Pada akhirnya, kegiatan ekstrakurikuler adalah ruang untuk memanusiakan pendidikan. Peserta didik tidak hanya berkembang secara intelektual, tetapi juga emosional dan sosial. Dari sinilah lahir individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati, empati, dan kemampuan untuk hidup bersama orang lain.

5.3 Kurikulum Tersembunyi (Hidden Curriculum) dan Budaya Sekolah

5.3.1 Pengertian Kurikulum Tersembunyi

Kurikulum tersembunyi merupakan nilai-nilai, norma, dan praktik yang tidak tertulis dalam dokumen kurikulum, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nilai-nilai tersebut terbentuk melalui interaksi sosial, kebijakan sekolah, dan perilaku para pendidik. Kurikulum tersembunyi adalah sisi pendidikan yang sering tidak tertulis, namun justru paling terasa dalam kehidupan peserta didik. Ia hadir dalam kebiasaan, sikap, dan interaksi sehari-hari di sekolah. Tanpa disadari, di sanalah nilai-nilai kehidupan ditanamkan secara perlahan. Tidak semua pembelajaran terjadi melalui buku atau penjelasan guru. Banyak hal dipelajari peserta didik dari cara guru berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Dari situ, mereka menyerap makna tentang rasa hormat, keadilan, dan empati. Budaya sekolah menjadi wadah utama bagi tumbuhnya kurikulum tersembunyi. Lingkungan yang hangat dan inklusif akan membentuk peserta didik yang percaya diri dan terbuka.

Sebaliknya, lingkungan yang kaku dapat membatasi ekspresi dan perkembangan mereka. Sering kali peserta didik belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dibandingkan dari apa yang mereka dengar. Keteladanan menjadi bahasa yang paling kuat dalam pendidikan. Sikap guru dan seluruh warga sekolah menjadi cerminan nilai yang diajarkan. Kurikulum tersembunyi mengajarkan hal-hal sederhana yang berdampak besar. Misalnya, kebiasaan menyapa, menjaga kebersihan, atau menghargai perbedaan.

Hal-hal kecil ini perlahan membentuk karakter peserta didik. Dalam interaksi sehari-hari, peserta didik belajar tentang relasi sosial. Mereka memahami bagaimana bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan menghargai orang lain. Pembelajaran ini tidak tertulis, tetapi sangat bermakna. Budaya sekolah yang positif dapat menumbuhkan rasa memiliki. Peserta didik merasa bahwa sekolah adalah tempat yang aman dan nyaman. Rasa ini mendorong mereka untuk lebih aktif dan terlibat. Sebaliknya, budaya yang kurang sehat dapat meninggalkan dampak yang mendalam. Sikap diskriminatif, kurangnya penghargaan, atau komunikasi yang tidak sehat dapat memengaruhi perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, budaya sekolah perlu dibangun dengan kesadaran.

Kurikulum tersembunyi juga mengajarkan nilai kedisiplinan. Bukan hanya melalui aturan, tetapi melalui konsistensi dalam penerapan. Peserta didik belajar bahwa aturan bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama. Guru memiliki peran penting sebagai agen budaya. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil akan memengaruhi lingkungan belajar. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk suasana dan nilai yang hidup di sekolah. Peserta didik juga menjadi bagian dari pembentuk budaya sekolah. Interaksi antar teman, cara mereka saling memperlakukan, semuanya berkontribusi pada lingkungan yang tercipta. Budaya sekolah adalah hasil dari kebersamaan. Kurikulum tersembunyi sering kali membentuk

karakter lebih kuat dibandingkan kurikulum formal. Nilai-nilai yang dialami secara langsung cenderung lebih melekat. Pengalaman ini menjadi bagian dari diri peserta didik. Dalam budaya sekolah yang sehat, perbedaan dipandang sebagai kekayaan.

Peserta didik belajar untuk menerima dan menghargai keberagaman. Ini menjadi bekal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan yang suportif memungkinkan peserta didik untuk berkembang tanpa rasa takut. Mereka berani mencoba, bertanya, dan mengungkapkan pendapat. Rasa aman ini sangat penting dalam proses belajar. Kurikulum tersembunyi juga mengajarkan tentang tanggung jawab sosial. Peserta didik belajar bahwa tindakan mereka memiliki dampak terhadap orang lain. Kesadaran ini membentuk sikap yang lebih peduli.

Budaya sekolah yang baik tidak terbentuk secara instan. Ia membutuhkan proses, komitmen, dan konsistensi dari seluruh warga sekolah. Setiap individu memiliki peran dalam membangun lingkungan yang positif. Kurikulum tersembunyi mengingatkan bahwa pendidikan adalah proses yang menyeluruh. Tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk sikap dan nilai. Inilah yang menjadikan pendidikan lebih manusiawi. Peserta didik yang tumbuh dalam budaya sekolah yang positif cenderung memiliki karakter yang kuat. Mereka tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan tanggung jawab.

Ini adalah hasil dari pembelajaran yang tidak terlihat. Pada akhirnya, kurikulum tersembunyi dan budaya sekolah adalah fondasi dari pendidikan yang bermakna. Apa yang tidak tertulis justru sering kali paling berpengaruh. Dari sinilah lahir individu yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki nilai, sikap, dan kemanusiaan yang utuh.

5.3.2 Peran Budaya Sekolah dalam Pendidikan Anti Korupsi

Budaya sekolah adalah jiwa dari lingkungan belajar. Ia membentuk cara peserta didik berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, budaya sekolah berperan sebagai fondasi utama untuk menanamkan nilai kejujuran dan integritas sejak dini. Sekolah juga menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab akan memperkuat pendidikan anti korupsi. Ketika lingkungan sekolah menunjukkan praktik yang adil dan terbuka, siswa akan belajar bahwa integritas merupakan nilai yang nyata dan penting dalam kehidupan bersama. Sekolah yang menekankan transparansi dan keadilan memberi peserta didik contoh nyata. Mereka melihat bahwa perilaku jujur dihargai, sementara perilaku curang tidak ditoleransi. Dari pengalaman ini, nilai anti-korupsi menjadi lebih hidup, bukan sekadar teori.

Budaya sekolah membentuk norma yang tidak tertulis. Misalnya, bagaimana peserta didik saling menghormati hak orang lain, menghargai waktu, dan menjaga keadilan dalam kegiatan sehari-hari. Nilai-nilai ini menjadi pondasi untuk memahami pentingnya integritas dalam kehidupan. Tidak hanya guru, teman sebaya juga menjadi bagian dari budaya sekolah. Ketika peserta didik melihat teman mereka jujur dan bertanggung jawab, perilaku positif ini menular secara alami. Budaya anti-korupsi tumbuh melalui teladan, bukan hanya aturan.

Budaya sekolah mengajarkan bahwa tindakan kecil pun memiliki arti. Misalnya, mengembalikan barang yang ditemukan atau tidak mencontek dalam ujian adalah bentuk kejujuran. Nilai-nilai sederhana ini membangun karakter yang tahan terhadap praktik korupsi di masa depan. Konsistensi dalam budaya sekolah sangat penting. Jika nilai kejujuran dan integritas ditegakkan secara terus-menerus, peserta didik belajar bahwa prinsip-prinsip ini bukan hanya teori, tetapi cara hidup yang nyata.

Sekolah yang memiliki budaya inklusif dan adil membuat peserta didik merasa aman untuk melapor atau menolak ketidakadilan. Keberanian untuk menegakkan kebenaran ini merupakan langkah awal dalam pendidikan anti korupsi. Budaya sekolah juga mengajarkan empati dan tanggung jawab sosial. Peserta didik memahami bahwa korupsi merugikan orang lain dan masyarakat luas.

Kesadaran ini menumbuhkan rasa peduli yang mencegah perilaku curang. Melalui kegiatan sehari-hari, peserta didik belajar untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Sekolah yang menekankan nilai ini membentuk pola pikir yang menolak perilaku korup karena ia merugikan orang lain. Kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi wadah untuk menanamkan nilai anti-korupsi. Misalnya, dalam kepanitiaan, peserta didik belajar transparansi dalam pengelolaan dana dan keadilan dalam pembagian tugas.

Pengalaman praktis ini lebih efektif daripada sekadar ceramah. Budaya sekolah yang positif mempengaruhi pola komunikasi. Diskusi yang terbuka dan menghargai pendapat orang lain mengajarkan peserta didik pentingnya kejujuran dalam menyampaikan informasi. Teladan guru sangat berpengaruh. Ketika guru menunjukkan integritas, adil, dan transparan, peserta didik meniru sikap tersebut. Budaya anti-korupsi tumbuh dari contoh nyata yang mereka saksikan setiap hari.

Budaya sekolah juga membentuk keberanian moral. Peserta didik belajar untuk menolak praktik tidak etis, meski mungkin sulit atau tidak populer. Keberanian ini lahir dari pengalaman di lingkungan yang mendukung dan menghargai integritas. Penerapan penghargaan dan konsekuensi yang jelas dalam sekolah mendukung budaya anti-korupsi. Peserta didik memahami bahwa kejujuran dihargai, sedangkan

ketidakjujuran memiliki konsekuensi nyata. Budaya sekolah tidak hanya menekankan perilaku, tetapi juga pemahaman.

Diskusi tentang kejujuran, keadilan, dan dampak korupsi membantu peserta didik menyadari mengapa integritas itu penting dalam kehidupan. Lingkungan belajar yang aman dan suportif membuat peserta didik berani berbicara dan menolak perilaku curang. Mereka belajar bahwa menegakkan kejujuran bukan tindakan yang salah atau berisiko, tetapi sesuatu yang mulia. Budaya sekolah yang konsisten juga membentuk kebiasaan jangka panjang. Nilai-nilai yang diterapkan sejak kecil akan terbawa hingga dewasa, menjadikan peserta didik individu yang berintegritas dan menolak korupsi. Interaksi sehari-hari di sekolah merupakan laboratorium hidup bagi pendidikan anti korupsi. Mulai dari berbagi tugas, menghormati hak teman, hingga menyelesaikan konflik secara adil, semuanya membentuk karakter peserta didik.

Budaya sekolah yang humanis menekankan keseimbangan antara disiplin dan perhatian. Peserta didik belajar bahwa integritas bukan sekadar aturan, tetapi pilihan sadar yang muncul dari pemahaman dan empati. Pada akhirnya, budaya sekolah adalah guru yang tak tertulis namun paling berpengaruh dalam pendidikan anti-korupsi. Ia membentuk peserta didik menjadi pribadi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga jujur, peduli, dan berani menegakkan kebenaran dalam kehidupan nyata.

5.3.3 Keteladanan Guru sebagai Pembentuk Karakter

1. Guru memiliki peran strategis sebagai teladan moral bagi siswa. Sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh guru dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan pengaruh besar dalam membentuk karakter siswa. Keteladanan guru bukan sekadar konsep normatif dalam pendidikan, tetapi merupakan napas yang menghidupkan proses pembentukan karakter peserta didik. Dalam keseharian, siswa lebih banyak belajar dari apa yang

mereka lihat dibandingkan apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, sikap, tutur kata, dan tindakan guru menjadi cermin yang diamati secara terus-menerus oleh siswa.

2. Seorang guru yang datang tepat waktu, misalnya, tanpa perlu banyak ceramah tentang disiplin, sudah menanamkan nilai tersebut secara nyata. Keteladanan seperti ini terasa sederhana, namun dampaknya sangat dalam karena menyentuh ranah pengalaman langsung siswa. Dalam interaksi sehari-hari, guru juga menunjukkan bagaimana menghargai orang lain. Ketika guru mendengarkan siswa dengan penuh perhatian, siswa belajar bahwa setiap suara itu penting. Dari situ tumbuh rasa percaya diri dan empati. Keteladanan guru juga terlihat dalam cara menghadapi kesalahan. Guru yang mampu mengakui kekeliruan dan meminta maaf memberikan pelajaran berharga bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan keberanian untuk jujur adalah bagian dari karakter mulia. Sikap sabar guru dalam menghadapi berbagai karakter siswa menjadi pelajaran tersendiri. Siswa yang mungkin sulit diatur justru membutuhkan contoh kesabaran yang konsisten, bukan kemarahan yang sesaat. Ketika guru menunjukkan integritas antara ucapan dan tindakan yang selaras siswa belajar tentang kejujuran yang autentik. Nilai ini tidak bisa diajarkan hanya melalui teori, melainkan melalui contoh yang hidup. Guru juga menjadi teladan dalam hal tanggung jawab. Menyelesaikan tugas dengan baik, mempersiapkan pembelajaran secara matang, dan konsisten dalam penilaian menunjukkan bahwa tanggung jawab adalah bagian dari profesionalitas dan karakter. Keteladanan dalam hal kerja keras pun tampak dari usaha guru untuk terus belajar dan berkembang. Ketika siswa melihat guru membaca, berdiskusi, atau mengikuti pelatihan, mereka memahami bahwa belajar adalah proses sepanjang hayat. Dalam suasana kelas, guru yang adil kepada semua siswa menanamkan nilai keadilan yang konkret. Tidak membedakan siswa berdasarkan kemampuan atau latar belakang menjadi pelajaran sosial yang penting.
3. Guru juga berperan sebagai teladan dalam mengelola emosi. Ketika menghadapi situasi sulit dengan tenang, siswa belajar bagaimana mengendalikan diri dan tidak bereaksi secara impulsif. Keteladanan dalam

komunikasi juga sangat penting. Bahasa yang santun dan penuh penghargaan membentuk kebiasaan siswa untuk berkomunikasi secara baik dalam kehidupan sehari-hari.

4. Di sisi lain, guru yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mengajarkan nilai tanggung jawab sosial. Hal ini bisa dimulai dari hal kecil seperti menjaga kebersihan kelas. Keteladanan tidak selalu harus sempurna. Justru dalam keterbatasan, guru yang tetap berusaha memberikan yang terbaik menunjukkan nilai ketulusan dan keikhlasan. Siswa sering kali menangkap hal-hal kecil yang mungkin tidak disadari guru. Senyuman, sapaan hangat, atau perhatian sederhana bisa meninggalkan kesan mendalam dan membentuk karakter positif. Dalam konteks yang lebih luas, guru adalah figur yang menginspirasi. Ketika guru menunjukkan semangat dan kecintaan terhadap profesinya, siswa pun terdorong untuk menemukan makna dalam apa yang mereka lakukan. Keteladanan guru juga membangun hubungan emosional yang sehat antara guru dan siswa. Hubungan ini menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran yang bermakna. Proses pembentukan karakter melalui keteladanan membutuhkan konsistensi. Satu tindakan baik tidak cukup jika tidak diikuti dengan perilaku yang sama secara berkelanjutan. Refleksi diri menjadi bagian penting bagi guru. Dengan terus mengevaluasi sikap dan tindakan, guru dapat memperbaiki diri dan menjadi teladan yang lebih baik bagi siswa. Pada akhirnya, keteladanan guru adalah investasi jangka panjang. Nilai-nilai yang ditanamkan hari ini mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi akan tumbuh dalam kehidupan siswa di masa depan. Dengan demikian, keteladanan guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi tentang menjadi manusia yang utuh di hadapan siswa. Dari situlah karakter terbentuk secara perlahan, alami, dan penuh makna.

5.3.4 Lingkungan Sekolah sebagai Ekosistem Integritas

Sekolah perlu membangun lingkungan pendidikan yang mendukung nilai-nilai integritas melalui aturan yang adil, transparansi dalam pengelolaan kegiatan sekolah, serta partisipasi seluruh warga sekolah dalam menegakkan budaya anti korupsi. Lingkungan sekolah

bukan sekadar ruang fisik tempat belajar, melainkan sebuah ekosistem hidup yang membentuk cara berpikir, merasa, dan bertindak setiap individu di dalamnya. Di dalamnya ada interaksi yang saling memengaruhi antara guru, siswa, tenaga kependidikan, bahkan suasana ruang itu sendiri.

Ketika kita melihat sekolah sebagai ekosistem, kita mulai memahami bahwa setiap elemen memiliki peran. Tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Satu perubahan kecil, seperti cara guru menyapa siswa di pagi hari, bisa memberi dampak pada suasana belajar sepanjang hari. Sebaliknya, lingkungan yang kaku dan penuh tekanan dapat menghambat potensi. Siswa mungkin hadir secara fisik, tetapi secara emosional mereka menjauh. Di sinilah pentingnya menghadirkan ruang yang manusiawi dalam pendidikan. Ekosistem sekolah yang integratif tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada hubungan antarindividu. Relasi yang sehat menjadi jembatan bagi pembentukan karakter yang kuat. Dalam keseharian, integrasi ini terlihat dari bagaimana nilai-nilai diterapkan secara konsisten di seluruh lingkungan sekolah. Apa yang diajarkan di kelas selaras dengan apa yang dirasakan siswa di luar kelas.

Lingkungan sekolah juga mencerminkan budaya yang dibangun bersama. Budaya saling menghargai, gotong royong, dan kejujuran tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh dari kebiasaan yang dihidupi setiap hari. Setiap sudut sekolah memiliki makna. Dari ruang kelas, halaman, hingga kantin semuanya menjadi ruang belajar yang tidak selalu tertulis dalam kurikulum, tetapi sangat terasa dalam pengalaman siswa.

Guru, sebagai bagian dari ekosistem, tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penjaga iklim belajar. Cara mereka berinteraksi ikut menentukan kualitas lingkungan tersebut. Lingkungan yang integratif memberi ruang bagi keberagaman. Setiap siswa dengan latar belakang berbeda merasa dihargai dan memiliki tempat untuk

berkembang. Dalam suasana seperti ini, perbedaan tidak menjadi sumber konflik, tetapi menjadi peluang untuk belajar memahami dan menghargai satu sama lain. Penting juga untuk menyadari bahwa lingkungan sekolah tidak selalu ideal. Ada dinamika, tantangan, dan bahkan konflik yang menjadi bagian dari proses tumbuh bersama.

Namun justru dalam menghadapi tantangan itulah ekosistem sekolah diuji. Apakah ia mampu menjadi ruang yang mendukung atau justru memperparah keadaan. Refleksi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem ini. Seluruh warga sekolah perlu secara sadar melihat kembali apa yang sudah berjalan dan apa yang perlu diperbaiki. Lingkungan sekolah yang sehat tidak dibangun dalam semalam. Ia adalah hasil dari proses panjang, komitmen bersama, dan kesadaran kolektif. Peran kepemimpinan juga sangat penting. Pemimpin sekolah yang peka dan humanis mampu mengarahkan ekosistem ke arah yang lebih positif dan inklusif.

Ketika semua elemen bekerja secara selaras, sekolah menjadi lebih dari sekadar tempat belajar. Ia menjadi ruang kehidupan yang membentuk manusia secara utuh. Siswa yang tumbuh dalam ekosistem yang integratif cenderung memiliki karakter yang lebih kuat, empati yang tinggi, dan kemampuan beradaptasi yang baik. Pada akhirnya, lingkungan sekolah sebagai ekosistem integrasi adalah tentang bagaimana kita memanusiakan pendidikan. Bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi menciptakan ruang di mana setiap individu bisa tumbuh, merasa berarti, dan menjadi dirinya sendiri secara utuh.

5.4 Evaluasi Kurikulum Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Evaluasi kurikulum pendidikan karakter anti korupsi bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan sebuah proses reflektif untuk melihat sejauh mana nilai-nilai kejujuran benar-benar hidup dalam keseharian sekolah. Ini bukan hanya

tentang apa yang tertulis, tetapi tentang apa yang dirasakan dan dijalani. Dalam praktiknya, evaluasi sering kali terjebak pada angka dan laporan. Padahal, pendidikan karakter tidak selalu bisa diukur dengan instrumen kuantitatif. Ada dimensi batin yang membutuhkan kepekaan untuk memahaminya. Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan apakah siswa benar-benar memahami makna kejujuran, atau sekadar menghafal definisinya. Di sinilah evaluasi harus menyentuh ranah kesadaran, bukan hanya pengetahuan.

Evaluasi yang humanis mengajak guru untuk melihat siswa sebagai individu yang sedang berproses. Kesalahan bukan langsung dihukum, tetapi dipahami sebagai bagian dari pembelajaran moral. Dalam konteks ini, guru juga perlu merefleksikan dirinya. Apakah nilai anti korupsi sudah tercermin dalam sikap dan keputusan sehari-hari. Karena evaluasi sejatinya juga menyentuh pendidik. Lingkungan sekolah menjadi indikator penting dalam evaluasi. Apakah ada budaya transparansi, keadilan, dan keterbukaan. Atau justru masih ada praktik kecil yang bertentangan dengan nilai yang diajarkan. Evaluasi yang mendalam tidak mencari siapa yang salah, tetapi berusaha memahami apa yang belum berjalan dengan baik. Ini membutuhkan keberanian untuk jujur sebagai sebuah komunitas. Partisipasi siswa dalam evaluasi juga penting. Mendengarkan suara mereka memberikan perspektif yang sering kali terlewatkan oleh orang dewasa. Dalam pengalaman sehari-hari, siswa mungkin melihat kontradiksi antara teori dan praktik. Evaluasi harus mampu menangkap ketidaksesuaian ini sebagai bahan perbaikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang hidup.

Oleh karena itu, evaluasi harus bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan. Pendidikan karakter anti korupsi juga perlu dilihat dalam jangka panjang. Hasilnya tidak selalu langsung terlihat, tetapi tumbuh perlahan dalam sikap dan keputusan siswa di masa depan. Evaluasi yang reflektif mengajak semua pihak untuk tidak cepat puas. Selalu ada ruang untuk memperbaiki, memperdalam, dan memperluas makna pembelajaran. Dalam proses evaluasi, empati menjadi hal yang penting. Memahami latar belakang siswa membantu kita melihat mengapa mereka bersikap tertentu.

Evaluasi juga perlu mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas. Nilai anti korupsi tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi bagian dari evaluasi yang utuh. Pendidikan karakter tidak bisa berjalan sendiri. Refleksi bersama dapat menjadi ruang untuk membangun komitmen kolektif. Bukan sekadar memperbaiki kurikulum, tetapi memperkuat nilai yang dihidupi bersama.

Evaluasi yang baik tidak menakutkan, tetapi memberdayakan. Ia membuka ruang dialog, bukan sekadar penilaian satu arah. Pada akhirnya, tujuan evaluasi adalah memastikan bahwa pendidikan anti korupsi benar-benar menyentuh hati, bukan hanya pikiran. Karena perubahan perilaku berakar dari kesadaran yang mendalam. Dengan demikian, evaluasi kurikulum pendidikan karakter anti korupsi menjadi proses memanusiakan pendidikan itu sendiri mengajak setiap individu untuk tumbuh dalam kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk berbuat benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat.

5.4.1 Tujuan Evaluasi Kurikulum

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kurikulum pendidikan anti korupsi mampu mencapai tujuan pembentukan karakter. Evaluasi juga membantu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Tujuan evaluasi kurikulum pada dasarnya bukan sekadar untuk menilai benar atau salahnya suatu rancangan, melainkan untuk memahami apakah kurikulum tersebut benar-benar bermakna bagi manusia yang menjalaninya. Ia mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya: apakah yang kita ajarkan sudah menyentuh kehidupan nyata peserta didik. Evaluasi menjadi ruang untuk melihat apakah tujuan pendidikan yang dirancang di atas kertas benar-benar hidup di dalam kelas. Apakah nilai, pengetahuan, dan keterampilan itu hadir dalam pengalaman belajar yang nyata, atau hanya berhenti sebagai konsep.

Lebih jauh, tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran tetap berpihak pada perkembangan siswa sebagai manusia seutuhnya. Bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial.

Evaluasi juga membantu kita memahami relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman. Dunia terus berubah, dan pendidikan harus mampu menjawab perubahan itu tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Dalam refleksi yang lebih dalam, evaluasi kurikulum mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan proses yang statis. Ia harus terus bergerak, menyesuaikan, dan berkembang bersama realitas yang dihadapi peserta didik. Tujuan lainnya adalah untuk menemukan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Apa yang direncanakan belum tentu berjalan sesuai dengan yang diinginkan, dan evaluasi membantu menjembatani hal tersebut. Evaluasi juga menjadi sarana untuk mendengar suara siswa. Dari pengalaman mereka, kita bisa memahami bagaimana kurikulum diterima, dirasakan, dan dijalani dalam keseharian.

Dalam proses ini, guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pembelajar. Evaluasi menjadi cermin bagi guru untuk melihat kembali praktik mengajarnya. Tujuan evaluasi kurikulum juga mencakup perbaikan berkelanjutan. Ia bukan akhir dari proses, melainkan bagian dari siklus pembelajaran yang terus berulang. Evaluasi yang humanis tidak berfokus pada kesalahan, tetapi pada peluang untuk bertumbuh. Ia melihat kekurangan sebagai ruang belajar, bukan sebagai kegagalan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mampu beradaptasi. Evaluasi membantu mengidentifikasi bagian mana yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu diperbarui. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan antara tujuan, proses, dan hasil pembelajaran. Ketiganya harus berjalan seiring agar pendidikan menjadi utuh. Dalam praktiknya, evaluasi kurikulum juga menguatkan akuntabilitas. Sekolah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa apa yang diajarkan benar-benar memberi dampak positif.

Namun, akuntabilitas ini tidak seharusnya menjadi tekanan, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan. Tujuan evaluasi juga berkaitan dengan keadilan. Apakah kurikulum memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berkembang, tanpa diskriminasi. Evaluasi membantu kita melihat apakah ada kelompok siswa yang tertinggal atau kurang terlayani, sehingga dapat segera diberikan perhatian lebih. Dalam refleksi yang lebih luas, evaluasi kurikulum juga menjadi upaya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Ia memastikan bahwa pendidikan tidak kehilangan arah di tengah tuntutan formalitas.

Evaluasi yang bermakna membuka ruang dialog antar semua pihak—guru, siswa, orang tua, dan pemangku kebijakan. Dari dialog inilah muncul pemahaman yang lebih utuh. Pada akhirnya, tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk memperbaiki kualitas pengalaman belajar. Bukan hanya agar siswa berhasil secara akademik, tetapi juga agar mereka menemukan makna dalam proses belajar. Dengan demikian, evaluasi kurikulum adalah proses reflektif yang memanusiakan pendidikan. Ia mengajak kita untuk terus bertanya, memperbaiki, dan memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi ruang tumbuh bagi setiap individu.

5.4.2 Evaluasi Kognitif, Afektif, dan Perilaku

Penilaian pendidikan anti korupsi tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku siswa. Evaluasi dilakukan melalui observasi sikap, refleksi diri, serta keterlibatan siswa dalam kegiatan yang menumbuhkan nilai integritas. Evaluasi kognitif, afektif, dan perilaku bukan sekadar pembagian ranah dalam pendidikan, tetapi cerminan dari upaya memahami manusia secara utuh. Setiap siswa hadir bukan hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan perasaan dan tindakan yang saling terhubung. Dalam ranah kognitif, kita sering berfokus pada kemampuan siswa memahami materi, mengingat informasi, dan memecahkan masalah. Namun, di balik itu, ada proses berpikir yang unik pada setiap individu yang tidak selalu bisa diseragamkan. Evaluasi kognitif yang reflektif tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menghargai proses berpikir siswa. Bagaimana mereka sampai pada suatu jawaban sering kali lebih penting daripada jawaban itu sendiri. Sementara itu, ranah afektif menyentuh sisi yang lebih dalam tentang perasaan, sikap, dan nilai yang diyakini siswa. Ini adalah wilayah yang tidak terlihat, tetapi sangat menentukan arah perilaku seseorang. Mengevaluasi afektif berarti mencoba memahami apa yang dirasakan siswa terhadap apa yang mereka pelajari. Apakah mereka peduli, tertarik, atau justru merasa terasing dari proses belajar.

Dalam pendekatan yang humanis, evaluasi afektif tidak dilakukan dengan menghakimi, tetapi dengan mendengarkan. Perasaan siswa menjadi bagian penting dari proses pendidikan. Ranah perilaku kemudian menjadi wujud nyata dari apa yang dipikirkan dan dirasakan. Perilaku siswa adalah ekspresi dari nilai yang sudah mulai terinternalisasi. Evaluasi perilaku sering kali tampak lebih mudah karena bisa diamati. Namun, tanpa memahami aspek kognitif dan afektif, penilaian perilaku bisa menjadi dangkal. Ketika

seorang siswa berperilaku tidak sesuai harapan, evaluasi yang reflektif tidak langsung memberi label, tetapi mencoba memahami latar belakangnya. Ketiga ranah kognitif, afektif, dan perilaku tidak berdiri sendiri. Mereka saling memengaruhi dan membentuk satu kesatuan dalam diri siswa. Evaluasi yang utuh berusaha melihat keterkaitan ini. Misalnya, kesulitan dalam memahami materi (kognitif) bisa memengaruhi rasa percaya diri (afektif), yang kemudian berdampak pada partisipasi (perilaku). Dalam praktiknya, guru dituntut untuk lebih peka dan tidak hanya mengandalkan instrumen formal. Observasi, percakapan, dan interaksi sehari-hari menjadi bagian penting dari evaluasi. Evaluasi yang humanis memberi ruang bagi siswa untuk berkembang, bukan sekadar dinilai. Ia melihat potensi, bukan hanya kekurangan. Penting juga untuk menyadari bahwa setiap siswa berkembang dengan ritme yang berbeda. Evaluasi tidak seharusnya memaksakan standar yang sama secara kaku. Dalam konteks ini, umpan balik menjadi sangat penting. Bukan sekadar angka, tetapi pesan yang membangun dan membantu siswa memahami dirinya. Evaluasi juga menjadi cermin bagi guru. Apakah metode yang digunakan sudah mampu menjangkau ketiga ranah tersebut secara seimbang. Ketika evaluasi hanya berfokus pada kognitif, ada risiko mengabaikan sisi kemanusiaan siswa. Padahal, pendidikan sejatinya adalah tentang membentuk manusia, bukan hanya mengisi kepala. Evaluasi afektif dan perilaku membantu menjaga keseimbangan ini, memastikan bahwa nilai dan sikap tidak tertinggal. Proses evaluasi yang reflektif mengajak semua pihak untuk lebih sabar dalam melihat hasil. Perubahan dalam ranah afektif dan perilaku sering kali membutuhkan waktu yang panjang. Pada akhirnya, evaluasi kognitif, afektif, dan perilaku adalah upaya untuk memahami perjalanan belajar siswa secara utuh sebuah perjalanan yang tidak hanya tentang menjadi pintar, tetapi juga tentang menjadi manusia yang lebih sadar, peduli, dan bertanggung jawab.

5.4.3 Metode Evaluasi yang Holistik

Metode evaluasi dapat dilakukan melalui portofolio, jurnal refleksi, penilaian proyek, dan observasi perilaku. Pendekatan ini memungkinkan guru menilai perkembangan karakter siswa secara lebih komprehensif. Metode evaluasi yang holistik lahir dari kesadaran bahwa manusia tidak bisa dipahami secara parsial. Siswa bukan hanya kumpulan nilai angka, tetapi pribadi yang utuh dengan pikiran, perasaan, dan pengalaman hidup yang saling terhubung. Dalam pendekatan ini, evaluasi tidak

lagi sekadar mengukur hasil akhir, tetapi mencoba memahami perjalanan belajar yang dilalui siswa. Proses menjadi sama pentingnya dengan hasil.

Metode holistik mengajak pendidik untuk melihat siswa secara lebih dekat dan personal. Setiap anak memiliki cerita, latar belakang, dan cara belajar yang berbeda. Evaluasi kemudian menjadi ruang untuk mengenali keunikan tersebut, bukan untuk menyeragamkannya. Di sinilah letak nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Salah satu bentuk evaluasi holistik adalah melalui observasi keseharian. Dari interaksi sederhana di kelas, guru bisa menangkap banyak hal yang tidak tertulis dalam lembar ujian. Selain itu, refleksi diri siswa juga menjadi bagian penting. Ketika siswa diajak menilai dirinya sendiri, mereka belajar memahami kekuatan dan kelemahan secara jujur. Portofolio juga menjadi metode yang bermakna. Kumpulan karya siswa menunjukkan perkembangan mereka dari waktu ke waktu, bukan hanya satu momen tertentu. Diskusi dan percakapan terbuka memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan mereka. Dari sini, evaluasi menjadi dialog, bukan penilaian sepihak. Metode holistik juga menghargai proses kolaborasi. Kerja kelompok bukan hanya dinilai dari hasil, tetapi juga dari dinamika interaksi antar siswa.

Dalam pendekatan ini, umpan balik memiliki peran yang sangat penting. Bukan sekadar koreksi, tetapi bentuk perhatian yang membantu siswa bertumbuh. Evaluasi yang humanis tidak membuat siswa merasa dihakimi. Sebaliknya, ia menciptakan rasa aman untuk mencoba, gagal, dan belajar kembali. Guru dalam metode ini berperan sebagai fasilitator yang peka. Ia tidak hanya mengamati, tetapi juga memahami dan mendampingi. Penting untuk diingat bahwa evaluasi holistik membutuhkan waktu dan kesabaran. Ia tidak bisa dilakukan secara instan atau terburu-buru. Namun, justru dalam proses yang perlahan itulah muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang siswa. Metode ini juga membuka ruang bagi keterlibatan orang tua. Informasi dari rumah membantu melengkapi gambaran tentang perkembangan siswa.

Evaluasi holistik tidak menempatkan siswa dalam satu label. Ia menghindari generalisasi yang bisa membatasi potensi. Sebaliknya, ia melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Dalam praktiknya, metode ini menuntut fleksibilitas. Guru perlu menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kebutuhan

siswa. Pada akhirnya, tujuan dari evaluasi holistik adalah menghadirkan keadilan dalam pendidikan memberi setiap siswa kesempatan untuk dinilai secara utuh dan manusiawi. Dengan demikian, metode evaluasi yang holistik bukan hanya tentang cara menilai, tetapi tentang cara memandang manusia. Ia mengajak kita untuk melihat siswa bukan sebagai objek penilaian, melainkan sebagai individu yang sedang tumbuh, belajar, dan mencari makna dalam perjalanan hidupnya. Pada akhirnya, tujuan dari evaluasi holistik adalah menghadirkan keadilan dalam pendidikan memberi setiap siswa kesempatan untuk dinilai secara utuh dan manusiawi. Dengan demikian, metode evaluasi yang holistik bukan hanya tentang cara menilai, tetapi tentang cara memandang manusia. Ia mengajak kita untuk melihat siswa bukan sebagai objek penilaian, melainkan sebagai individu yang sedang tumbuh, belajar, dan mencari makna dalam perjalanan hidupnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum pendidikan anti korupsi. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, sekolah dapat memastikan bahwa pendidikan karakter yang diberikan benar-benar memberikan dampak positif bagi pembentukan generasi yang berintegritas.

5.4.4 Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Pemanfaatan hasil evaluasi dalam pendidikan bukan sekadar tahap lanjutan setelah penilaian, melainkan inti dari seluruh proses belajar itu sendiri. Tanpa pemanfaatan yang tepat, evaluasi hanya menjadi angka yang kehilangan makna. Hasil evaluasi seharusnya dibaca sebagai cerita tentang perjalanan siswa. Di balik setiap nilai, ada usaha, kesulitan, harapan, dan proses panjang yang sering kali tidak terlihat. Dalam pendekatan yang reflektif, guru tidak hanya melihat siapa yang berhasil dan siapa yang belum, tetapi mencoba memahami mengapa hal itu terjadi. Dari sini, evaluasi menjadi pintu untuk memahami, bukan menghakimi. Pemanfaatan hasil evaluasi juga berarti memberi umpan balik yang bermakna. Bukan sekadar komentar singkat, tetapi pesan yang membantu siswa melihat arah perbaikan. Umpan balik yang humanis tidak menjatuhkan, tetapi menguatkan. Ia jujur, namun

tetap menjaga harga diri siswa sebagai individu yang sedang belajar. Bagi siswa, hasil evaluasi bisa menjadi cermin untuk mengenali diri. Namun, ini hanya terjadi jika mereka diajak untuk merefleksikan hasil tersebut, bukan sekadar menerima. Proses refleksi ini membantu siswa memahami bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan belajar. Di sisi lain, guru juga perlu menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan refleksi diri. Apakah metode yang digunakan sudah efektif Apakah semua siswa sudah terfasilitasi dengan baik Dengan demikian, hasil evaluasi tidak hanya berbicara tentang siswa, tetapi juga tentang praktik mengajar guru.

Pemanfaatan hasil evaluasi juga penting dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya. Dari data yang ada, guru dapat menyesuaikan strategi agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Dalam konteks yang lebih luas, hasil evaluasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Kebijakan yang diambil seharusnya berpijak pada realitas yang terjadi di lapangan. Namun, penting untuk menjaga agar data tidak menghilangkan sisi kemanusiaan. Angka tetap perlu dipahami dalam konteks kehidupan nyata siswa. Pemanfaatan hasil evaluasi juga melibatkan komunikasi dengan orang tua. Melalui dialog yang terbuka, orang tua dapat memahami perkembangan anak secara lebih utuh. Dalam komunikasi ini, pendekatan yang digunakan harus empatik. Tujuannya bukan menyalahkan, tetapi mencari jalan terbaik bersama. Hasil evaluasi juga bisa digunakan untuk memberikan penguatan. Mengapresiasi kemajuan kecil sering kali lebih bermakna daripada hanya menyoroti kekurangan. Dalam praktiknya, pemanfaatan hasil evaluasi membutuhkan kepekaan. Tidak semua siswa merespons hasil dengan cara yang sama. Oleh karena itu, pendekatan yang personal menjadi penting. Guru perlu memahami bagaimana cara terbaik menyampaikan hasil kepada setiap siswa. Pemanfaatan hasil evaluasi yang baik juga membuka ruang dialog. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, menjelaskan, dan bahkan menyampaikan perasaannya. Pada akhirnya, hasil evaluasi seharusnya menjadi alat untuk memberdayakan, bukan membatasi. Ia membantu siswa melihat potensi, bukan sekadar kekurangan. Dengan demikian, pemanfaatan hasil evaluasi adalah proses memanusiakan penilaian mengubah angka menjadi

makna, dan menjadikan setiap hasil sebagai langkah untuk tumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Bab 6 STRATEGI PEMBELAJARAN ANTI KORUPSI DI KELAS

Pendidikan di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar akibat pengaruh globalisasi yang semakin meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Di tengah perkembangan tersebut, salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian serius di masyarakat adalah praktik korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga turut mengganggu dunia pendidikan, baik dari segi kualitas pembelajaran maupun pembentukan karakter peserta didik. Korupsi merupakan salah satu penyakit sosial paling berbahaya yang terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Menurut data Transparency International (2024), skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia masih berada pada angka 34 dari 100, (Saragih & Mulya, 2024) menunjukkan masih tingginya praktik korupsi di berbagai sektor publik maupun swasta. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem hukum dan pengawasan, tetapi juga menjadi cerminan rapuhnya moralitas dan karakter sebagian anggota masyarakat. Dalam konteks ini, korupsi bukan semata-mata masalah hukum, melainkan masalah karakter dan nilai moral yang gagal tertanam dengan kuat sejak dini (Saragih & Mulya, 2024). Oleh karena itu, dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam mencegah perilaku koruptif dengan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial kepada peserta didik sejak di bangku sekolah. Strategi pembelajaran anti korupsi di kelas merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang secara terencana dan terarah untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas kepada peserta didik. Pembelajaran ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui langkah-langkah yang jelas, mulai dari penentuan tujuan, pemilihan metode yang tepat, hingga evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran ini tidak hanya berisi penjelasan mengenai pengertian dan dampak korupsi, tetapi juga menekankan pada pembentukan sikap serta kebiasaan yang baik. Guru berperan sebagai pembimbing yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memberikan teladan melalui perilaku sehari-hari. Melalui cara ini, siswa dapat melihat secara langsung penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab, sehingga lebih mudah dipahami, ditiru, dan dibiasakan dalam kehidupan mereka.

6.1 Pendekatan Reflektif dan Dialogis Dalam Pembelajaran Moral

6.1.1 Konsep Pendekatan Reflektif dan Dialogis

Pendekatan reflektif dan dialogis merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam pembelajaran moral. Model pembelajaran reflektif sangat penting dalam pendidikan karena mendorong siswa untuk mengembangkan kesadaran diri dan keterampilan berpikir kritis. Merenungkan pengalaman dan pembelajaran mereka, siswa dapat menghubungkan teori dengan praktik, mengevaluasi tindakan dan dampaknya, serta memahami nilai-nilai yang mendasari keputusan mereka. Pendekatan ini juga meningkatkan keterlibatan aktif dalam proses belajar, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Selain itu, refleksi membantu siswa dalam membangun kecerdasan emosional dan spiritual, yang esensial untuk perkembangan siswa. Model pembelajaran reflektif berkontribusi pada pembentukan individu yang lebih matang, bertanggung jawab, dan berintegritas. (Savithri, 2025) Pendekatan reflektif berfokus pada proses internal peserta didik, yaitu bagaimana mereka berpikir secara mendalam, mengevaluasi pengalaman, serta menilai suatu tindakan berdasarkan nilai moral. Dalam pandangan John Dewey, berpikir reflektif merupakan proses aktif untuk mengubah pengalaman menjadi pemahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran. (Fleming, 2022) Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran moral tidak cukup hanya menerima informasi, tetapi harus melibatkan proses kesadaran diri.

Paulo Freire adalah seorang pendidik dan filsuf asal Brasil yang dikenal dengan konsep pendidikan berbasis pembebasan. Salah satu gagasan penting yang ia usung adalah pentingnya dialog dalam proses belajar mengajar. Menurut Freire, dialog merupakan interaksi dua arah yang setara antara pendidik dan peserta didik. Lewat dialog, hubungan dalam pendidikan menjadi lebih manusiawi karena tidak hanya memosisikan guru sebagai pemberi materi dan murid sebagai penerima pasif, tetapi melibatkan keduanya dalam proses pembelajaran yang saling berbagi. Konsep ini berangkat dari keyakinannya bahwa pendidikan adalah alat yang seharusnya memungkinkan manusia untuk memahami hidup mereka, mengatasi tantangan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan sosial. (Komariyah, 2025) dalam artian bahwa pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi dalam pembelajaran seperti dialog, diskusi, dan tukar pendapat, peserta didik dapat memahami berbagai sudut pandang serta mengembangkan pemikiran kritis. Menurut Paulo Freire, dialog merupakan inti dari proses pendidikan yang membebaskan, di mana guru dan siswa bersama-sama membangun pengetahuan, bukan sekadar menerima informasi secara pasif (Blake et al., 2003).

6.1.2 Peran Pendekatan Reflektif dan Dialogis dalam Pembentukan Sikap Anti Korupsi

1. Peran pendekatan Reflektif

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan struktural yang tidak hanya berkaitan dengan lemahnya sistem hukum, tetapi juga dengan rendahnya kualitas kesadaran moral dan integritas individu. Meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, praktik korupsi tetap berlangsung secara sistemik dan melibatkan berbagai aktor. Hal ini menunjukkan bahwa

pendekatan represif semata tidak cukup, sehingga diperlukan strategi yang lebih mendalam melalui pendidikan, khususnya yang menyentuh aspek kognitif dan kesadaran moral peserta didik. Setelah menyadari bahwa korupsi tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan aspek kognitif dan kesadaran moral, maka pendidikan menjadi ruang strategis untuk melakukan intervensi yang lebih mendalam. Dalam konteks ini, pendidikan anti korupsi di dalam kelas tidak cukup hanya disampaikan sebagai transfer pengetahuan, melainkan harus dirancang sebagai proses pembelajaran yang mampu membentuk cara berpikir kritis, sikap, serta kesadaran etis peserta didik. Hal ini diperkuat oleh kajian pendidikan anti korupsi yang menekankan bahwa pembelajaran harus bersifat reflektif dan tidak sekadar normatif. Dalam pendekatan ini, peserta didik diajak untuk terlibat dalam diskusi kritis, pemecahan masalah etika, simulasi pengambilan keputusan, serta refleksi moral terhadap realitas sosial yang terjadi di sekitarnya. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun ruang dialog etik yang memungkinkan tumbuhnya kesadaran moral yang otentik dalam diri peserta didik (Asroni, 2025). Pendekatan reflektif dalam pendidikan anti korupsi di kelas berperan penting dalam membentuk kesadaran moral dan integritas peserta didik melalui proses perenungan yang mendalam terhadap nilai, pengalaman, dan realitas sosial. Melalui reflektif, siswa tidak hanya memahami korupsi sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan etika yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Proses ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, mengevaluasi tindakan, serta mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Sejalan dengan pemikiran John Dewey, refleksi merupakan proses berpikir aktif yang memungkinkan seseorang memperoleh makna dari pengalaman yang diambil (Zuhriyah et al., 2025)

2. Peran Pendekatan Dialogis

Pendekatan dialogis memainkan peran krusial dalam pendidikan anti korupsi di kelas dengan mendorong interaksi dua arah antara guru dan siswa, sehingga membangun pemahaman mendalam tentang korupsi serta nilai-nilai anti-korupsi. Pendekatan ini efektif karena melibatkan diskusi kasus nyata, yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Pendekatan dialogis adalah metode pembelajaran interaktif di mana guru dan siswa terlibat dalam percakapan dua arah, tanya jawab, dan analisis kasus untuk mencapai pemahaman bersama. Metode ini menggantikan ceramah satu arah dengan diskusi partisipatif yang mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif tentang isu moral seperti korupsi. (Montessori et al., 2021) Pendekatan ini membangun karakter anti korupsi melalui pemahaman konsekuensi korupsi, pengembangan sikap tolak korupsi, dan komitmen pribadi siswa. Siswa menunjukkan pemahaman tinggi dan keterampilan berpikir kritis kategori tinggi saat mendiskusikan kasus. Mulai dengan proyeksi kasus korupsi nyata, ajukan pertanyaan divergen dari level rendah (mengingat fakta) hingga tinggi (solusi pencegahan), lalu diskusikan secara interaktif. Guru memfasilitasi agar siswa saling bertukar argumen, diikuti komitmen seperti slogan anti-korupsi. Integrasikan ke kurikulum seperti PAI dengan ayat Al-Qur'an tentang amanah dan kejujuran, atau PPKn dengan nilai KPK (kejujuran, tanggung jawab).

3. Hubungan Pendekatan Reflektif dan Dialogis

Pendekatan reflektif dan dialogis saling terkait erat dalam pendidikan, di mana dialog berfungsi sebagai wadah untuk proses refleksi bersama yang mendalam. Hubungan ini membentuk kesatuan refleksi aksi, terutama dalam teori Paulo Freire, yang relevan untuk pendidikan anti-korupsi di kelas. Pendekatan dialogis melibatkan interaksi dua arah guru-siswa untuk memahami realitas bersama, sementara reflektif menekankan introspeksi kritis atas pengalaman dan isu sosial. Menurut Freire, dialog terdiri dari dua dimensi utama: refleksi (berpikir kritis) dan aksi (tindakan nyata), yang membentuk praxis pendidikan. (Husni, 2020). Tanpa refleksi, dialog hanya jadi aktivisme kosong begitu pula sebaliknya tanpa dialog, refleksi kurang mendalam karena kurang interaksi. (Wehr et al., 2025)

6.2 Studi Kasus, Simulasi dan Problem Based Learning

Dalam pendidikan anti korupsi di kelas, metode pembelajaran seperti studi kasus, simulasi, dan Problem Based Learning (PBL) digunakan sebagai pendekatan yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam memahami nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Ketiga metode ini berorientasi pada pengalaman belajar yang kontekstual, sehingga siswa tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga berlatih menghadapi situasi yang mencerminkan realitas sosial.

Secara umum, studi kasus membantu peserta didik memahami fenomena korupsi melalui analisis peristiwa nyata, simulasi memberikan pengalaman langsung melalui situasi tiruan yang mengandung dilema moral, sedangkan Problem Based Learning mengajak siswa untuk memecahkan masalah secara kritis dan kolaboratif (Barrows, 1996). Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Howard S. Barrows yang menekankan pembelajaran berbasis masalah sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta pemikiran Paulo Freire yang menempatkan pembelajaran sebagai proses aktif dan dialogis dalam membangun kesadaran kritis (Freire, 2020)

6.2.1 Studi Kasus

Dalam konteks pendidikan anti korupsi di kelas, studi kasus adalah salah satu metode pembelajaran yang efektif untuk membantu siswa memahami realitas praktik korupsi sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis dan moral mereka. Metode ini mengajak siswa menganalisis suatu peristiwa nyata atau ilustratif yang berkaitan dengan tindakan tidak jujur, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran integritas. Studi kasus merupakan metode penelitian mendalam terhadap suatu peristiwa, individu, kelompok, atau fenomena spesifik dalam konteks kehidupan nyata untuk memahami dinamikanya secara detail. Pendekatan ini sering digunakan dalam ilmu sosial, pendidikan, dan bidang lain untuk menggali penyebab, proses, serta dampak dari kasus tersebut tanpa intervensi peneliti. Stake (1995) menjelaskan Studi Kasus merupakan metode penelitian yang rinci dan mendalam tentang seseorang, sekelompok orang, program, atau sesuatu unit

sosial tertentu di mana peneliti berusaha memahami kegiatan-kegiatan apa yang terjadi dengan menitikberatkan pada kekhususan dan kompleksitasnya dalam suatu lingkungan dan waktu tertentu. (Rahardjo, 2017).

Secara substantif, studi kasus dalam pendidikan anti korupsi menekankan pada analisis nilai dan pengambilan keputusan etis. Peserta didik tidak hanya diminta memahami apakah suatu tindakan termasuk korupsi atau tidak, tetapi juga diajak untuk menelaah:

- alasan terjadinya tindakan tersebut
- nilai-nilai yang dilanggar (kejujuran, tanggung jawab, keadilan)
- dampak yang ditimbulkan, baik bagi individu maupun lingkungan

Melalui proses ini, siswa belajar bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan karakter. Selain itu, pendalaman materi juga mencakup proses berpikir reflektif dan dialogis. Dalam kegiatan studi kasus, siswa didorong untuk: mengemukakan pendapat, mendengarkan sudut pandang orang lain mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi. Dalam praktiknya, pendalaman materi melalui studi kasus dapat diarahkan pada kasus-kasus yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti: penyalahgunaan uang kas kelas, ketidakjujuran dalam mengerjakan tugas, pelanggaran aturan yang merugikan orang lain.

6.2.2 Simulasi

Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Model pembelajaran simulasi dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dari suatu keadaan, penyederhanaan dari suatu fenomena di dunia nyata. (Sinurat, 2019).

Simulasi dalam pendidikan anti korupsi di kelas merupakan metode pembelajaran yang menghadirkan situasi yang menyerupai realitas kehidupan untuk membantu peserta didik memahami dan mengalami secara langsung dinamika perilaku koruptif. Dalam praktiknya, simulasi tidak hanya dipahami sebagai teknik penyampaian materi, tetapi sebagai strategi pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan moral. Pelaksanaan simulasi di kelas dimulai dari perancangan skenario oleh guru yang disesuaikan dengan konteks kehidupan siswa. Skenario tersebut biasanya menggambarkan situasi sederhana namun sarat nilai, seperti pengelolaan uang kas, pembagian tugas kelompok, atau godaan untuk berbuat tidak jujur. Guru kemudian mengarahkan siswa untuk memerankan tokoh-tokoh tertentu dalam skenario tersebut, sehingga mereka dapat merasakan langsung posisi, tanggung jawab, dan tekanan yang mungkin muncul dalam situasi tersebut. Dalam tahap ini, siswa tidak hanya menjalankan peran, tetapi juga mulai membangun pemahaman tentang bagaimana suatu tindakan dapat mengarah pada perilaku koruptif. Selama proses simulasi berlangsung,

interaksi antar siswa menjadi bagian penting dari pembelajaran. Mereka saling merespons, bernegosiasi, bahkan menghadapi konflik yang muncul dari skenario yang dimainkan. Kondisi ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih hidup dibandingkan pembelajaran konvensional, karena siswa tidak hanya berpikir secara kognitif, tetapi juga terlibat secara emosional dan sosial. Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun, simulasi sebagai bagian dari model pembelajaran sosial memungkinkan peserta didik memahami sistem nilai melalui pengalaman langsung dan interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran. (Ahmed, n.d.) Setelah kegiatan simulasi selesai, guru memiliki peran penting dalam memfasilitasi refleksi. Pada tahap ini, siswa diajak untuk mendiskusikan tindakan yang telah mereka ambil, alasan di balik keputusan tersebut, serta konsekuensi yang mungkin terjadi. Refleksi ini menjadi inti dari pembelajaran, karena melalui proses tersebut siswa dapat menghubungkan pengalaman yang diperoleh dengan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Tanpa adanya refleksi, simulasi berisiko hanya menjadi aktivitas bermain peran tanpa makna yang mendalam. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, implementasi simulasi memberikan ruang bagi siswa untuk memahami bahwa tindakan koruptif tidak selalu hadir dalam bentuk besar, tetapi juga dapat muncul dalam situasi sederhana sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan moral yang efektif harus melibatkan pengalaman langsung dan pembiasaan nilai dalam konteks nyata. Dengan demikian, simulasi tidak hanya membantu siswa mengetahui apa itu korupsi, tetapi juga melatih mereka untuk bersikap dan mengambil keputusan yang berintegritas. (Lickona, 1997)

6.2.3 Problem Based Learning

Problem based learning (PBL) adalah metode pembelajaran yang dipicu oleh permasalahan, yang mendorong siswa untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan solusi, berpikir kritis dan analitis, mampu menetapkan serta menggunakan sumber daya pembelajaran yang sesuai. Metode PBL / pemecahan masalah adalah suatu cara pembelajaran dengan menghadapkan siswa kepada suatu problem/masalah untuk dipecahkan atau diselesaikan secara konseptual masalah terbuka dalam pembelajaran. Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada era globalisasi saat ini. (Hotimah, 2020)

Problem Based Learning (PBL) dalam pendidikan anti korupsi di kelas merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada masalah sebagai titik awal proses belajar. Dalam konteks ini, siswa tidak langsung diberikan konsep atau teori tentang korupsi, melainkan dihadapkan terlebih dahulu pada suatu permasalahan nyata atau kontekstual yang berkaitan dengan perilaku tidak jujur, penyalahgunaan tanggung jawab, atau ketidakadilan. Melalui permasalahan tersebut, siswa didorong untuk mencari, memahami, dan membangun sendiri pengetahuan serta nilai-nilai yang relevan. Dalam implementasinya di kelas, guru memulai pembelajaran dengan menyajikan suatu situasi

bermasalah yang dekat dengan kehidupan siswa, misalnya konflik dalam pembagian tugas kelompok, penyalahgunaan kepercayaan, atau tindakan tidak jujur dalam lingkungan sekolah. Permasalahan ini dirancang agar bersifat terbuka, sehingga memungkinkan munculnya berbagai sudut pandang dan solusi dari siswa. Setelah itu, siswa diarahkan untuk mendiskusikan masalah tersebut secara berkelompok, mengidentifikasi inti permasalahan, serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab untuk memahami situasi secara lebih mendalam. Proses pembelajaran kemudian berlanjut pada kegiatan pencarian informasi dan pengembangan solusi. Dalam tahap ini, siswa secara aktif menggali berbagai sumber, berdiskusi, dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya diskusi tanpa mendominasi, sehingga siswa memiliki ruang untuk berpikir kritis dan mandiri. Menurut Barrows, PBL dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui keterlibatan langsung siswa dalam memecahkan masalah yang kompleks dan autentik. (Hmelo-Silver & Barrows, 2015), (Barrows & Tamblyn, 1980). Setelah solusi dirumuskan, siswa mempresentasikan hasil pemikiran mereka dan mendiskusikannya bersama kelas. Pada tahap ini, terjadi proses pertukaran gagasan yang memperkaya pemahaman siswa terhadap suatu permasalahan. Guru kemudian membantu mengarahkan refleksi dengan menekankan nilai-nilai moral yang terkandung dalam solusi yang dihasilkan, serta mengaitkannya dengan konsep anti korupsi. Refleksi ini penting untuk memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berhenti pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada internalisasi nilai. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, PBL memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami bahwa perilaku koruptif sering kali muncul dari situasi yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan. Oleh karena itu, pembelajaran melalui PBL tidak hanya melatih kemampuan kognitif, tetapi juga membentuk sikap kritis dan kesadaran moral. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam satu proses yang utuh. (Hmelo-Silver, 2004)

6.3 Pembelajaran Berbasis Proyek Integritas Sosial

Pembelajaran berbasis proyek (PjBL) merupakan salah satu metodologi yang telah mendapatkan banyak perhatian karena kemampuannya dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa melalui aktivitas yang bersifat praktis dan kolaboratif. (Setyo et al., 2024).

Pembelajaran Berbasis Proyek Integritas Sosial merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan model Project Based Learning (PBL) dengan penanaman nilai-nilai integritas dalam kehidupan sosial peserta didik. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak

hanya mempelajari konsep secara teoritis, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan proyek yang berkaitan dengan permasalahan nyata di lingkungan sosial mereka. Melalui proses tersebut, siswa didorong untuk memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan keadilan dalam tindakan nyata. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pembelajaran berbasis proyek sejalan dengan arah kebijakan Kurikulum Merdeka yang menekankan penguatan Profil Pelajar Pancasila. Profil ini mencakup enam dimensi utama, salah satunya adalah “berakhlak mulia” yang beririsan dengan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui proyek yang kontekstual dan bermakna, peserta didik dapat belajar menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Misalnya ketika mereka mengerjakan proyek sosial, mereka harus mengelola sumber daya secara transparan, menghormati pendapat teman, serta mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka di depan publik. Proses seperti ini berpotensi kuat membentuk kesadaran moral yang lebih mendalam dibandingkan sekedar pembelajaran teoritis yang bersifat hafalan. (Hilalludin & Khaer, 2025)

6.3.1 Tujuan Pembelajaran Berbasis Proyek Integritas Sosial

Untuk mengoptimalkan penerapan pembelajaran berbasis proyek integritas sosial, diperlukan kejelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Secara umum, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran moral peserta didik agar tidak hanya memahami nilai-nilai integritas secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini diarahkan untuk membentuk karakter jujur, tanggung jawab, serta kemampuan mengambil keputusan yang berlandaskan pertimbangan etis. Selain itu, melalui kegiatan proyek yang bersifat kolaboratif, peserta didik juga dilatih untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama, komunikasi, dan empati terhadap lingkungan sekitarnya. (Duck, 1993) Selain itu juga tujuan dari pada pembelajaran berbasis integritas sosial ini yaitu meningkatkan kerja sama kelompok, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, bersama melalui proyek kolaboratif. (Khoerunnisa & Aqwal, 2020), menumbuhkan toleransi, kesadaran keberagaman budaya-agama, serta nilai keadilan dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. (A'rop & Hadi, 2024) mengembangkan keterampilan sosial emosional seperti komunikasi efektif dan pemecahan masalah berbasis isu sosial nyata.

Di samping itu, pembelajaran berbasis proyek integritas sosial juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik. Dengan menghadirkan proyek yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak bersifat abstrak. Peserta didik tidak hanya belajar untuk memenuhi tuntutan akademik, tetapi juga untuk memahami peran mereka sebagai individu yang memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. (Thomas, 2000) Melalui keterlibatan aktif dalam proyek, peserta didik dihadapkan pada situasi yang

menuntut pertimbangan moral, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif dalam menilai suatu tindakan berdasarkan nilai-nilai integritas.

6.3.2 Karakteristik Pembelajaran Berbasis Proyek Integritas Sosial

Pembelajaran berbasis proyek integritas sosial memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari pembelajaran berbasis proyek pada umumnya. Karakteristik ini tidak hanya menekankan pada pencapaian hasil belajar secara kognitif, tetapi juga pada proses internalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tahapan pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran ini bersifat holistik karena mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara simultan. Berikut adapun beberapa karakteristik dari pembelajaran berbasis proyek integritas sosial

- **Sifatnya yang kontekstual dan berbasis permasalahan nyata.** Proyek yang dikembangkan harus berangkat dari fenomena yang dekat dengan kehidupan peserta didik, khususnya yang berkaitan dengan isu integritas sosial seperti ketidakjujuran, kurangnya tanggung jawab, atau rendahnya kepedulian sosial. Dengan menghadirkan masalah yang nyata, peserta didik tidak hanya memahami konsep secara abstrak, tetapi juga mampu melihat relevansi nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.
- **Integrasi nilai dalam proses pembelajaran.** Dalam pembelajaran ini, nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan transparansi tidak diajarkan secara terpisah, melainkan diinternalisasikan melalui pengalaman langsung selama pengerjaan proyek. Peserta didik dituntut untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam setiap aktivitas, seperti dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas, hingga pelaporan hasil kerja. Hal ini menjadikan proses pembelajaran sebagai sarana pembentukan karakter, bukan sekadar transfer pengetahuan.
- **Kolaborasi dan partisipasi aktif.** Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek, sehingga terjadi interaksi sosial yang intensif. Dalam proses ini, mereka belajar untuk berkomunikasi secara efektif, menghargai perbedaan pendapat, serta membangun kesepakatan bersama. Aktivitas kolaboratif ini tidak hanya mengembangkan keterampilan sosial, tetapi juga memperkuat nilai integritas dalam hubungan antarindividu. (Bell, 2010)
- **Proses inkuiri dan pemecahan masalah (problem solving).** Peserta didik didorong untuk mengidentifikasi masalah, mencari informasi, menganalisis data, serta merumuskan solusi yang relevan. Proses ini melatih kemampuan berpikir kritis dan reflektif, terutama dalam menilai suatu permasalahan dari perspektif moral dan etika. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada jawaban benar atau salah, tetapi juga pada pertimbangan nilai dalam setiap keputusan.
- **Berorientasi pada proses dan produk.** Artinya, keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari hasil akhir berupa produk proyek, tetapi juga dari proses yang

dilalui oleh peserta didik. Proses tersebut mencakup bagaimana mereka bekerja secara jujur, bertanggung jawab, serta konsisten dalam menjalankan tugas. Penekanan pada proses ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai integritas benar-benar diinternalisasi dalam diri peserta didik.

- **Refleksi sebagai bagian integral dari pembelajaran.** Refleksi dilakukan secara berkala untuk membantu peserta didik memahami pengalaman belajar yang telah mereka jalani. Melalui refleksi, peserta didik dapat mengevaluasi tindakan mereka, mengidentifikasi nilai-nilai yang telah diterapkan, serta menyadari pentingnya integritas dalam kehidupan sosial. Refleksi juga berperan dalam memperkuat kesadaran moral dan membentuk sikap yang lebih bertanggung jawab. (Schön, 2017)
- **Penilaian autentik dan holistik.** Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik. Guru menilai tidak hanya hasil akhir proyek, tetapi juga proses, partisipasi, sikap, serta konsistensi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai integritas. Penilaian autentik ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang perkembangan peserta didik. (Wiggins, 1998)
- **Peran guru sebagai fasilitator.** Dalam pembelajaran ini, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan, memfasilitasi, dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Sementara itu, peserta didik menjadi subjek aktif yang bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Perubahan peran ini mencerminkan paradigma pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centered learning) (Kemendikbud, 2013)
- **Pembentukan karakter dan perubahan perilaku.** Tujuan akhirnya bukan hanya menghasilkan produk atau menyelesaikan proyek, tetapi juga membentuk peserta didik yang memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran diukur dari sejauh mana peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai integritas secara konsisten dalam berbagai situasi sosial.

6.4 Penilaian Autentik Dalam Pendidikan Nilai.

Istilah penilaian autentik tersusun dari dua kata yaitu penilaian dan autentik. Penilaian (assessment) adalah suatu kegiatan untuk melakukan prosedur pengukuran (kuantitatif) melalui pengujian, pengamatan, pencatatan dan juga pendokumentasian informasi secara langsung atau tidak langsung tentang peserta didik atau program.

Penilaian merupakan proses pengukuran hasil belajar dan monitoring kegiatan pembelajaran di kelas. (Siswono, 2002). Penerapan penilaian pada kurikulum 2013 berbasis kompetensi yang bersifat objektif berdasarkan kinerja siswa. Penilaian pada kurikulum 2013 menekankan pada penilaian proses baik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada setiap aspek penilaian kurikulum 2013 mengfungsikan bahasa

sebagai pengantar pengetahuan antar mata pelajaran. Pada kurikulum 2013 terdapat beberapa kelemahan salah satunya penilaian. Penilaian pada kurikulum 2013 masih bingung untuk dilakukan oleh guru. Sebagian besar guru belum siap dalam pelaksanaan penilaian tersebut, karena kurangnya pembekalan tentang penilaian autentik pada kurikulum 2013. Asesmen autentik merupakan suatu penilaian yang dilakukan melalui penyajian atau penampilan oleh siswa dalam bentuk pengerjaan tugas-tugas atau berbagai aktivitas tertentu yang langsung mempunyai makna pendidikan. (Pantiwati, 2016)

Dalam konteks pendidikan nilai, penilaian autentik memiliki peran yang sangat penting karena mampu mengukur tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan perilaku peserta didik secara lebih komprehensif. Penilaian ini dirancang untuk merefleksikan situasi nyata yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil penilaian tidak hanya menunjukkan tingkat penguasaan materi, tetapi juga sejauh mana nilai-nilai yang diajarkan telah diinternalisasi dan diterapkan dalam tindakan nyata. (Mueller, 2005).

6.4.1 Ciri-ciri Penilaian Autentik

- Berbasis pada tugas yang nyata dan kontekstual.
Penilaian dilakukan melalui aktivitas yang mencerminkan situasi dunia nyata, sehingga peserta didik dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tugas yang diberikan tidak bersifat abstrak, tetapi memiliki makna dan tujuan yang jelas dalam kehidupan sosial.
- Menilai proses dan hasil secara bersamaan.
Dalam penilaian autentik, guru tidak hanya mengevaluasi produk akhir yang dihasilkan oleh peserta didik, tetapi juga memperhatikan bagaimana proses tersebut berlangsung. Aspek seperti keaktifan, kerja sama, tanggung jawab, dan konsistensi menjadi bagian penting dalam penilaian.
- Bersifat holistik
yaitu mencakup berbagai aspek kompetensi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan peserta didik secara menyeluruh.
- Berkesinambungan (continuous assessment).
Penilaian dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung, bukan hanya pada akhir kegiatan. Hal ini memungkinkan guru untuk memantau perkembangan peserta didik secara lebih akurat dan memberikan umpan balik yang konstruktif.
- Menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian.
Penilaian autentik tidak hanya bergantung pada satu bentuk tes, tetapi menggunakan berbagai metode seperti observasi, portofolio, jurnal refleksi, proyek, dan presentasi. Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan peserta didik.

- Berorientasi pada pembelajaran (assessment for learning). Artinya, penilaian tidak hanya digunakan untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan proses pembelajaran. Melalui umpan balik yang diberikan, peserta didik dapat memperbaiki kesalahan dan mengembangkan kemampuan mereka secara berkelanjutan.

6.4.2 Prinsip-Prinsip Penilaian Autentik

Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaannya berlandaskan pada prinsip-prinsip yang jelas dan terarah. Dalam konteks penilaian autentik, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penilaian, di antaranya prinsip keseluruhan (holistik), keseimbangan, dan objektivitas. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai perkembangan peserta didik. Penilaian autentik menuntut guru untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait proses dan hasil belajar siswa. Informasi tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mengalami perkembangan atau justru menghadapi kesulitan dalam pembelajaran. Apabila hasil penilaian menunjukkan adanya hambatan dalam proses belajar, maka guru dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku.

- ❖ Objektivitas, yaitu penilaian harus didasarkan pada standar yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Dengan demikian, hasil penilaian mencerminkan kemampuan peserta didik secara adil dan proporsional. Selain itu, terdapat prinsip terpadu, yang mengharuskan penilaian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terencana, berkelanjutan, serta menyatu dengan aktivitas pembelajaran di kelas.
- ❖ Ekonomis, yang menekankan bahwa penilaian harus dilakukan secara efisien dan efektif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporannya. Hal ini penting agar penilaian tidak membebani guru maupun peserta didik, tetapi tetap memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya, prinsip transparansi menuntut agar seluruh proses penilaian, mulai dari prosedur, kriteria, hingga dasar pengambilan keputusan, dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
- ❖ Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun akademik, baik kepada pihak internal sekolah maupun pihak eksternal. Selain itu, terdapat prinsip edukatif, yang mengandung makna bahwa penilaian tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik dan memotivasi peserta didik agar terus berkembang.

6.4.3 Tujuan Penilaian Autentik

Menurut Daryanto dan Herry Sudjendro menyatakan bahwa penilaian autentik memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu.

2. Menentukan kebutuhan pembelajaran.
3. Membantu dan mendorong siswa.
4. Membantu dan mendorong guru untuk membelajarkan siswa lebih baik.
5. Menentukan strategi pembelajaran
6. Akuntabilitas lembaga.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan.

Tujuan dari penilaian autentik menurut Kunandar diantaranya sebagai berikut

1. Melacak kemajuan siswa.
Guru dapat melacak kemajuan siswa dengan melakukan penilaian. Untuk dapat menilai hasil belajar siswa meningkat ataukah menurun. Selain itu guru juga dapat menyusun profil siswa terkait hasil yang dicapai secara periode
2. Mengecek ketercapaian kompetensi siswa.
Guru dapat melakukannya dengan menggunakan penilaian bagi siswanya apakah sudah mencapai kompetensi sesuai yang diharapkan atau belum. Sehingga dengan mengetahui itu nanti guru mampu mengambil tindakan bagi siswa yang tertinggal yang belum mampu mencapai kompetensi siswa sesuai target
3. Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai siswa.
Guru dapat mendeteksi apa yang belum dikuasai siswa sehingga guru dapat mengambil tindakan tertentu yang sesuai dengan kondisi untuk mencapai kompetensi yang bisa dicapai oleh siswa, baik memperbaiki teknik, taktik, gaya, metode maupun strategi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar yang menarik dan juga mudah dipahami siswa
4. Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa
Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar bagi guru dalam memberikan umpan balik kepada siswa untuk perbaikan siswa yaitu sebagai bahan acuan untuk memperbaiki hasil belajar siswa yang masih rendah. Terkait pengertian dari penilaian autentik diatas dapat dinyatakan bahwa tujuan pendidikan autentik pada dasarnya adalah untuk mengetahui daya serap siswa dalam pembelajaran dan keberhasilan guru dalam pembelajara

Bab 7 PERAN GURU SEBAGAI AGEN MORAL

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai figur moral yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter peserta didik. Sekolah bukan sekadar tempat transfer ilmu pengetahuan, melainkan ruang pembentukan nilai, sikap, dan integritas. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada sejauh mana guru mampu menjalankan perannya sebagai agen moral.

Sebagai agen moral, guru memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial. Peran ini tidak dapat dijalankan hanya melalui teori, melainkan melalui keteladanan, interaksi sehari-hari, serta budaya kelas yang dibangun secara konsisten.

7.1 Guru sebagai teladan Integritas

Guru merupakan figur yang secara langsung diamati dan ditiru oleh peserta didik. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa tidak hanya mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru, tetapi juga memperhatikan bagaimana guru bersikap, berbicara, dan mengambil keputusan. Dalam banyak kasus, perilaku guru justru memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan materi pembelajaran yang disampaikan (Rahmania & Ismiyati, 2018).

Integritas menjadi fondasi utama dalam peran guru sebagai agen moral. Integritas mencerminkan kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Seorang guru yang berintegritas tidak hanya mengajarkan nilai kejujuran, tetapi juga mempraktikkannya secara konsisten dalam berbagai situasi. Hal ini mencakup kejujuran dalam penilaian, keadilan dalam memperlakukan siswa, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas profesional.

Keteladanan guru memiliki dampak yang sangat besar karena peserta didik belajar melalui proses pengamatan dan peniruan. Ketika guru menunjukkan perilaku yang selaras dengan nilai moral, siswa akan lebih mudah memahami dan menginternalisasi nilai tersebut. Sebaliknya, jika terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan, maka pesan moral yang disampaikan akan kehilangan makna (Syah et al., 2024). Integritas guru juga terlihat dalam hal-hal sederhana yang sering dianggap sepele, seperti datang tepat waktu, menepati janji, serta bersikap konsisten dalam menerapkan aturan. Tindakan-tindakan kecil ini secara tidak langsung membentuk budaya sekolah yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab, menjadi teladan integritas bukan hanya sebuah peran formal, tetapi merupakan komitmen moral yang harus dijaga secara terus-

menerus dalam setiap aspek kehidupan profesional guru. Selain itu, integritas guru juga berkaitan erat dengan kemampuan menjaga konsistensi dalam berbagai situasi, termasuk ketika menghadapi tekanan atau kondisi yang tidak ideal. Seorang guru yang berintegritas tetap berpegang pada nilai kebenaran meskipun dihadapkan pada pilihan yang sulit, seperti tekanan dari pihak tertentu atau situasi yang menguji keadilan dalam pengambilan keputusan. Sikap ini menunjukkan bahwa integritas bukan hanya tentang perilaku yang terlihat, tetapi juga tentang prinsip yang dipegang secara teguh. Integritas juga berperan dalam membangun kepercayaan antara guru dan peserta didik. Kepercayaan ini menjadi dasar penting dalam proses pembelajaran, karena siswa akan lebih terbuka, jujur, dan termotivasi ketika mereka merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Guru yang konsisten dalam bersikap akan menciptakan hubungan yang positif, sehingga siswa tidak hanya belajar secara akademik, tetapi juga merasa aman secara emosional. Lebih jauh, integritas guru memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan karakter siswa. Nilai-nilai yang ditanamkan melalui keteladanan akan terbawa dalam kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru tidak berhenti pada ruang kelas, tetapi berkontribusi dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial (Hasan, 2024).

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, integritas guru menjadi titik awal dalam membangun budaya antikorupsi di sekolah. Ketika guru mampu menunjukkan perilaku yang jujur, adil, dan transparan, maka siswa akan lebih mudah memahami bahwa nilai-nilai tersebut bukan sekadar teori, melainkan prinsip hidup yang harus dijalankan. Dengan demikian, integritas guru tidak hanya berdampak pada individu siswa, tetapi juga pada terbentuknya lingkungan sekolah yang bersih dari praktik-praktik yang menyimpang. Integritas guru perlu dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan. Guru perlu memiliki kesadaran diri untuk terus mengevaluasi sikap dan tindakannya, serta memastikan bahwa setiap perilaku yang ditunjukkan selaras dengan nilai moral yang diajarkan (Mas'ud et al., 2025). Proses ini menuntut komitmen, kedewasaan, dan tanggung jawab profesional yang tinggi.

7.1.1 Implementasi Integritas Guru dalam Praktik Sehari-hari

Integritas guru harus diwujudkan secara nyata dalam praktik pendidikan sehari-hari. Nilai-nilai yang diajarkan di dalam kelas akan memiliki makna apabila didukung oleh tindakan yang konsisten dari guru itu sendiri. Oleh karena itu, implementasi integritas menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas guru di mata peserta didik.

Salah satu bentuk implementasi integritas terlihat dalam proses penilaian. Guru dituntut untuk bersikap objektif dan adil, memberikan nilai berdasarkan kemampuan dan usaha siswa, bukan berdasarkan faktor subjektif seperti kedekatan personal. Penilaian yang jujur tidak hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga mengajarkan siswa tentang pentingnya keadilan.

Selain itu, integritas juga tercermin dalam cara guru menggunakan wewenang. Sebagai figur yang memiliki otoritas di dalam kelas, guru perlu menggunakannya secara bijaksana dan etis. Sikap menghargai siswa, tidak bersikap diskriminatif, serta menghindari tindakan yang merendahkan martabat peserta didik merupakan bagian dari implementasi integritas.

Dalam aspek komunikasi, guru yang berintegritas akan bersikap jujur dan terbuka. Ketika terjadi kesalahan, guru tidak ragu untuk mengakuinya dan memperbaikinya. Sikap ini memberikan contoh bahwa mengakui kesalahan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab.

Lebih jauh, integritas juga tercermin dalam konsistensi antara ucapan dan tindakan. Guru yang menekankan pentingnya disiplin harus mampu menunjukkan kedisiplinan dalam kehadiran dan pengelolaan waktu. Ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan dapat menimbulkan kebingungan moral pada siswa (Akbar et al., 2026).

Dengan demikian, implementasi integritas dalam praktik sehari-hari menjadi kunci utama dalam keberhasilan pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah.

7.1.2 Tantangan dalam menjaga integritas Guru

Menjaga integritas merupakan tantangan yang tidak mudah bagi guru. Dalam praktiknya, guru sering dihadapkan pada berbagai situasi yang menguji konsistensi moral mereka. Tantangan ini dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Salah satu tantangan utama adalah beban kerja yang tinggi dan tuntutan administratif yang kompleks. Kondisi ini dapat memengaruhi fokus dan konsistensi guru dalam menjalankan nilai-nilai yang diyakini. Selain itu, tekanan dari lingkungan, seperti permintaan khusus terkait penilaian atau perlakuan tertentu terhadap siswa, juga dapat menjadi ujian bagi integritas guru. Dalam beberapa situasi, guru mungkin dihadapkan pada dilema antara menjaga hubungan sosial dan mempertahankan prinsip moral. Keputusan yang diambil dalam kondisi seperti ini membutuhkan keberanian dan keteguhan hati untuk tetap berpegang pada nilai kebenaran.

Selain itu, kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah juga dapat menjadi hambatan. Jika budaya sekolah tidak mendukung nilai integritas, maka guru akan lebih sulit untuk mempertahankan konsistensinya. Meskipun demikian, tantangan ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan integritas. Sebaliknya, tantangan tersebut perlu dipandang sebagai bagian dari proses profesional yang memperkuat karakter dan komitmen moral guru (Nirwana et al., 2025).

7.2 Kompetensi Pedagogik dan Etika Profesional

Peran guru sebagai agen moral tidak dapat dilepaskan dari kompetensi yang dimilikinya, khususnya kompetensi pedagogik dan etika profesional. Kedua aspek ini menjadi dasar dalam menciptakan pembelajaran yang tidak hanya efektif, tetapi juga

bermakna secara moral. Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan guru dalam memahami karakteristik siswa, merancang pembelajaran, serta mengevaluasi hasil belajar. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, guru perlu mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam materi pembelajaran secara kontekstual.

Pembelajaran yang baik tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengembangan sikap dan nilai. Guru dapat mengaitkan materi pelajaran dengan realitas kehidupan, termasuk isu-isu sosial seperti korupsi, sehingga siswa dapat memahami relevansi nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, etika profesional menuntut guru untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi kode etik. Guru harus bersikap adil, menghargai perbedaan, serta menghindari segala bentuk diskriminasi. Etika profesional juga mencakup komitmen untuk terus meningkatkan kualitas diri. Guru yang profesional tidak hanya mengandalkan pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga terus belajar dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, kompetensi pedagogik dan etika profesional menjadi fondasi penting dalam membentuk guru sebagai agen moral yang efektif.

Selain itu, kompetensi pedagogik guru juga mencakup kemampuan dalam menciptakan pembelajaran yang partisipatif dan reflektif. Guru tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif berpikir, bertanya, dan mengevaluasi nilai-nilai yang mereka pelajari. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan pengalaman hidup mereka. Kemampuan guru dalam memahami karakteristik siswa menjadi hal yang sangat penting dalam proses ini. Setiap siswa memiliki latar belakang, kemampuan, dan cara belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan pendekatan yang fleksibel dan inklusif agar nilai-nilai moral dapat diterima oleh semua siswa secara efektif. Pendekatan yang tepat akan membantu siswa merasa dihargai dan lebih terbuka dalam menerima pembelajaran. Di sisi lain, etika profesional guru juga tercermin dalam konsistensi menjaga sikap dan perilaku di dalam maupun di luar kelas. Guru tidak hanya menjadi panutan di lingkungan sekolah, tetapi juga di tengah masyarakat. Sikap yang mencerminkan tanggung jawab, kedisiplinan, dan kejujuran akan memperkuat citra guru sebagai figur yang layak diteladani (Nainggolan et al., 2025).

Lebih jauh, etika profesional juga menuntut guru untuk menjaga objektivitas dalam setiap keputusan yang diambil. Dalam proses pembelajaran, guru harus mampu memisahkan antara penilaian akademik dan faktor pribadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

Selain itu, komitmen terhadap pengembangan diri menjadi bagian penting dari etika profesional. Guru perlu memiliki kesadaran untuk terus belajar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, serta menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan zaman. Dalam era yang terus berubah, kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar pendidikan tetap relevan. Tidak kalah penting, guru juga perlu memiliki kepekaan moral dalam

menghadapi berbagai situasi di kelas. Kepekaan ini membantu guru dalam mengambil keputusan yang tidak hanya tepat secara akademik, tetapi juga benar secara etis. Dengan demikian, setiap tindakan guru dapat menjadi pembelajaran moral bagi siswa. Dengan adanya keseimbangan antara kompetensi pedagogik dan etika profesional, guru akan lebih mampu menjalankan perannya sebagai agen moral secara utuh. Pembelajaran yang dihasilkan tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter siswa yang berintegritas dan bertanggung jawab.

7.2.1 Integrasi nilai Antikorupsi dalam proses Pembelajaran

Integrasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran merupakan bagian penting dari kompetensi pedagogik guru. Guru tidak hanya menyampaikan materi akademik, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai moral secara kontekstual. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan topik pelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari yang dekat dengan pengalaman siswa. Dalam praktiknya, guru dapat menyisipkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan melalui berbagai metode, seperti studi kasus, diskusi kelompok, maupun refleksi. Misalnya, dalam pembelajaran ekonomi, siswa diajak memahami dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat, sementara dalam pelajaran lain, siswa dapat diajak menganalisis perilaku yang mencerminkan integritas. Pendekatan ini membantu siswa tidak hanya memahami konsep secara kognitif, tetapi juga mengembangkan kesadaran moral. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter (Purwadi, 2019).

7.2.1 Penerapan Etika Profesional

Etika profesional guru tercermin dalam setiap interaksi dengan peserta didik. Guru dituntut untuk bersikap adil, menghargai perbedaan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Sikap ini penting untuk membangun kepercayaan siswa terhadap guru. Dalam praktiknya, penerapan etika profesional dapat dilihat dari cara guru berkomunikasi, memberikan umpan balik, serta menangani perbedaan kemampuan siswa. Guru perlu menghindari sikap diskriminatif dan memperlakukan setiap siswa secara setara. Selain itu, guru juga harus menjaga batas profesional dalam hubungan dengan siswa. Hubungan yang sehat dan proporsional akan membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan moral siswa.

Dengan demikian, etika profesional tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun hubungan yang positif antara guru dan peserta didik.

7.2.3 Penguatan kompetensi Guru melalui Refleksi dan Pengembangan diri

Penguatan kompetensi pedagogik dan etika profesional memerlukan proses pengembangan diri yang berkelanjutan. Guru perlu secara aktif meningkatkan kualitas diri melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, seminar, maupun diskusi dengan sesama guru. Selain itu, refleksi diri menjadi aspek penting dalam pengembangan profesional. Guru

perlu mengevaluasi praktik pembelajaran yang telah dilakukan, termasuk bagaimana nilai-nilai moral telah diintegrasikan. Melalui refleksi, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merancang perbaikan yang lebih efektif. Kolaborasi dengan rekan sejawat juga menjadi sarana yang penting. Dengan berbagi pengalaman dan strategi, guru dapat memperkaya pendekatan dalam mengajar sekaligus memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai profesional.

Dengan demikian, pengembangan diri yang berkelanjutan akan memperkuat peran guru sebagai agen moral yang mampu menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan berintegritas.

7.3 Kepemimpinan Moral dalam Kelas

Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar yang menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pemimpin dalam lingkungan kelas. Kepemimpinan yang dimaksud bukan sekadar kemampuan mengatur jalannya proses belajar, melainkan kemampuan untuk membentuk suasana kelas yang sarat dengan nilai-nilai moral. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, kepemimpinan moral menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembentukan karakter peserta didik. Kepemimpinan moral dalam kelas dapat dipahami sebagai kemampuan guru dalam mempengaruhi sikap, perilaku, dan cara berpikir siswa berdasarkan nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian (Muaddab & Nafisah, 2023).

Guru tidak hanya mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan akademik, tetapi juga membimbing mereka untuk menjadi individu yang memiliki integritas. Salah satu aspek utama dalam kepemimpinan moral adalah penciptaan budaya kelas yang positif. Budaya kelas yang sehat ditandai dengan adanya rasa saling menghargai, keterbukaan, serta kepercayaan antara guru dan siswa. Dalam lingkungan seperti ini, siswa merasa aman untuk menyampaikan pendapat, bertanya, dan mengemukakan ide tanpa takut dihakimi. Keadaan ini penting karena pembelajaran moral membutuhkan ruang dialog yang terbuka. Selain menciptakan budaya kelas yang positif, kepemimpinan moral guru juga tercermin dalam konsistensi dalam menerapkan aturan dan nilai yang telah disepakati bersama. Konsistensi ini penting agar siswa memahami bahwa setiap aturan memiliki makna dan harus dijalankan dengan tanggung jawab. Ketika guru mampu bersikap tegas namun tetap adil, siswa akan belajar bahwa disiplin bukanlah bentuk tekanan, melainkan bagian dari pembentukan karakter. Kepemimpinan moral juga menuntut guru untuk menjadi pendengar yang baik. Dalam proses pembelajaran, tidak semua siswa memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan ruang yang inklusif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk berbicara. Sikap ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri siswa, tetapi juga mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan pandangan. Selain itu, guru perlu mendorong siswa

untuk memiliki kesadaran moral melalui proses refleksi. Refleksi membantu siswa memahami tindakan mereka, menilai apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan nilai yang diajarkan, serta belajar dari pengalaman yang ada. Proses ini penting dalam membentuk karakter yang tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga memahami alasan di baliknya (Taufik & Akip, 2021).

Dalam kepemimpinan moral, guru juga berperan dalam membimbing siswa menghadapi dilema moral. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa sering dihadapkan pada situasi yang menuntut mereka untuk memilih antara benar dan salah. Guru dapat memanfaatkan situasi ini sebagai bahan pembelajaran dengan mengajak siswa berdiskusi dan mempertimbangkan berbagai konsekuensi dari setiap pilihan. Lebih jauh, kepemimpinan moral juga berkaitan dengan kemampuan guru dalam membangun rasa tanggung jawab pada siswa. Guru perlu memberikan kepercayaan kepada siswa untuk mengambil peran dalam kegiatan kelas, seperti bekerja dalam kelompok atau memimpin diskusi. Dengan demikian, siswa belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan keputusan yang mereka ambil. Selain itu, sikap empati menjadi bagian penting dalam kepemimpinan moral. Guru yang mampu memahami kondisi dan perasaan siswa akan lebih mudah membangun hubungan yang harmonis. Hubungan yang baik ini akan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi perkembangan moral siswa.

Kepemimpinan moral dalam kelas tidak hanya berfokus pada pengelolaan pembelajaran, tetapi juga pada pembentukan karakter melalui interaksi yang bermakna. Guru yang mampu menjalankan kepemimpinan moral secara konsisten akan menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk pribadi siswa yang berintegritas dan bertanggung jawab (Abdurahman et al., 2025).

7.3.1 Membangun Budaya kelas berbasis Nilai

Kepemimpinan moral guru dimulai dari kemampuannya membangun budaya kelas yang berlandaskan nilai. Budaya kelas bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang kebiasaan, interaksi, dan suasana yang terbentuk secara konsisten dalam proses pembelajaran. Guru perlu menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghargai. Hal ini dapat dimulai dari kesepakatan kelas yang dibuat bersama siswa, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap aturan tersebut. Ketika siswa dilibatkan, mereka cenderung lebih sadar dan patuh terhadap nilai yang disepakati. Selain itu, budaya positif juga terbentuk melalui kebiasaan sehari-hari, seperti menghargai pendapat teman, tidak menertawakan kesalahan, serta berani mengakui kekeliruan. Guru berperan penting dalam menanamkan kebiasaan ini melalui contoh dan penguatan secara konsisten.

Dengan demikian, budaya kelas berbasis nilai menjadi fondasi utama dalam menumbuhkan karakter siswa secara alami dan berkelanjutan.

7.3.2 Pengambilan Keputusan yang Adil dan Beretika

Dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin, guru sering dihadapkan pada berbagai situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan. Kepemimpinan moral menuntut agar setiap keputusan didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Guru perlu bersikap objektif dalam menilai dan mengambil tindakan, tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti kedekatan personal atau latar belakang siswa. Keputusan yang adil akan membangun kepercayaan siswa terhadap guru dan memperkuat nilai moral yang diajarkan.

Selain itu, dalam memberikan sanksi atau konsekuensi, guru perlu mempertimbangkan aspek edukatif. Tujuan dari tindakan tersebut bukan untuk menghukum semata, tetapi untuk membimbing siswa memahami kesalahan dan memperbaikinya. Pendekatan ini akan membantu siswa berkembang secara moral, bukan sekadar takut terhadap aturan. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang beretika menjadi cerminan nyata dari kepemimpinan moral guru di dalam kelas.

7.3.3 Mendorong dialog dan kesadaran moral siswa

Kepemimpinan moral tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif siswa. Guru perlu membuka ruang dialog yang memungkinkan siswa untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan mendiskusikan isu-isu moral. Melalui dialog, siswa belajar memahami berbagai perspektif serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Diskusi tentang situasi nyata, termasuk masalah sosial seperti korupsi, dapat membantu siswa melihat dampak dari tindakan tidak jujur dan pentingnya integritas.

Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya diskusi agar tetap konstruktif dan berorientasi pada nilai. Dalam proses ini, siswa tidak hanya menerima nilai secara pasif, tetapi membangun pemahaman mereka sendiri secara aktif. Dengan demikian, dialog menjadi sarana penting dalam menumbuhkan kesadaran moral yang lebih mendalam dan bertahan lama.

7.3.4 Penanganan Konflik secara Edukatif dan Berkeadilan

Konflik antar siswa merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan kelas. Namun, cara guru menangani konflik akan sangat menentukan pembelajaran moral yang diperoleh siswa. Sebagai pemimpin moral, guru perlu berperan sebagai mediator yang adil dan bijaksana. Guru tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membantu siswa memahami akar konflik, mengembangkan empati, serta belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Pendekatan yang digunakan harus bersifat edukatif, bukan sekadar menghukum. Guru dapat mengajak siswa berdialog, mendengarkan kedua belah pihak, serta mencari

solusi bersama yang adil. Proses ini mengajarkan nilai keadilan, komunikasi, dan penghargaan terhadap orang lain. Selain itu, penanganan konflik yang baik juga membantu menciptakan rasa aman di dalam kelas. Siswa merasa dihargai dan diperlakukan secara adil, sehingga lebih terbuka dalam berinteraksi. Penanganan konflik secara edukatif menjadi bagian penting dari kepemimpinan moral yang mendukung pembentukan karakter siswa secara menyeluruh (Nabila et al., 2024).

7.4 Pengembangan Profesional Guru Berorientasi Nilai

Dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompleks, guru dituntut untuk terus mengembangkan diri. Pengembangan profesional tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi akademik, tetapi juga dengan penguatan nilai dan etika. Guru perlu mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri seperti pelatihan, seminar, dan workshop yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan antikorupsi. Kegiatan ini membantu guru untuk memperkaya wawasan serta meningkatkan kemampuan dalam mengintegrasikan nilai moral dalam pembelajaran. Selain itu, refleksi diri menjadi bagian penting dalam pengembangan profesional. Guru perlu secara rutin mengevaluasi praktik mengajarnya, termasuk bagaimana nilai-nilai moral telah diterapkan. Kolaborasi dengan sesama guru juga dapat menjadi sarana untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Melalui kerja sama, guru dapat menemukan strategi yang lebih efektif dalam menanamkan nilai antikorupsi kepada siswa. Pengembangan profesional yang berorientasi nilai akan memperkuat peran guru sebagai agen moral. Guru tidak hanya menjadi pengajar yang kompeten, tetapi juga menjadi teladan yang mampu menginspirasi peserta didik. Selain itu, pengembangan profesional guru yang berorientasi nilai juga menuntut adanya kesadaran untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan perkembangan peserta didik. Guru perlu memahami bahwa tantangan yang dihadapi siswa saat ini berbeda dengan masa sebelumnya, sehingga pendekatan pembelajaran juga harus lebih adaptif. Dengan memahami dinamika tersebut, guru dapat merancang pembelajaran yang tidak hanya relevan, tetapi juga mampu menanamkan nilai moral secara lebih efektif. Pengembangan profesional juga berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai ke dalam berbagai aspek pembelajaran, tidak hanya pada materi, tetapi juga dalam metode dan evaluasi. Guru perlu memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama. Dengan demikian, siswa tidak hanya fokus pada pencapaian nilai, tetapi juga pada cara mencapainya secara benar. Selain itu, penting bagi guru untuk membangun kebiasaan belajar sepanjang hayat. Sikap ini mencerminkan bahwa guru tidak berhenti pada satu titik pengetahuan, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Dengan menjadi pembelajar aktif, guru dapat memberikan contoh nyata kepada siswa tentang pentingnya semangat belajar dan keterbukaan terhadap perubahan.

Pengembangan profesional yang berorientasi nilai juga membutuhkan dukungan dari lingkungan sekolah. Budaya sekolah yang mendorong kolaborasi, refleksi, dan inovasi akan membantu guru untuk berkembang secara optimal. Dalam lingkungan yang mendukung, guru akan lebih mudah mengimplementasikan nilai-nilai moral dalam pembelajaran secara konsisten. Lebih jauh, guru juga perlu memiliki komitmen untuk menjaga integritas dalam setiap proses pengembangan diri. Pengembangan profesional bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan upaya sadar untuk meningkatkan kualitas diri demi kepentingan peserta didik. Komitmen ini akan memperkuat posisi guru sebagai figur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter. Pengembangan profesional guru yang berorientasi nilai merupakan proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Proses ini tidak hanya meningkatkan kemampuan mengajar, tetapi juga memperkuat identitas guru sebagai agen moral yang mampu memberikan pengaruh positif dalam pembentukan karakter siswa (Pratama, 2021).

7.4.1 Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan profesional guru dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pelatihan, seminar, dan workshop menjadi sarana penting untuk memperbarui pengetahuan serta meningkatkan keterampilan mengajar. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, guru perlu mengikuti pelatihan yang berfokus pada penguatan nilai karakter, integritas, dan etika. Melalui kegiatan ini, guru tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga strategi praktis untuk mengintegrasikan nilai moral ke dalam pembelajaran.

Mengikuti pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, guru akan lebih siap menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks.

7.4.2 Refleksi Diri sebagai upaya peningkatan Profesionalisme

Refleksi diri merupakan proses penting dalam pengembangan profesional guru. Melalui refleksi, guru dapat mengevaluasi pengalaman mengajar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan perbaikan.

Refleksi tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada penerapan nilai moral dalam pembelajaran. Guru perlu menilai apakah nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan telah tercermin dalam praktik mengajarnya. Melakukan refleksi secara rutin, guru dapat terus berkembang dan menjaga konsistensi dalam menjalankan perannya sebagai agen moral.

7.4.3 Kolaborasi dan Komunitas belajar guru

Kolaborasi antar guru menjadi salah satu strategi efektif dalam pengembangan profesional. Melalui kerja sama, guru dapat saling berbagi pengalaman, bertukar ide, serta mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran. Komunitas belajar guru memberikan ruang untuk mengembangkan praktik terbaik dalam mengintegrasikan

nilai antikorupsi. Diskusi bersama juga membantu guru menemukan solusi yang lebih kreatif dan kontekstual.

Adanya kolaborasi, proses pengembangan profesional tidak dilakukan secara individu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama yang saling mendukung. Selain itu, kolaborasi antar guru juga berperan dalam membangun budaya saling belajar di lingkungan sekolah. Ketika guru terbiasa berdiskusi dan berbagi pengalaman, akan tercipta suasana yang terbuka terhadap ide-ide baru dan perbaikan berkelanjutan. Budaya ini sangat penting untuk mendukung pengembangan profesional yang tidak berhenti pada individu, tetapi berkembang secara kolektif. Komunitas belajar guru juga dapat menjadi wadah refleksi bersama. Melalui diskusi kelompok, guru dapat mengevaluasi praktik pembelajaran yang telah dilakukan, termasuk keberhasilan dan kendala dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral. Dari proses ini, guru dapat memperoleh perspektif baru yang mungkin tidak ditemukan ketika bekerja sendiri, kolaborasi memungkinkan terjadinya pertukaran strategi pembelajaran yang lebih variatif. Setiap guru memiliki pengalaman dan pendekatan yang berbeda, sehingga melalui kerja sama, mereka dapat saling melengkapi dan memperkaya metode pengajaran. Hal ini akan berdampak pada kualitas pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan bagi siswa. Selain itu, komunitas belajar juga dapat memperkuat komitmen moral antar guru. Ketika nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dibahas dan diterapkan secara bersama, maka akan terbentuk kesadaran kolektif yang lebih kuat. Guru tidak hanya menjaga nilai tersebut secara individu, tetapi juga saling mengingatkan dan mendukung dalam penerapannya. Kolaborasi juga memberikan dukungan emosional dan profesional bagi guru dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, tidak semua masalah pembelajaran dapat diselesaikan secara mandiri. Dengan adanya komunitas, guru memiliki tempat untuk berbagi kesulitan dan mencari solusi bersama secara konstruktif. Kolaborasi dan komunitas belajar guru tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan profesional, tetapi juga sebagai ruang untuk memperkuat nilai-nilai moral dalam praktik pendidikan. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, guru dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam membentuk karakter peserta didik.

7.4.4 Pemanfaatan Teknologi dalam Pengembangan Profesional

Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi guru untuk mengembangkan diri. Berbagai platform digital dapat dimanfaatkan untuk mengakses sumber belajar, mengikuti pelatihan daring, serta berbagi praktik baik dengan guru lain. Melalui teknologi, guru dapat memperluas wawasan tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Pemanfaatan teknologi secara bijak akan membantu guru meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat integrasi nilai dalam pembelajaran.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengembangan profesional juga memungkinkan guru untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan. Guru dapat mengakses berbagai sumber belajar seperti jurnal, video pembelajaran, maupun kursus daring yang relevan dengan bidangnya. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan waktu dan kebutuhan belajar sesuai dengan kondisi masing-masing. Teknologi juga membuka peluang bagi guru untuk terhubung dengan komunitas pendidikan yang lebih luas. Melalui forum daring, media sosial pendidikan, atau platform kolaboratif, guru dapat bertukar pengalaman, berbagi strategi pembelajaran, serta mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi. Interaksi ini tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga membantu guru menemukan pendekatan yang lebih inovatif dalam pembelajaran. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan materi yang lebih kontekstual dan menarik. Guru dapat menggunakan video, simulasi, atau studi kasus digital untuk membantu siswa memahami dampak korupsi secara nyata. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Namun, pemanfaatan teknologi juga memerlukan sikap bijak dan bertanggung jawab. Guru perlu memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis, tidak melanggar nilai-nilai moral, serta tetap menjaga kualitas interaksi dengan siswa. Teknologi seharusnya menjadi alat pendukung, bukan pengganti peran guru dalam membimbing dan membangun karakter peserta didik. Kemampuan literasi digital menjadi bagian penting dalam pengembangan profesional guru. Guru perlu mampu memilah informasi yang relevan, menggunakan teknologi secara efektif, serta mengintegrasikannya dalam pembelajaran dengan tujuan yang jelas. Hal ini akan membantu guru tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga memanfaatkannya secara optimal. Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan profesional tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis guru, tetapi juga memperkuat perannya dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif, bermakna, dan tetap berlandaskan nilai-nilai moral.

7.4.5 Komitmen Moral dalam pengembangan diri berkelanjutan

Pengembangan profesional yang berorientasi nilai membutuhkan komitmen moral yang kuat. Guru perlu memiliki kesadaran bahwa peningkatan kualitas diri bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membentuk karakter peserta didik. Komitmen ini tercermin dalam kesediaan untuk terus belajar, terbuka terhadap perubahan, serta konsisten dalam menjunjung tinggi nilai etika. Guru yang memiliki komitmen moral akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan tanpa kehilangan arah. Pengembangan diri yang berkelanjutan tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga memperkuat integritas guru sebagai agen moral dalam pendidikan.

Komitmen moral dalam pengembangan diri juga tercermin dari kemampuan guru untuk menjaga konsistensi antara nilai yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Guru yang memiliki komitmen kuat tidak

hanya berupaya meningkatkan kompetensi, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses pengembangan diri selaras dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Selain itu, komitmen moral mendorong guru untuk tidak mudah merasa puas dengan pencapaian yang telah diraih. Guru yang berorientasi pada nilai akan selalu memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, mengevaluasi kekurangan, dan mencari cara agar dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi peserta didik. Sikap ini menunjukkan bahwa pengembangan diri bukan sekadar kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan profesional dan moral. Komitmen ini juga terlihat dalam kesediaan guru untuk menghadapi perubahan dan tantangan dengan sikap terbuka. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, guru dituntut untuk beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan profesinya. Kemampuan untuk menyeimbangkan antara inovasi dan nilai menjadi indikator penting dari kedewasaan profesional seorang guru.

Lebih jauh, komitmen moral dalam pengembangan diri juga berdampak pada kualitas pembelajaran yang diberikan. Guru yang terus mengembangkan diri akan mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih relevan, kreatif, dan bermakna. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan motivasi belajar siswa sekaligus memperkuat penanaman nilai-nilai moral dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru yang memiliki komitmen moral yang kuat cenderung menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitarnya, baik bagi siswa maupun rekan sejawat. Sikap disiplin, tanggung jawab, dan semangat belajar yang ditunjukkan secara konsisten akan menciptakan pengaruh positif yang meluas. Komitmen moral dalam pengembangan diri berkelanjutan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas individu guru, tetapi juga menjadi kekuatan utama dalam membangun lingkungan pendidikan yang berintegritas. Guru yang mampu menjaga komitmen ini akan tetap relevan dan mampu menjalankan perannya sebagai agen moral secara utuh di tengah berbagai perubahan zaman (Muasyaroh et al., 2026).

Bab 8 Budaya Sekolah Dan Ekosistem Integritas

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan terhadap nilai moral dan etika semakin kompleks. Dunia pendidikan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan peserta didik yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, terutama dalam hal integritas. Integritas menjadi dasar penting dalam membentuk individu yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas. Penanaman ini tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan, aturan, dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Budaya sekolah yang positif akan menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter peserta didik secara menyeluruh.

Ekosistem integritas dalam pendidikan merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat, yang bersama-sama mendukung terbentuknya perilaku jujur dan bertanggung jawab. Sinergi antara ketiga unsur tersebut sangat penting agar nilai-nilai integritas dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya sekolah menjadi faktor utama dalam membangun ekosistem integritas. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan transparansi harus menjadi bagian dari kehidupan sekolah. Budaya yang kuat akan membantu mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dan menciptakan lingkungan belajar yang sehat.

Bab ini akan membahas secara menyeluruh mengenai budaya sekolah dan ekosistem integritas, termasuk peran sekolah, siswa, serta kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat. Diharapkan melalui pembahasan ini, pembaca dapat memahami pentingnya integritas dalam pendidikan serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

8.1 Sekolah Sebagai Komunitas Berintegritas

Sekolah tidak hanya menjadi tempat mengajar dan menerima ilmu, tetapi juga tempat membentuk karakter dan nilai-nilai moral siswa. Dalam pendidikan modern, sekolah dianggap sebagai sebuah komunitas sosial yang memiliki budaya, aturan, dan nilai-nilai yang memengaruhi cara berperilaku semua orang di dalamnya. Salah satu nilai penting yang perlu ditingkatkan di dalam komunitas sekolah adalah integritas.

Integritas di sekolah berarti memiliki nilai, sikap, dan tindakan yang sama, yaitu jujur, bertanggung jawab, konsisten, dan berkomitmen pada prinsip moral. Sekolah yang menjadi komunitas dengan integritas berarti semua anggotanya mulai dari kepala sekolah, guru, staf pendidik, hingga siswa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pembentukan komunitas sekolah yang memiliki integritas tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan melalui proses yang berkelanjutan, seperti pembiasaan, contoh yang baik, dan penguatan budaya sekolah secara terus menerus. Budaya integritas yang baik akan membentuk lingkungan belajar yang positif, tanpa adanya tindakan negatif seperti kecurangan dalam studi, siksaan secara tidak sopan, dan tindakan tidak pantas lainnya (Jamal, n.d.).

Selain itu, sekolah sebagai komunitas yang memiliki integritas juga bertindak sebagai penghalang awal dalam mencegah munculnya perilaku korup di masa depan. Pendidikan tentang integritas sejak usia dini terbukti sangat efektif dalam membentuk generasi yang memiliki karakter kuat serta tanggung jawab dalam hidup berkelompok dan berbangsa.

8.1.1 Pengertian dan Nilai Dasar Integritas di Sekolah

Dari segi konsep, integritas bisa diartikan sebagai sifat moral yang menunjukkan keutuhan diri, kejujuran, serta keselarasan antara perkataan dan tindakan seseorang. Di lingkungan sekolah, integritas tidak hanya dianggap sebagai nilai pribadi, tetapi juga sebagai nilai bersama yang membentuk budaya lembaga tersebut.

Nilai dasar integritas di sekolah mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan fondasi utama integritas. Dalam dunia pendidikan, sikap jujur terlihat dari tindakan seperti tidak mencontek, tidak mengubah nilai secara sembarangan, serta berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Penelitian menunjukkan bahwa mengajarkan nilai jujur secara teratur dalam proses belajar dapat mengurangi tindakan curang di bidang akademik dan meningkatkan tingkat etika siswa.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan benar dan baik. Siswa yang memiliki integritas akan menjalani proses belajar dengan tanggung jawab, sedangkan guru wajib melaksanakan tugas profesional dengan jujur dan adil.

3. Konsistensi

Integritas membutuhkan keselarasan antara nilai-nilai yang dipercayai dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam lingkungan sekolah, konsistensi ini terasa dari cara aturan diterapkan secara adil dan tidak membedakan.

4. Disiplin dan Komitmen Moral

Integritas juga melibatkan disiplin dalam mematuhi aturan dan komitmen terhadap nilai-nilai moral yang dianut. Sekolah perlu membangun sistem yang mendorong murid-murid berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku (Auliyairrahmah et al., 2021).

Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga dihayati melalui aktivitas sehari-hari, kebiasaan yang dibentuk, serta lingkungan sekolah yang dibangun. Menerapkan nilai integritas secara efektif membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang mencakup aspek berpikir, perasaan, dan tindakan siswa.

8.1.2 Peran Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai Teladan Integritas

Guru dan staf pendidik berperan penting dalam membentuk budaya integritas di sekolah. Mereka bukan hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi contoh atau panutan bagi para siswa. Peran guru dalam membentuk integritas bisa dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1. Sebagai Teladan (Role Model)

Guru adalah orang yang sangat penting dalam hidup siswanya. Perilaku guru yang jujur, adil, dan bertanggung jawab bisa menjadi contoh yang nyata bagi siswa dalam membentuk sikap dan karakter mereka. Penelitian menyatakan bahwa contoh yang diberikan oleh guru menjadi faktor penting dalam mendarah-daraskan nilai integritas (Prasetya & Taufan, n.d.)

2. Sebagai Fasilitator Pembelajaran Nilai

Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai moral dalam kegiatan belajar mengajar. Ini bisa dilakukan dengan mendiskusikan kasus, melakukan refleksi, atau belajar berdasarkan nilai-nilai yang ada.

3. Sebagai Pembimbing dan Pengarah

Guru membantu siswa agar bisa memahami perbedaan antara tindakan yang baik dan tidak baik. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan pemikiran, tetapi juga memperhatikan perasaan dan hubungan sosial siswa.

4. Sebagai Pengelola Lingkungan Kelas

Lingkungan kelas yang nyaman sangat penting untuk membantu pembentukan integritas. Guru perlu menciptakan suasana yang menghargai kejujuran, sikap terbuka, dan saling hormat satu sama lain.

Selain para guru, para tenaga pendidik seperti kepala sekolah dan staf administrasi juga memiliki peran yang sangat penting. Mereka perlu memastikan bahwa sistem dan kebijakan sekolah membantu mewujudkan nilai integritas, seperti cara terbuka dalam mengurus urusan administrasi dan perlakuan adil dalam memberikan pelayanan.

Penelitian juga menunjukkan bahwa guru tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan, tetapi juga menjadi contoh yang baik dalam kehidupan, dengan menunjukkan nilai-nilai seperti jujur, bertanggung jawab, dan adil dalam setiap kegiatan pembelajaran (Tefbana & Saingo, n.d.).

8.1.3 Budaya Kejujuran dalam Proses Pembelajaran Mendukung Perilaku Etis

Budaya kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam membangun ekosistem integritas di sekolah. Budaya ini tidak hanya terbentuk melalui aturan, tetapi juga melalui pembiasaan dan pengalaman langsung dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, budaya kejujuran dapat dikembangkan melalui berbagai strategi, antara lain:

1. Integrasi Nilai Kejujuran dalam Kurikulum

Nilai kejujuran perlu diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran, baik secara eksplisit maupun implisit. Guru dapat menyisipkan nilai-nilai tersebut dalam materi pembelajaran maupun metode evaluasi.

2. Pembiasaan melalui Program Sekolah

Salah satu contoh nyata adalah program “kantin kejujuran”, di mana siswa dilatih untuk membeli dan membayar secara mandiri tanpa pengawasan langsung. Program ini terbukti efektif dalam menanamkan nilai kejujuran melalui praktik langsung (Auliyairrahmah et al., 2021).

3. Penegakan Aturan yang Adil

Sekolah harus menerapkan aturan yang tegas terhadap pelanggaran kejujuran, seperti menyontek atau plagiarisme. Namun, penegakan aturan harus dilakukan secara edukatif, bukan represif.

4. Pembelajaran Berbasis Nilai (Value-Based Learning)

Pendekatan ini menekankan pada pengembangan kesadaran moral siswa melalui diskusi, studi kasus, dan refleksi diri. Siswa diajak untuk memahami konsekuensi dari perilaku tidak jujur.

5. Lingkungan Sosial yang Mendukung

Budaya kejujuran akan berkembang apabila seluruh warga sekolah memiliki komitmen yang sama terhadap nilai tersebut. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat internalisasi nilai dalam diri siswa.

Penelitian menunjukkan bahwa pembentukan budaya kejujuran tidak hanya berdampak pada perilaku individu, tetapi juga menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat dan kondusif untuk pembelajaran.

Lebih jauh lagi, budaya kejujuran dalam pembelajaran berperan penting dalam membentuk perilaku etis siswa, yang nantinya akan terbawa hingga kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi.

8.2 Tata Kelola Sekolah yang Transparan

Tata kelola sekolah yang transparan merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berintegritas. Transparansi dalam pengelolaan sekolah tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi pendidikan terhadap kejujuran, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Dalam konteks pendidikan, tata kelola yang transparan mengacu pada proses pengelolaan sumber daya sekolah baik sumber daya manusia, keuangan, maupun administrasi yang dilakukan secara terbuka, dapat diakses oleh pemangku kepentingan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, terutama dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah, khususnya dalam pengelolaan dana pendidikan, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (Juniarsih et al., 2025).

Selain itu, tata kelola sekolah yang baik (good governance) menuntut adanya keterlibatan berbagai pihak, seperti komite sekolah dan orang tua, dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya tentang membuka informasi, tetapi juga tentang menciptakan partisipasi yang aktif dan kolaboratif dalam pengelolaan pendidikan.

8.2.1 Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Sekolah

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam manajemen sekolah yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

1. Prinsip Transparansi

Transparansi dalam manajemen sekolah berarti seluruh proses pengelolaan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sekolah. Dalam praktiknya, transparansi dapat diwujudkan melalui:

- Penyampaian informasi secara terbuka kepada orang tua dan masyarakat
- Publikasi laporan kegiatan dan keuangan sekolah
- Keterlibatan komite sekolah dalam pengambilan keputusan (Simanjuntak et al., 2024)

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban sekolah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan penggunaan sumber daya yang

dimiliki. Akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral. Bentuk akuntabilitas dalam manajemen sekolah meliputi:

- Penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang sistematis
- Audit internal dan eksternal
- Evaluasi kinerja secara berkala

Dengan adanya akuntabilitas, sekolah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan serta tidak menyimpang dari aturan yang berlaku (Juniarsih et al., 2025)

8.2.2 Sistem Administrasi dan Pelaporan yang Terbuka

Sistem administrasi dan pelaporan merupakan bagian penting dalam mendukung transparansi sekolah. Sistem ini mencakup pengelolaan data, pencatatan kegiatan, serta penyusunan laporan yang dapat diakses oleh pihak terkait. Administrasi yang terbuka berarti:

- Data sekolah tersedia secara jelas dan akurat
- Informasi dapat diakses oleh pemangku kepentingan
- Proses administrasi dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi

Pelaporan yang terbuka juga menjadi indikator penting dalam tata kelola sekolah yang baik. Laporan tidak hanya disusun sebagai formalitas, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang transparan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. (Suharsono et al., 2025)

Selain itu, keterbukaan dalam pelaporan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan sekolah.

8.2.3 Pengelolaan Keuangan Sekolah yang Jujur dan Bertanggung Jawab

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan aspek yang sangat sensitif dan krusial dalam tata kelola pendidikan. Keuangan sekolah harus dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab agar dapat mendukung keberlangsungan dan kualitas pendidikan. Pengelolaan keuangan yang baik meliputi:

- Perencanaan anggaran yang jelas
- Penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan
- Pelaporan keuangan yang transparan
- Pengawasan yang ketat

Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah dapat mencegah penyalahgunaan dana serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan(Adzkie et al., n.d.).

Selain itu, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan juga memungkinkan adanya partisipasi dari orang tua dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana sekolah. Hal ini akan menciptakan sistem pengelolaan yang lebih akuntabel dan terpercaya.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi salah satu contoh penting yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Publikasi laporan penggunaan dana BOS merupakan bentuk nyata dari komitmen sekolah terhadap prinsip integritas(Hakim & Enjelita, 2025).

8.3 Partisipasi Siswa dalam Gerakan Anti Korupsi

Partisipasi siswa dalam gerakan anti korupsi merupakan bagian penting dari upaya preventif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Korupsi tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai persoalan moral dan budaya yang harus ditangani melalui pendidikan sejak dini. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku anti korupsi melalui keterlibatan aktif siswa(Wati, 2019a).

Siswa tidak hanya berperan sebagai objek pendidikan, tetapi juga sebagai subjek atau agen perubahan (agent of change) yang mampu menyebarkan nilai-nilai integritas dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam pendidikan anti korupsi dapat membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, sehingga mampu mencegah perilaku koruptif di masa depan .

Selain itu, pendidikan anti korupsi yang melibatkan partisipasi siswa secara langsung terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran moral dan sikap kritis terhadap praktik-praktik tidak etis di lingkungan sekitar .

8.3.1 Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Sekolah

Pendidikan anti korupsi merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial kepada peserta didik. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep korupsi, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sekolah, pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan melalui berbagai cara, antara lain:

1. Integrasi dalam Kurikulum

Pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Melalui pembelajaran ini,

siswa diajak untuk memahami dampak negatif korupsi serta pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab(Wardana et al., 2025).

2. Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran anti korupsi sebaiknya menggunakan pendekatan kontekstual, seperti studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi. Pendekatan ini membantu siswa memahami realitas korupsi dalam kehidupan nyata dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

3. Pembiasaan Nilai dalam Kehidupan Sekolah

Nilai-nilai anti korupsi perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, seperti: Tidak menyontek, Tidak memanipulasi data, Bersikap jujur dalam setiap aktivitas

4. Pendekatan Multiliterasi Digital

Dalam era digital, pendidikan anti korupsi juga dapat dikembangkan melalui media digital, seperti video pembelajaran, aplikasi edukatif, dan platform daring. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan sikap anti korupsi siswa secara signifikan(Al-zainuri, n.d.)

8.3.2 Peran Organisasi Siswa dalam Menanamkan Nilai Integritas

Organisasi siswa, seperti OSIS dan ekstrakurikuler lainnya, memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai integritas di lingkungan sekolah. Organisasi ini menjadi wadah bagi siswa untuk belajar berorganisasi, bekerja sama, serta mengembangkan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai moral. Peran organisasi siswa dalam gerakan anti korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai Media Internalisasi Nilai

Organisasi siswa menjadi ruang bagi siswa untuk mempraktikkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam kegiatan organisasi, seperti dalam pengelolaan program kerja dan keuangan organisasi.

2. Sebagai Agen Perubahan

Siswa yang aktif dalam organisasi memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam menyebarkan nilai anti korupsi kepada teman sebaya. Mereka dapat menjadi contoh dalam berperilaku jujur dan bertanggung jawab(Wati, 2019b)

3. Pelaksana Program Anti Korupsi

Organisasi siswa dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendukung pendidikan anti korupsi, seperti: Kampanye kejujuran, Seminar dan diskusi tentang integritas, Poster atau media edukasi anti korupsi

4. Penguatan Budaya Sekolah

Melalui kegiatan organisasi, siswa dapat berkontribusi dalam membangun budaya sekolah yang berintegritas, seperti menciptakan lingkungan yang menolak segala bentuk kecurangan.

8.3.3 Kegiatan Ekstrakurikuler Berbasis Nilai Kejujuran dan Tanggung Jawab

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu sarana efektif dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi secara praktis dan kontekstual. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga mengalami langsung proses pembentukan karakter. Ekstrakurikuler berbasis nilai kejujuran dan tanggung jawab memiliki beberapa peran penting, yaitu:

1. Pengembangan Karakter melalui Aktivitas Nyata

Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, dan olahraga mengajarkan nilai-nilai: Disiplin, Tanggung jawab, Kerja sama, Kejujuran. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan PMR mampu membentuk nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sebagai bagian dari pendidikan anti korupsi (Sari et al., 2021).

2. Pembiasaan Nilai Kejujuran

Program seperti kantin kejujuran menjadi contoh konkret dalam melatih siswa untuk berperilaku jujur tanpa pengawasan langsung. Kegiatan ini membantu siswa menginternalisasi nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pembentukan Sikap Tanggung Jawab

Dalam kegiatan ekstrakurikuler, siswa diberikan tanggung jawab tertentu, seperti mengelola kegiatan atau menjadi pengurus. Hal ini melatih siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

4. Penguatan Nilai Sosial dan Kepedulian

Kegiatan sosial dalam ekstrakurikuler, seperti bakti sosial atau kegiatan kemanusiaan, dapat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, yang merupakan bagian dari nilai anti korupsi.

5. Integrasi Nilai Anti Korupsi dalam Kegiatan Non-Akademik

Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan tidak hanya melalui pembelajaran formal, tetapi juga melalui kegiatan non-akademik dan pembiasaan di sekolah. Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler menjadi sarana yang sangat efektif dalam membangun karakter siswa yang berintegritas, karena memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan nilai-nilai tersebut.

8.4 Kolaborasi Sekolah, Keluarga dan masyarakat

Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas. Pendidikan karakter, termasuk pendidikan anti korupsi, tidak dapat hanya dilakukan oleh sekolah, tetapi memerlukan dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sinergi antara ketiga elemen ini akan menciptakan lingkungan yang konsisten dalam menanamkan nilai-nilai integritas. Ketidakkonsistenan antara nilai yang diajarkan di sekolah dan yang diterapkan di rumah dapat menghambat proses pembentukan karakter siswa. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah (Christien Yunique Kournukova Pardede, 2025a).

8.4.1 Peran Keluarga dalam Menanamkan Nilai Integritas Sejak Dini

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. Nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin pertama kali diperkenalkan dalam lingkungan keluarga. Peran keluarga dalam menanamkan nilai integritas meliputi: Memberikan teladan perilaku jujur, Membiasakan anak untuk bertanggung jawab, Menanamkan nilai moral sejak dini. Penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai anti korupsi harus dimulai sejak usia dini melalui proses yang berkelanjutan dalam lingkungan keluarga. Keluarga yang konsisten dalam menerapkan nilai-nilai integritas akan membentuk karakter anak yang kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan moral di masa depan.

8.4.2 Sinergi Sekolah dan Orang Tua dalam Pendidikan Karakter

Sinergi antara sekolah dan orang tua sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan karakter. Sekolah dan keluarga harus memiliki visi dan tujuan yang sama dalam menanamkan nilai integritas kepada siswa. Bentuk sinergi ini dapat diwujudkan melalui: Komunikasi yang intens antara guru dan orang tua, Keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah, Program parenting education

Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara sekolah dan keluarga mampu meningkatkan efektivitas pendidikan karakter serta memperkuat internalisasi nilai-nilai moral pada siswa (Christien Yunique Kournukova Pardede, 2025b). Dengan adanya sinergi yang baik, siswa akan mendapatkan penguatan nilai yang konsisten baik di sekolah maupun di rumah.

8.4.3 Keterlibatan Masyarakat dalam Membangun Budaya Integritas

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembentukan budaya integritas. Lingkungan sosial yang positif akan memperkuat nilai-nilai yang telah diajarkan di sekolah dan keluarga. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui:

- Program edukasi anti korupsi di lingkungan masyarakat
- Kegiatan sosial yang melibatkan siswa
- Dukungan terhadap program sekolah

Penelitian menunjukkan bahwa edukasi anti korupsi yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran kolektif serta membangun budaya integritas yang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pendidikan, tetapi juga mitra aktif dalam membangun karakter generasi muda.

Bab 9 Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik

Pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan Indonesia dipahami sebagai bagian dari upaya membangun integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan nilai yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan tanggung jawab individu dalam mengelola kepentingan publik. Perspektif kebijakan publik menempatkan pendidikan sebagai sarana strategis untuk membentuk kesadaran etika dan moral generasi muda melalui proses pembelajaran yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap kepentingan bersama. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun karakter warga negara yang mampu menolak praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pendidikan karakter nasional menjadi landasan utama dalam penguatan pendidikan antikorupsi di Indonesia. Kebijakan ini menempatkan pembentukan nilai moral sebagai bagian penting dari proses pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan integritas. Sistem pendidikan diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sebagai bagian dari karakter warga negara yang demokratis. Proses tersebut menegaskan bahwa pembentukan budaya antikorupsi membutuhkan pendekatan pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan.

Pembahasan pada bagian ini diarahkan pada empat aspek utama yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi dalam perspektif kebijakan publik. Uraian dimulai dari kebijakan pendidikan karakter nasional sebagai dasar pembentukan nilai integritas dalam sistem pendidikan. Pembahasan selanjutnya menyoroti regulasi dan implementasi pendidikan antikorupsi dalam praktik pendidikan, peran

lembaga negara dan masyarakat sipil dalam mendukung pembentukan budaya antikorupsi, serta tantangan implementasi kebijakan di tingkat lokal dan nasional yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya dalam sistem pendidikan Indonesia.

9.1 Kebijakan Pendidikan Karakter Nasional

Kebijakan pendidikan karakter nasional merupakan strategi negara dalam membangun kualitas manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan tanggung jawab sosial. Pendidikan karakter ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional untuk membentuk perilaku warga negara yang berlandaskan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan publik. Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk orientasi nilai yang memengaruhi perilaku individu dalam kehidupan sosial dan politik (Yuliani & Muslim, 2024).

Kebijakan pendidikan karakter nasional di Indonesia memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi pendidikan yang menempatkan nilai karakter sebagai inti dari proses pembelajaran. Program penguatan pendidikan karakter menekankan integrasi nilai moral dalam seluruh aktivitas pendidikan, baik dalam kurikulum formal maupun kegiatan ekstrakurikuler. Integrasi tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendorong pembentukan sikap etis dan tanggung jawab sosial pada peserta didik (Prabowo, Hamaminata, Guntur, & Fahrozi, 2023).

Pendidikan karakter dalam konteks kebijakan publik berkaitan dengan upaya negara membangun budaya integritas dalam masyarakat. Pendekatan ini memandang bahwa perilaku korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural, tetapi juga oleh nilai yang berkembang dalam masyarakat. Pendidikan karakter diposisikan sebagai instrumen

sosial yang mampu menanamkan kesadaran moral terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan etika dalam kehidupan publik (Uttamo & Zainuddin, 2023).

Implementasi kebijakan pendidikan karakter dilakukan melalui integrasi nilai moral dalam berbagai mata pelajaran, termasuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata pelajaran ini memiliki peran strategis karena berorientasi pada pembentukan kesadaran kewarganegaraan yang demokratis dan beretika. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep kewarganegaraan, tetapi juga pada penginternalisasian nilai integritas dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari (Nurtisna & Zainil, 2025).

Penguatan pendidikan karakter juga berkaitan dengan upaya membangun budaya integritas dalam institusi pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi berfungsi sebagai ruang sosial yang membentuk kebiasaan moral melalui interaksi antara pendidik dan peserta didik. Lingkungan pendidikan yang menekankan transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dapat menciptakan pengalaman sosial yang memperkuat nilai antikorupsi dalam kehidupan peserta didik (Gautama, 2025).

Kebijakan pendidikan karakter tidak hanya menekankan dimensi kognitif, tetapi juga melibatkan dimensi afektif dan perilaku. Pendidikan karakter dirancang untuk membangun kesadaran moral yang mendorong individu bertindak secara etis dalam berbagai situasi sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembentukan karakter memerlukan proses pembelajaran yang melibatkan refleksi nilai, pengalaman sosial, dan keteladanan dalam lingkungan pendidikan (Yuliani & Muslim, 2024).

Pendidikan karakter nasional juga menempatkan integritas sebagai nilai fundamental dalam pembentukan warga negara yang bertanggung jawab. Integritas dipahami sebagai keselarasan antara nilai, sikap, dan tindakan dalam kehidupan sosial. Pendidikan yang menanamkan nilai integritas sejak dini dapat memperkuat kesadaran etis dalam pengelolaan

kepentingan publik dan mengurangi kecenderungan perilaku koruptif di masa depan (Alfaruki, 2024).

Pengembangan kebijakan pendidikan karakter juga dipengaruhi oleh dinamika global yang menekankan pentingnya pendidikan nilai dalam pembangunan masyarakat demokratis. Sistem pendidikan modern tidak hanya menilai keberhasilan dari aspek akademik, tetapi juga dari kemampuan individu untuk berpartisipasi secara etis dalam kehidupan publik. Pendidikan karakter berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat kualitas demokrasi melalui pembentukan warga negara yang berintegritas (Prabowo et al., 2023).

Implementasi pendidikan karakter dalam kebijakan pendidikan nasional membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat memiliki peran dalam membangun lingkungan sosial yang konsisten dengan nilai moral yang diajarkan di sekolah. Kolaborasi tersebut menciptakan proses pembelajaran nilai yang lebih efektif karena peserta didik memperoleh pengalaman moral yang berkelanjutan dalam berbagai konteks sosial (Uttamo & Zainuddin, 2023).

Kebijakan pendidikan karakter nasional juga memberikan ruang bagi inovasi pedagogi dalam pembelajaran nilai. Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, diskusi etika, dan analisis kasus sosial dapat membantu peserta didik memahami implikasi moral dari berbagai tindakan dalam kehidupan publik. Model pembelajaran semacam ini memperkuat kemampuan reflektif peserta didik dalam menghadapi dilema moral yang berkaitan dengan praktik korupsi (Nurtisna & Zainil, 2025).

Perkembangan kebijakan pendidikan karakter menunjukkan bahwa integrasi nilai antikorupsi dalam sistem pendidikan tidak hanya dilakukan melalui kurikulum formal. Program pendidikan informal dan kegiatan kampanye integritas juga menjadi bagian dari strategi pembentukan budaya antikorupsi. Kegiatan tersebut berfungsi memperluas pengalaman sosial

peserta didik dalam memahami nilai transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan publik (Gautama, 2025).

Pendekatan kebijakan publik dalam pendidikan karakter menekankan pentingnya konsistensi antara regulasi, kurikulum, dan praktik pendidikan di lapangan. Kebijakan yang dirancang secara sistematis dapat menciptakan kerangka institusional yang mendukung internalisasi nilai integritas dalam proses pendidikan. Konsistensi kebijakan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan pendidikan karakter dalam jangka panjang (Yuliani & Muslim, 2024).

Pendidikan karakter nasional juga berkaitan dengan penguatan kesadaran etika dalam tata kelola pemerintahan. Generasi muda yang memperoleh pendidikan nilai sejak dini diharapkan mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi secara bertanggung jawab. Pendidikan yang menanamkan kesadaran moral terhadap kepentingan publik dapat memperkuat komitmen terhadap prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Alfaruki, 2024)

Pembentukan karakter antikorupsi melalui kebijakan pendidikan nasional membutuhkan pendekatan yang adaptif terhadap perubahan sosial. Tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika politik menuntut sistem pendidikan untuk terus memperbarui strategi pembelajaran nilai. Pendidikan karakter yang responsif terhadap perubahan sosial dapat memperkuat relevansi nilai integritas dalam kehidupan masyarakat modern (Prabowo et al., 2023)

Pendidikan karakter nasional memberikan fondasi normatif bagi integrasi pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan Indonesia. Integrasi tersebut menempatkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan publik sebagai bagian dari identitas moral warga negara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui

pembentukan karakter generasi muda dalam sistem pendidikan (Uttamo & Zainuddin, 2023).

Peran institusi pendidikan dalam kebijakan pendidikan karakter menjadi semakin penting dalam konteks pembangunan nasional. Sekolah dan perguruan tinggi berfungsi sebagai ruang sosial yang memfasilitasi proses internalisasi nilai integritas melalui interaksi akademik dan sosial. Lingkungan pendidikan yang menekankan nilai moral dapat membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya perilaku etis dalam kehidupan publik (Nurtisna & Zainil, 2025).

Pendidikan karakter juga berfungsi sebagai strategi jangka panjang dalam pembangunan budaya antikorupsi. Pembentukan nilai integritas melalui pendidikan memungkinkan masyarakat memiliki kesadaran moral yang lebih kuat terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan. Proses pendidikan yang berorientasi pada nilai dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam menolak praktik korupsi dalam berbagai sektor kehidupan (Gautama, 2025).

Pendekatan kebijakan pendidikan karakter menekankan pentingnya pembelajaran reflektif dalam pembentukan nilai. Peserta didik perlu memahami implikasi sosial dari perilaku koruptif serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesadaran tersebut dapat mendorong terbentuknya sikap kritis terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam kehidupan publik (Yuliani & Muslim, 2024).

Penguatan pendidikan karakter nasional mencerminkan komitmen negara dalam membangun masyarakat yang berintegritas. Sistem pendidikan menjadi ruang strategis untuk menanamkan nilai etika publik yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih. Pendidikan yang menempatkan integritas sebagai nilai fundamental dapat memperkuat kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (Alfaruki, 2024).

Perkembangan kebijakan pendidikan karakter menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari strategi pembangunan manusia yang berorientasi pada nilai. Integrasi nilai moral dalam pendidikan diharapkan mampu membentuk generasi warga negara yang memiliki kesadaran etika dalam pengelolaan kepentingan publik. Pendidikan yang menekankan integritas dan tanggung jawab sosial memberikan kontribusi penting dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan dalam masyarakat (Prabowo et al., 2023; Gautama, 2025).

9.2 Regulasi dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan antikorupsi tidak dapat dilepaskan dari peran kebijakan publik dalam mengarahkan sistem pendidikan menuju pembentukan karakter yang berintegritas. Pendidikan antikorupsi menjadi bagian dari strategi preventif dalam mencegah praktik korupsi melalui pembentukan kesadaran etika, tanggung jawab publik, dan kepatuhan terhadap norma hukum. Sistem pendidikan memiliki posisi penting dalam menanamkan nilai kejujuran dan integritas kepada peserta didik agar mereka mampu memahami konsekuensi sosial dari perilaku koruptif dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan pendidikan antikorupsi tidak hanya berkaitan dengan penyusunan regulasi, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam proses pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Proses implementasi mencakup integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum, pengembangan metode pembelajaran yang mendorong kesadaran etika, serta pembentukan budaya akademik yang mendukung praktik kejujuran dan tanggung jawab. Analisis mengenai regulasi dan implementasi pendidikan antikorupsi dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama yang berkaitan dengan kerangka kebijakan, penguatan kurikulum, praktik pendidikan, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan.

9.2.1 Landasan Regulasi Pendidikan Anti Korupsi

Regulasi pendidikan antikorupsi di Indonesia berkembang sebagai bagian dari kebijakan publik yang menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan integritas warga negara. Kerangka regulasi ini berkaitan dengan kebijakan pendidikan nasional yang menekankan pentingnya penguatan nilai karakter dalam proses pendidikan. Pendidikan antikorupsi dipahami sebagai upaya sistematis untuk membangun kesadaran etika mengenai tanggung jawab publik dan kepatuhan terhadap norma hukum melalui kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan (Prabowo, Hamaminata, Guntur, & Fahrozi, 2023).

Kebijakan pendidikan nasional memberikan arah bagi integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan. Integrasi tersebut dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter serta pembelajaran yang menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Regulasi ini bertujuan memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan integritas dalam kehidupan sosial (Yuliani & Muslim, 2024).

Pengembangan regulasi pendidikan antikorupsi juga berkaitan dengan upaya pemerintah membangun budaya integritas dalam masyarakat. Sistem pendidikan berperan dalam menanamkan nilai moral yang dapat memengaruhi cara individu memandang kepentingan publik. Regulasi pendidikan memberikan kerangka normatif bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang mendorong peserta didik memahami dampak sosial dari praktik korupsi (Alfaruki, 2024).

9.2.2 Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum

Integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum merupakan bagian dari strategi kebijakan publik untuk memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan memberikan ruang bagi pengembangan materi yang berkaitan dengan nilai integritas, etika publik, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Proses pembelajaran tersebut bertujuan

membantu peserta didik memahami hubungan antara perilaku individu dan kepentingan masyarakat secara luas (Prabowo et al., 2023).

Pembelajaran pendidikan antikorupsi banyak diintegrasikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata pelajaran ini memiliki fokus pada pembentukan kesadaran kewarganegaraan yang berorientasi pada nilai demokrasi, hukum, dan tanggung jawab sosial. Integrasi materi antikorupsi dalam pembelajaran kewarganegaraan membantu peserta didik memahami pentingnya integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Nurtisna & Zainil, 2025).

Penguatan kurikulum pendidikan antikorupsi juga dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang mendorong refleksi nilai dan analisis persoalan sosial. Diskusi kelas, studi kasus, dan kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami implikasi sosial dari tindakan korupsi. Pendekatan pembelajaran ini membantu membangun kemampuan berpikir kritis terhadap persoalan etika dalam kehidupan publik (Gautama, 2025).

9.2.3 Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Lingkungan Pendidikan

Implementasi pendidikan antikorupsi tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan nilai integritas. Sekolah dan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menciptakan budaya akademik yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam aktivitas pendidikan. Lingkungan belajar yang konsisten dengan nilai tersebut dapat memperkuat proses internalisasi nilai antikorupsi dalam kehidupan peserta didik (Uttamo & Zainuddin, 2023).

Peran tenaga pendidik menjadi faktor penting dalam implementasi pendidikan antikorupsi. Guru dan dosen berfungsi sebagai fasilitator yang membantu peserta didik memahami nilai integritas melalui kegiatan pembelajaran yang reflektif. Interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam

proses pembelajaran dapat membentuk pengalaman sosial yang memperkuat kesadaran etika dalam kehidupan sehari-hari (Yuliani & Muslim, 2024).

Kegiatan pendidikan di luar kelas juga memiliki kontribusi dalam implementasi pendidikan antikorupsi. Program sosialisasi nilai integritas, diskusi publik, dan kegiatan pendidikan kewarganegaraan memberikan pengalaman belajar yang lebih luas bagi peserta didik. Kegiatan tersebut membantu peserta didik memahami pentingnya tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat (Gautama, 2025).

9.2.4 Penguatan Kebijakan dalam Praktik Pendidikan Anti Korupsi

Penguatan kebijakan pendidikan antikorupsi memerlukan dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan. Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan regulasi dan menyediakan kerangka kebijakan yang mendukung integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum. Institusi pendidikan berperan dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik (Prabowo et al., 2023).

Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi pendidikan antikorupsi. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan dapat memperkuat proses pembelajaran nilai integritas di luar lingkungan sekolah. Hubungan antara pendidikan formal dan lingkungan sosial membantu menciptakan pengalaman belajar yang konsisten dengan nilai antikorupsi (Alfaruki, 2024).

Pengembangan pendidikan antikorupsi dalam kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa pembentukan budaya integritas membutuhkan proses pendidikan yang berkelanjutan. Sistem pendidikan memiliki peran dalam membangun kesadaran etika yang dapat memengaruhi perilaku individu dalam kehidupan publik. Pendidikan yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dapat

memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam jangka panjang (Uttamo & Zainuddin, 2023).

9.3 Peran Lembaga Negara dan Masyarakat Sipil

Pendidikan antikorupsi dalam perspektif kebijakan publik memerlukan keterlibatan berbagai aktor sosial yang memiliki tanggung jawab dalam membangun budaya integritas dalam kehidupan masyarakat. Lembaga negara memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan, menyusun regulasi, serta mengembangkan program pendidikan yang menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam sistem pendidikan.

Kebijakan pendidikan antikorupsi membutuhkan koordinasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada integritas. Keterlibatan berbagai aktor sosial memberikan kontribusi dalam memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi sehingga nilai integritas dapat berkembang tidak hanya dalam lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat (Alfaruki, 2024).

Peran lembaga negara dan masyarakat sipil dalam pendidikan antikorupsi dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, penguatan peran institusi pendidikan, partisipasi masyarakat sipil, serta kerja sama antara berbagai aktor dalam mendukung implementasi pendidikan antikorupsi. Uraian berikut menjelaskan secara lebih terstruktur mengenai kontribusi masing-masing aktor dalam pengembangan pendidikan antikorupsi.

9.3.1 Peran Lembaga Negara dalam Pendidikan Anti Korupsi

Lembaga negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa pendidikan antikorupsi menjadi bagian dari kebijakan pendidikan nasional. Peran tersebut berkaitan dengan penyusunan regulasi, pengembangan program pendidikan, serta penguatan integritas aparatur negara dalam

pelaksanaan kebijakan publik. Beberapa bentuk peran lembaga negara dalam pendidikan antikorupsi dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Perumusan kebijakan pendidikan antikorupsi

dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan dan pemberantasan korupsi. Pemerintah menyusun kebijakan yang mengintegrasikan nilai integritas dalam kurikulum nasional serta program pendidikan karakter. Kebijakan tersebut memberikan kerangka bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang menanamkan kesadaran mengenai tanggung jawab publik dan kepatuhan terhadap norma hukum (Prabowo et al., 2023).

b. Pelaksanaan program pendidikan antikorupsi

dilakukan melalui lembaga negara yang memiliki mandat dalam bidang pencegahan korupsi. Program pendidikan tersebut mencakup penyediaan materi pembelajaran, kegiatan sosialisasi nilai integritas, serta pengembangan kurikulum yang menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan publik (Alfaruki, 2024).

c. Penguatan integritas aparatur negara

menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan antikorupsi. Lembaga negara menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan integritas bagi aparatur sipil negara agar mereka memiliki pemahaman mengenai etika pelayanan publik dan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Randywinata, 2024).

9.3.2 Peran Lembaga Pendidikan sebagai Agen Perubahan

Institusi pendidikan memiliki posisi strategis dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi karena menjadi ruang pembelajaran nilai bagi generasi muda. Sekolah dan perguruan tinggi dapat

mengintegrasikan nilai integritas dalam kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik memahami pentingnya perilaku jujur dalam kehidupan sosial. Beberapa bentuk peran lembaga pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum

dilakukan melalui pengembangan materi pembelajaran yang berkaitan dengan nilai integritas, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum. Pembelajaran tersebut membantu peserta didik memahami hubungan antara perilaku individu dan kepentingan masyarakat (Nurtisna & Zainil, 2025).

b. Pengembangan budaya akademik

menekankan kejujuran dan tanggung jawab menjadi bagian penting dalam implementasi pendidikan antikorupsi. Praktik akademik yang menjunjung integritas memberikan pengalaman sosial bagi peserta didik mengenai pentingnya perilaku etis dalam proses pendidikan (Rahmadhani, 2024).

c. Kegiatan pendidikan di luar kelas

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami persoalan korupsi dalam konteks kehidupan masyarakat. Seminar, diskusi publik, dan kegiatan pendidikan kewarganegaraan membantu memperluas pemahaman peserta didik mengenai pentingnya integritas dalam kehidupan publik (Tsabita et al., 2024).

9.3.3 Peran Masyarakat Sipil dalam Pendidikan Anti Korupsi

Masyarakat sipil memiliki kontribusi dalam memperkuat pendidikan antikorupsi melalui kegiatan edukasi, partisipasi sosial, dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat memberikan dukungan dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya integritas dalam kehidupan sosial. Beberapa bentuk peran masyarakat sipil dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Organisasi masyarakat dan lembaga swadaya Masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan edukasi mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan publik. Kegiatan tersebut membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai antikorupsi (Alfaruki, 2024).
- b. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan public memberikan kontribusi dalam memastikan bahwa program pendidikan antikorupsi dilaksanakan secara konsisten. Pengawasan sosial membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan (Prabowo et al., 2023).
- c. Komunitas masyarakat dapat mengembangkan kegiatan pendidikan nonformal yang menanamkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi publik, kampanye integritas, dan kegiatan literasi hukum membantu memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi di masyarakat (Tsabita et al., 2024).

9.3.4 Kolaborasi Lembaga Negara dan Masyarakat Sipil

Kerja sama antara lembaga negara dan masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi. Kolaborasi tersebut memungkinkan pengembangan program pendidikan yang lebih luas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Bentuk kolaborasi ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut.

- a. Pengembangan program pendidikan antikorupsi yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan mengenai strategi pembelajaran nilai integritas (Prabowo et al., 2023).
- b. Kegiatan kolaboratif seperti seminar, pelatihan integritas, dan kampanye publik membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembangunan karakter warga negara (Alfaruki, 2024).

- c. Kerja sama antara lembaga negara dan masyarakat sipil dapat memperkuat pengembangan budaya integritas dalam kehidupan publik. Program pendidikan yang melibatkan berbagai aktor sosial memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran etika yang mendukung pencegahan korupsi dalam masyarakat (Tsabita et al., 2024).

9.4 Tantangan Implementasi di Tingkat Lokal dan Nasional

Implementasi pendidikan antikorupsi dalam perspektif kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan perumusan kebijakan, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara efektif di berbagai level pemerintahan. Pendidikan antikorupsi telah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal maupun program pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pencegahan korupsi berbasis nilai dan karakter. Upaya tersebut diarahkan untuk membangun kesadaran integritas sejak dini serta memperkuat budaya transparansi di lingkungan sosial dan kelembagaan (Gautama, 2025; Khairunnisa & Permana, 2022).

Realitas implementasi menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan antikorupsi menghadapi dinamika yang kompleks di tingkat lokal maupun nasional. Struktur birokrasi, variasi kapasitas institusi pendidikan, serta perbedaan konteks sosial budaya daerah memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan tersebut. Analisis kebijakan publik menempatkan tahap implementasi sebagai fase kritis karena keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan aktor kebijakan dalam menerjemahkan norma kebijakan menjadi praktik pendidikan yang nyata (Yuliani & Muslim, 2024).

Praktik pendidikan antikorupsi di berbagai institusi pendidikan memperlihatkan bahwa integrasi nilai integritas sering dilakukan melalui kurikulum, kegiatan pembelajaran, serta program sosial kemasyarakatan. Model implementasi tersebut bertujuan memperkuat internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi pada mahasiswa sebagai calon warga negara yang berpartisipasi dalam kehidupan publik (Hidayah & Kuswandi, 2024).

Kajian kebijakan publik menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak dapat dilepaskan dari dukungan sistem kelembagaan yang memadai. Kerangka kebijakan memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat sipil agar proses implementasi berjalan konsisten dan berkelanjutan (Zulaiha & Munir, 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi memerlukan pendekatan multidimensional yang memperhatikan aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat. Tantangan implementasi di tingkat lokal dan nasional dapat dipahami melalui beberapa dimensi utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan antikorupsi.

9.4.1 Kesenjangan Kapasitas Institusi Pendidikan

Kapasitas institusi pendidikan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi pendidikan antikorupsi. Banyak institusi pendidikan menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus maupun ketersediaan bahan ajar yang relevan. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi pendidikan antikorupsi sering dilakukan secara terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kurikulum (Zulaiha & Munir, 2025).

Situasi di tingkat daerah menunjukkan bahwa variasi kapasitas lembaga pendidikan menimbulkan kesenjangan dalam kualitas pelaksanaan program pendidikan antikorupsi. Perguruan tinggi di daerah dengan sumber daya terbatas sering mengintegrasikan nilai antikorupsi secara tidak langsung melalui kegiatan pembelajaran umum atau pembiasaan perilaku etis, bukan melalui mata kuliah khusus yang terstruktur (Ilham & Hardiyanti, 2020).

Perbedaan akses terhadap sumber daya pendidikan juga berdampak pada kualitas proses internalisasi nilai integritas. Wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan dan akses informasi cenderung menghadapi hambatan dalam mengembangkan program pendidikan antikorupsi yang komprehensif. Program pendidikan masyarakat di beberapa daerah menunjukkan bahwa pemahaman

masyarakat tentang konsep antikorupsi masih memerlukan penguatan melalui pendekatan edukatif yang berkelanjutan (Utami & Hasanah, 2025).

Kondisi tersebut menegaskan bahwa peningkatan kapasitas institusi pendidikan menjadi agenda penting dalam kebijakan pendidikan antikorupsi. Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, serta penyediaan sumber belajar menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di berbagai daerah.

9.4.2 Koordinasi Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi dimensi penting dalam implementasi kebijakan pendidikan antikorupsi. Sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kondisi tersebut membuka ruang inovasi kebijakan, tetapi juga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan program pendidikan antikorupsi (Yuliani & Muslim, 2024).

Kerangka kebijakan nasional biasanya menetapkan standar umum terkait integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan standar tersebut dalam bentuk program pendidikan yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Proses penerjemahan kebijakan tersebut memerlukan koordinasi yang kuat agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi lokal (Khairunnisa & Permana, 2022).

Keterbatasan koordinasi sering menyebabkan implementasi kebijakan berjalan secara parsial. Beberapa daerah telah mengembangkan regulasi khusus terkait pendidikan antikorupsi, sementara daerah lain masih mengintegrasikannya secara terbatas dalam kebijakan pendidikan karakter. Variasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa konsistensi implementasi memerlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara berbagai level pemerintahan (Bawamenewi & Harefa, 2024).

Penguatan koordinasi kebijakan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pendidikan antikorupsi dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah. Kerangka koordinasi tersebut mencakup sinkronisasi regulasi, penguatan monitoring kebijakan, serta pengembangan program pendidikan yang adaptif terhadap konteks lokal.

9.4.3 Tantangan Budaya dan Persepsi Sosial terhadap Korupsi

Dimensi budaya dan persepsi sosial juga memengaruhi implementasi pendidikan antikorupsi. Praktik sosial yang toleran terhadap perilaku koruptif dalam skala kecil dapat menghambat proses internalisasi nilai integritas. Pendidikan antikorupsi memerlukan pendekatan yang mampu mengubah persepsi sosial masyarakat mengenai praktik penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan etika dalam kehidupan publik (Gautama, 2025).

Konteks sosial di berbagai daerah menunjukkan bahwa nilai integritas tidak selalu dipahami secara seragam oleh masyarakat. Praktik patronase, hubungan kekerabatan dalam birokrasi, serta budaya pemberian hadiah dalam interaksi sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat mengenai batas antara perilaku etis dan perilaku koruptif (Wahid, Putra, & Arale, 2024).

Pendekatan pendidikan antikorupsi perlu mempertimbangkan dinamika sosial tersebut agar proses pembelajaran tidak hanya bersifat normatif. Strategi pembelajaran berbasis kasus, diskusi kritis, serta keterlibatan masyarakat dalam program edukasi dapat membantu membangun pemahaman yang lebih kontekstual mengenai integritas dan akuntabilitas dalam kehidupan publik (Hidayah & Kuswandi, 2024).

Transformasi budaya integritas memerlukan proses pendidikan yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai aktor sosial. Institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pemerintahan memiliki peran kolektif dalam membangun kesadaran publik terhadap pentingnya pencegahan korupsi melalui pendidikan.

9.4.4 Keterbatasan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Monitoring dan evaluasi kebijakan menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas implementasi pendidikan antikorupsi. Banyak program pendidikan antikorupsi telah dilaksanakan di berbagai institusi pendidikan, tetapi mekanisme evaluasi yang sistematis masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan sulitnya mengukur dampak jangka panjang dari program pendidikan terhadap perubahan perilaku antikorupsi (Zulaiha & Munir, 2025).

Proses evaluasi kebijakan memerlukan indikator yang jelas mengenai keberhasilan implementasi pendidikan antikorupsi. Indikator tersebut dapat mencakup perubahan sikap mahasiswa terhadap praktik korupsi, tingkat partisipasi dalam kegiatan integritas, serta kontribusi lulusan dalam mendorong transparansi di sektor publik (Khairunnisa & Permana, 2022).

Keterbatasan data evaluasi juga berkaitan dengan kurangnya integrasi antara program pendidikan dan sistem pemantauan kebijakan publik. Banyak program pendidikan antikorupsi masih berfokus pada kegiatan edukatif tanpa diikuti dengan mekanisme pengukuran dampak yang terstruktur. Penguatan sistem evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan antikorupsi memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan korupsi (Wahid, Putra, & Arale, 2024).

Pengembangan sistem monitoring yang komprehensif memungkinkan pemerintah dan institusi pendidikan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas program pendidikan antikorupsi. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan serta inovasi program pendidikan yang lebih responsif terhadap tantangan korupsi di tingkat lokal maupun nasional.

Bab 10 Transformasi Karakter Bangsa Melalui Pendidikan

Transformasi karakter bangsa merupakan salah satu agenda fundamental dalam pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan masyarakat yang berintegritas, beretika, dan berkeadaban. Dalam realitas sosial Indonesia, berbagai persoalan seperti praktik korupsi yang masih meluas, lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi, serta menurunnya kualitas moral dalam kehidupan sosial menunjukkan bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya menyentuh dimensi karakter. Pendidikan dalam konteks ini memiliki peran strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan nilai, sikap, dan perilaku. Pendidikan yang hanya berorientasi pada aspek kognitif akan menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi belum tentu memiliki integritas moral. Oleh karena itu, transformasi karakter bangsa harus ditempatkan sebagai tujuan utama dalam sistem pendidikan.

Menurut Thomas Lickona (2013), pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja untuk membantu individu memahami, merasakan, dan melakukan nilai-nilai etika inti. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi harus mencapai tahap internalisasi dan aktualisasi dalam kehidupan nyata. Pandangan ini menegaskan bahwa proses pendidikan harus mencakup dimensi kognitif, afektif, dan perilaku secara terpadu. Dalam perspektif nasional, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala potensi yang dimiliki anak agar berkembang secara optimal, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa pendidikan harus berorientasi pada pembentukan manusia yang utuh, bukan hanya sebagai individu yang cerdas, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Dengan demikian, transformasi karakter bangsa melalui pendidikan bukan sekadar program tambahan, melainkan inti dari proses pendidikan itu sendiri. Pendidikan harus menjadi ruang di mana nilai-nilai moral tidak hanya diajarkan, tetapi juga dihidupi dan dipraktikkan secara konsisten.

10.1 Pendidikan Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi Jangka Panjang

Korupsi merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan krisis nilai dan kegagalan internalisasi moral dalam kehidupan sosial. Dalam berbagai kajian, korupsi dipahami bukan sekadar tindakan individu yang menyimpang, melainkan sebagai gejala sistemik yang berakar pada interaksi antara struktur kekuasaan, budaya organisasi, dan karakter personal. Oleh karena itu, pendekatan dalam pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum, melainkan harus menyentuh dimensi yang lebih mendasar, yaitu pembentukan karakter. Selama ini, pendekatan yang dominan dalam pemberantasan korupsi cenderung bersifat represif melalui penegakan hukum. Pendekatan ini memang memiliki fungsi penting dalam memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Namun, sifatnya yang reaktif membuatnya hanya berfokus pada penanganan akibat, bukan penyebab. Dalam banyak kasus, penindakan hukum justru menunjukkan bahwa sistem telah gagal mencegah terjadinya perilaku koruptif sejak awal.

Dalam konteks ini, pendidikan hadir sebagai strategi preventif yang memiliki orientasi jangka panjang. Pendidikan memungkinkan terjadinya proses internalisasi nilai yang membentuk kesadaran moral individu sejak dini. Kesadaran ini tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan tentang benar dan salah, tetapi juga sebagai landasan dalam mengambil keputusan etis dalam berbagai situasi kehidupan. Menurut Robert Klitgaard (2001), korupsi terjadi ketika terdapat kombinasi antara kekuasaan (*power*), diskresi (*discretion*), dan lemahnya akuntabilitas (*accountability*). Formula ini menekankan pentingnya perbaikan sistem dalam mengurangi peluang korupsi. Namun, pendekatan ini akan menjadi tidak lengkap apabila mengabaikan faktor karakter individu. Sistem yang baik tetap dapat disalahgunakan apabila individu yang berada di dalamnya tidak memiliki integritas moral. Sebaliknya, individu yang memiliki integritas cenderung mampu menahan diri dari perilaku koruptif meskipun berada dalam sistem yang rentan. Dengan demikian, pendidikan memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakter individu yang mampu mengontrol dirinya sendiri (*self-regulation*) dan bertindak berdasarkan prinsip moral. Pendidikan tidak hanya membentuk kemampuan kognitif, tetapi juga membangun kesadaran etis yang menjadi dasar dalam perilaku sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan bagian integral dari strategi nasional dalam membangun budaya integritas. Pendidikan diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, disiplin, serta kepedulian

terhadap kepentingan publik. Nilai-nilai ini diharapkan tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktiknya, pendidikan anti korupsi seringkali menghadapi persoalan mendasar, yaitu kecenderungan bersifat formalistik. Nilai-nilai moral disampaikan dalam bentuk materi pembelajaran tanpa diikuti dengan pengalaman nyata yang memungkinkan peserta didik untuk menghayati nilai tersebut. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara apa yang diajarkan (*what is taught*) dan apa yang dialami (*what is experienced*). Kesenjangan tersebut berpotensi menimbulkan disonansi moral, di mana peserta didik mengalami kebingungan dalam memahami nilai karena melihat ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Dalam jangka panjang, hal ini justru dapat melemahkan kepercayaan terhadap nilai-nilai yang diajarkan. Menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral individu berlangsung melalui tahapan yang melibatkan proses kognitif dan pengalaman sosial. Individu tidak secara otomatis menjadi bermoral hanya karena mengetahui norma, tetapi harus melalui proses refleksi, interaksi, dan pengambilan keputusan dalam situasi nyata. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus dirancang sebagai proses yang berkelanjutan, kontekstual, dan berbasis pengalaman. Lebih jauh, pendidikan sebagai strategi pencegahan korupsi harus mampu membangun budaya moral dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. Sekolah tidak boleh hanya menjadi tempat penyampaian nilai, tetapi harus menjadi ruang praktik nilai. Transparansi, keadilan, dan akuntabilitas harus tercermin dalam seluruh aktivitas pendidikan, mulai dari proses pembelajaran hingga pengelolaan institusi. Efektivitas pendidikan dalam pencegahan korupsi tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh kualitas lingkungan moral yang dibangun dalam sistem pendidikan. Tanpa hal tersebut, pendidikan berisiko kehilangan perannya sebagai instrumen transformasi karakter dan hanya menjadi proses formal yang tidak berdampak signifikan terhadap perubahan perilaku.

10.1.1 Internalisasi Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan

Internalisasi nilai anti korupsi merupakan inti dari pendidikan karakter yang bertujuan membentuk kesadaran moral individu secara mendalam dan berkelanjutan. Proses internalisasi tidak dapat dipahami sebagai sekadar transfer nilai dari guru kepada peserta didik, melainkan sebagai proses konstruksi makna yang melibatkan pengalaman, refleksi, dan interaksi sosial. Dalam perspektif pendidikan, nilai tidak dapat ditanamkan

secara instan melalui pendekatan instruksional yang bersifat satu arah. Nilai harus dipahami, dirasakan, dan dihayati oleh peserta didik agar dapat menjadi bagian dari sistem kepribadian mereka. Proses ini membutuhkan waktu, konsistensi, serta lingkungan yang mendukung. Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter mencakup tiga dimensi utama, yaitu moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling (perasaan moral), dan moral action (tindakan moral). Ketiga dimensi ini harus dikembangkan secara terpadu agar nilai yang diajarkan tidak berhenti pada tingkat kognitif, tetapi juga tercermin dalam perilaku nyata.

Dalam konteks pendidikan anti korupsi, internalisasi nilai berarti membentuk individu yang tidak hanya mengetahui bahwa korupsi adalah tindakan yang salah, tetapi juga memiliki kepekaan moral untuk menolak dan melawan praktik tersebut. Individu yang telah menginternalisasi nilai anti korupsi akan memiliki komitmen internal yang kuat untuk bertindak jujur dan adil, bahkan ketika tidak ada pengawasan eksternal. Proses internalisasi nilai sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat peserta didik berada. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya internalisasi nilai. Budaya sekolah yang menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan keadilan akan memperkuat proses ini. Menurut John Dewey, pengalaman merupakan dasar utama dalam proses belajar. Peserta didik belajar nilai bukan dari apa yang diajarkan secara verbal, tetapi dari apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan harus dirancang sebagai ruang pengalaman moral yang memungkinkan peserta didik untuk mempraktikkan nilai secara langsung.

Peran guru dalam proses internalisasi nilai sangat menentukan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai model moral yang menjadi rujukan bagi peserta didik. Keteladanan guru dalam bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab akan memberikan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan penjelasan teoritis. Namun demikian, internalisasi nilai tidak selalu berjalan secara linear. Proses ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti pengaruh lingkungan sosial yang tidak sejalan dengan nilai yang diajarkan, tekanan kelompok sebaya, serta budaya pragmatis yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis dan keteguhan moral. internalisasi nilai anti korupsi juga

memerlukan pendekatan pedagogik yang inovatif. Metode pembelajaran seperti studi kasus, simulasi, dan refleksi moral dapat membantu peserta didik memahami kompleksitas persoalan korupsi serta mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan etis. Dengan demikian, internalisasi nilai anti korupsi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi antara sistem pendidikan, lingkungan sosial, dan pengalaman belajar. Keberhasilan proses ini akan menentukan sejauh mana pendidikan mampu berkontribusi dalam membangun generasi yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

10.1.2 Pendekatan Pembelajaran Berbasis Nilai dalam Pendidikan Anti Korupsi

Pendekatan pembelajaran berbasis nilai merupakan salah satu strategi pedagogik yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan anti korupsi. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan nilai sebagai materi yang diajarkan, tetapi sebagai inti dari keseluruhan proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran tidak lagi berorientasi semata pada pencapaian akademik, melainkan pada pembentukan kesadaran moral dan karakter peserta didik. Dalam praktik pendidikan konvensional, nilai seringkali diposisikan sebagai bagian tambahan yang disisipkan dalam materi pembelajaran. Pendekatan semacam ini cenderung tidak efektif karena tidak memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk memahami, menghayati, dan menginternalisasi nilai tersebut. Nilai hanya dipahami sebagai konsep abstrak yang terpisah dari realitas kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, pendekatan pembelajaran berbasis nilai menempatkan nilai sebagai kerangka utama dalam proses pembelajaran. Setiap materi, metode, dan interaksi dalam kelas diarahkan untuk mendukung pembentukan karakter peserta didik. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang nilai, tetapi juga belajar melalui nilai dan untuk nilai.

Menurut Paulo Freire, pendidikan seharusnya tidak bersifat “banking concept”, di mana peserta didik hanya menjadi penerima informasi secara pasif. Pendidikan harus bersifat dialogis dan membebaskan, sehingga peserta didik mampu mengembangkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, pendekatan ini sangat relevan karena korupsi merupakan fenomena sosial yang kompleks dan membutuhkan pemahaman kritis. Melalui pendekatan berbasis nilai, peserta didik diajak untuk menganalisis berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan korupsi, memahami dampaknya terhadap masyarakat, serta merefleksikan nilai-nilai yang

seharusnya menjadi dasar dalam bertindak. Proses ini mendorong peserta didik untuk tidak hanya mengetahui bahwa korupsi adalah tindakan yang salah, tetapi juga memahami mengapa tindakan tersebut merugikan dan bagaimana seharusnya bersikap. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pengalaman belajar yang kontekstual. Pembelajaran harus dikaitkan dengan situasi nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Dengan demikian, nilai tidak dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi sebagai prinsip yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut John Dewey, pengalaman merupakan dasar utama dalam proses pembelajaran. Peserta didik belajar secara efektif ketika mereka terlibat secara langsung dalam pengalaman yang bermakna. Oleh karena itu, metode pembelajaran seperti studi kasus, simulasi, role play, dan diskusi kelompok menjadi sangat penting dalam pendidikan anti korupsi.

Melalui studi kasus, misalnya, peserta didik dapat diajak untuk menganalisis situasi yang mengandung dilema moral, seperti konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang. Dalam proses ini, mereka tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga mempertimbangkan berbagai alternatif solusi berdasarkan nilai-nilai moral. Hal ini membantu mengembangkan kemampuan penalaran moral yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan etis. Pendekatan pembelajaran berbasis nilai juga menuntut perubahan peran guru. Guru tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar peserta didik. Guru perlu menciptakan suasana pembelajaran yang dialogis, terbuka, dan reflektif, sehingga peserta didik merasa aman untuk mengemukakan pendapat dan mengeksplorasi nilai. Namun demikian, implementasi pendekatan ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya paradigma pembelajaran yang berorientasi pada hasil akademik semata. Sistem evaluasi yang lebih menekankan pada aspek kognitif seringkali membuat guru kurang memberikan perhatian pada aspek afektif dan moral. Keterbatasan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran berbasis nilai juga menjadi kendala. Tidak semua guru memiliki kemampuan untuk memfasilitasi diskusi moral atau mengelola dilema etika dalam kelas. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas guru menjadi aspek penting dalam implementasi pendidikan anti korupsi. Pendekatan pembelajaran berbasis nilai juga harus didukung oleh budaya sekolah yang konsisten. Nilai-nilai yang diajarkan dalam kelas harus tercermin dalam praktik kehidupan sekolah,

seperti dalam sistem penilaian, pengambilan keputusan, serta interaksi antar warga sekolah. Ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan dan praktik yang terjadi akan melemahkan efektivitas pembelajaran.

Dalam perspektif perkembangan moral, Lawrence Kohlberg menekankan bahwa individu berkembang secara moral melalui interaksi sosial dan pengalaman dalam menghadapi dilema etika. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis nilai harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengalami konflik moral dan belajar mengambil keputusan secara mandiri. Pendekatan pembelajaran berbasis nilai dalam pendidikan anti korupsi bukan sekadar metode pengajaran, tetapi merupakan paradigma pendidikan yang menempatkan nilai sebagai inti dari proses pembelajaran. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada integrasi antara kurikulum, metode pembelajaran, peran guru, serta budaya sekolah. Jika dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, pendekatan ini memiliki potensi besar dalam membentuk generasi yang tidak hanya memahami nilai-nilai anti korupsi, tetapi juga mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan nyata. Sebaliknya, jika hanya diterapkan secara parsial dan formalistik, pendekatan ini berisiko menjadi sekadar retorika tanpa dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku.

10.2 Membangun Generasi Berintegritas di Era Global

Era globalisasi ditandai oleh percepatan arus informasi, intensitas interaksi lintas budaya, serta transformasi teknologi yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi dan politik, tetapi juga pada sistem nilai, pola pikir, dan perilaku masyarakat. Globalisasi menciptakan ruang terbuka di mana berbagai nilai dari latar belakang budaya yang berbeda saling berinteraksi, berkompetisi, bahkan saling bertentangan. Dalam situasi tersebut, individu dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi tanpa kehilangan pijakan moral. Dalam konteks ini, integritas menjadi salah satu nilai fundamental yang harus dimiliki oleh generasi muda. Integritas tidak sekadar dimaknai sebagai kejujuran, tetapi mencakup kesatuan antara nilai, prinsip, dan tindakan dalam berbagai situasi kehidupan. Individu yang berintegritas mampu menjaga konsistensi antara apa yang diyakini dengan apa yang dilakukan, bahkan ketika menghadapi tekanan eksternal yang kuat. Menurut Stephen Covey (2004), integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan (trust), baik dalam hubungan interpersonal maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Kepercayaan merupakan

modal sosial yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan suatu masyarakat. Tanpa integritas, hubungan sosial akan dipenuhi dengan kecurigaan dan ketidakpastian.

Dalam realitas global yang dinamis, nilai-nilai moral seringkali mengalami pergeseran. Zygmunt Bauman (2000) mengemukakan konsep liquid modernity, yaitu kondisi di mana struktur sosial dan nilai-nilai menjadi cair, tidak stabil, dan mudah berubah. Dalam masyarakat yang “cair” ini, individu seringkali kehilangan pegangan nilai yang tetap, sehingga lebih rentan terhadap pengaruh pragmatisme dan relativisme moral. Relativisme moral mendorong pandangan bahwa kebenaran bersifat subjektif dan tergantung pada konteks, sehingga nilai-nilai seperti kejujuran dan keadilan tidak lagi dianggap sebagai prinsip universal yang harus dijunjung tinggi. Sementara itu, pragmatisme yang berlebihan cenderung menempatkan hasil sebagai tujuan utama tanpa mempertimbangkan proses yang ditempuh. Kondisi ini berpotensi melemahkan integritas individu dan membuka ruang bagi berbagai bentuk penyimpangan, termasuk korupsi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga memiliki keteguhan moral. Pendidikan harus mampu menjadi ruang pembentukan karakter yang menanamkan nilai integritas secara mendalam dan berkelanjutan. Menurut Thomas Lickona (2013), pendidikan karakter yang efektif harus mampu mengintegrasikan aspek pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan integritas tidak cukup dilakukan melalui pengajaran konsep, tetapi harus melibatkan pengalaman emosional dan praktik nyata. Dengan demikian, membangun generasi berintegritas di era global memerlukan pendekatan pendidikan yang holistik, yang tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga memperkuat kesadaran moral dan tanggung jawab sosial peserta didik.

10.2.1 Tantangan Moral di Era Global

Tantangan moral di era global merupakan konsekuensi dari perubahan sosial yang cepat dan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah munculnya budaya pragmatis yang mengutamakan hasil dibandingkan dengan proses. Dalam budaya ini, keberhasilan seringkali diukur berdasarkan pencapaian material tanpa mempertimbangkan cara yang digunakan untuk mencapainya. Fenomena ini diperkuat oleh sistem sosial yang kompetitif, di mana individu didorong untuk mencapai keberhasilan dalam waktu yang singkat.

Tekanan tersebut dapat mendorong individu untuk mengambil jalan pintas, termasuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai moral. Dalam konteks ini, integritas menjadi rentan karena individu dihadapkan pada dilema antara mempertahankan nilai atau mencapai tujuan. perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan karakter generasi muda. Akses informasi yang tidak terbatas memungkinkan individu untuk terpapar pada berbagai nilai dan perilaku yang tidak selalu sejalan dengan norma sosial yang berlaku. Menurut Manuel Castells (2010), masyarakat modern telah berkembang menjadi *network society*, di mana interaksi sosial banyak terjadi melalui jaringan digital. Dalam masyarakat ini, identitas dan nilai individu seringkali dipengaruhi oleh interaksi virtual yang tidak selalu memiliki kontrol sosial yang kuat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya distorsi nilai, di mana individu lebih mudah terpengaruh oleh tren dan opini yang berkembang di media sosial. Lemahnya kontrol sosial dalam ruang digital juga membuka peluang bagi munculnya perilaku menyimpang, seperti manipulasi informasi, penyebaran hoaks, dan normalisasi tindakan tidak etis. Tanpa kemampuan literasi digital dan kesadaran moral yang memadai, generasi muda berpotensi terjebak dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai integritas.

Tantangan lainnya adalah pengaruh globalisasi budaya yang membawa nilai-nilai individualisme dan materialisme. Nilai-nilai ini, jika tidak diimbangi dengan pendidikan karakter yang kuat, dapat mendorong individu untuk lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Dengan demikian, tantangan moral di era global tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal, yaitu berkaitan dengan kemampuan individu dalam mempertahankan nilai di tengah tekanan dan perubahan yang terjadi.

10.2.2 Peran Pendidikan dalam Membentuk Integritas

Dalam menghadapi berbagai tantangan moral di era global, pendidikan memiliki peran strategis sebagai agen pembentukan karakter dan integritas. Pendidikan tidak hanya bertugas mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak individu dalam kehidupan sosial. Pendidikan yang efektif dalam membentuk integritas harus bersifat holistik, yaitu mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Proses pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik tidak hanya memahami nilai secara teoritis, tetapi juga mampu menghayati dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Menurut Lawrence Kohlberg (1981),

perkembangan moral individu terjadi melalui tahapan yang melibatkan kemampuan berpikir kritis dan penalaran moral. Oleh karena itu, pendidikan harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk menghadapi dilema moral dan belajar mengambil keputusan secara mandiri. Selain itu, pendekatan pembelajaran dialogis menjadi sangat penting dalam membentuk integritas. Guru perlu menciptakan ruang diskusi yang memungkinkan peserta didik untuk mengemukakan pendapat, mempertanyakan nilai, serta merefleksikan pengalaman mereka. Proses ini akan membantu peserta didik mengembangkan kesadaran moral yang lebih matang.

Menurut Paulo Freire (1970), pendidikan harus bersifat dialogis dan membebaskan, sehingga peserta didik mampu menjadi subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, peserta didik tidak hanya menerima nilai, tetapi juga membangun pemahaman mereka sendiri melalui refleksi kritis. Peran guru sebagai teladan (role model) menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan integritas. Peserta didik cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, konsistensi antara nilai yang diajarkan dan perilaku yang ditunjukkan oleh guru menjadi sangat penting. Lingkungan pendidikan juga harus mendukung proses pembentukan integritas. Budaya sekolah yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab akan memperkuat internalisasi nilai pada peserta didik. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan dan praktik yang terjadi akan melemahkan efektivitas pendidikan karakter. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk generasi berintegritas di era global. Keberhasilan pendidikan dalam menjalankan peran ini akan menentukan kualitas moral masyarakat di masa depan. Tanpa pendidikan yang mampu membentuk integritas, globalisasi berpotensi menjadi kekuatan yang justru melemahkan karakter bangsa.

10.3 Gerakan Nasionalisme Pendidikan Moral Anti Korupsi

Transformasi karakter bangsa pada hakikatnya tidak dapat dilakukan melalui pendekatan yang parsial dan sektoral, melainkan memerlukan strategi yang bersifat sistemik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Korupsi sebagai masalah struktural tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga dengan sistem sosial, budaya, dan kelembagaan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan harus ditempatkan dalam kerangka gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Gerakan nasional

pendidikan moral anti korupsi merupakan bentuk konkret dari pendekatan kolektif dalam membangun budaya integritas. Gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya korupsi, tetapi juga untuk membentuk kesadaran moral kolektif yang menjadi dasar dalam membangun perilaku antikoruptif. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (2019), pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pencegahan korupsi melalui pendekatan berbasis nilai (value-based approach). Pendidikan memungkinkan terbentuknya kesadaran kolektif yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga pada komitmen moral untuk menolak segala bentuk praktik koruptif. Dalam perspektif ini, pendidikan berfungsi sebagai sarana transformasi sosial yang mampu mengubah pola pikir dan budaya masyarakat.

Gerakan nasional ini melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas. Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan dan menyediakan kerangka regulasi yang mendukung implementasi pendidikan anti korupsi. Lembaga pendidikan berfungsi sebagai ruang utama dalam proses internalisasi nilai, sementara keluarga dan masyarakat berperan sebagai lingkungan sosial yang memperkuat atau melemahkan nilai tersebut. Kolaborasi antar aktor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pembentukan karakter. Tanpa sinergi yang kuat, upaya pendidikan anti korupsi akan berjalan secara terfragmentasi dan tidak memberikan dampak yang signifikan. Dalam konteks ini, gerakan nasional harus mampu mengintegrasikan berbagai inisiatif yang ada ke dalam satu kerangka yang koheren dan berkelanjutan. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi gerakan nasional pendidikan moral anti korupsi seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah kecenderungan formalitas, di mana program pendidikan anti korupsi hanya dilaksanakan sebagai pemenuhan kewajiban administratif tanpa diikuti dengan perubahan substantif dalam praktik pendidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan program juga menjadi tantangan serius. Perubahan kebijakan yang tidak berkelanjutan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya evaluasi berbasis dampak menyebabkan gerakan ini tidak berjalan secara optimal. Tanpa komitmen yang kuat dari seluruh pihak, gerakan nasional berisiko menjadi sekadar simbol tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan karakter bangsa.

Dalam perspektif sosiologis, Emile Durkheim (1956) menekankan bahwa pendidikan memiliki fungsi penting dalam membentuk moral kolektif masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan gerakan nasional pendidikan moral anti korupsi sangat bergantung pada kemampuan sistem pendidikan dalam mentransmisikan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan sosial. Gerakan nasional pendidikan moral anti korupsi harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang memerlukan komitmen, konsistensi, dan integrasi antar berbagai elemen. Tanpa pendekatan yang sistemik, upaya ini akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu terbentuknya masyarakat yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

10.3.1 Implementasi Gerakan Nasional dalam Dunia Pendidikan

Implementasi gerakan nasional pendidikan moral anti korupsi dalam dunia pendidikan merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi karakter generasi muda. Sekolah sebagai institusi formal memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi ruang utama dalam proses pembelajaran dan pembentukan nilai. Dalam konteks ini, implementasi tidak dapat hanya dilakukan melalui penambahan materi dalam kurikulum, tetapi harus mencakup transformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan. Pendidikan anti korupsi harus diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran dan kegiatan sekolah, sehingga nilai-nilai yang diajarkan tidak terpisah dari proses pembelajaran secara keseluruhan. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2020), pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan harus mencakup tiga aspek utama, yaitu integrasi dalam kurikulum, penguatan peran pendidik, dan pembentukan budaya sekolah yang berintegritas. Ketiga aspek ini harus berjalan secara simultan agar proses internalisasi nilai dapat berlangsung secara efektif.

Integrasi dalam kurikulum berarti bahwa nilai-nilai antikorupsi tidak hanya diajarkan dalam mata pelajaran tertentu, tetapi menjadi bagian dari seluruh proses pembelajaran. Guru perlu mengaitkan materi yang diajarkan dengan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami relevansi nilai tersebut dalam berbagai konteks kehidupan. Penguatan peran pendidik juga menjadi faktor penting dalam implementasi gerakan ini. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter peserta didik. Keteladanan guru dalam bersikap jujur, adil, dan

bertanggung jawab menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pendidikan karakter. budaya sekolah yang berintegritas harus dibangun secara konsisten. Budaya ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sekolah, seperti transparansi dalam pengelolaan administrasi, keadilan dalam penilaian, serta hubungan yang harmonis antar warga sekolah. Lingkungan yang kondusif akan memperkuat proses internalisasi nilai pada peserta didik. implementasi gerakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan karakter, serta tekanan sistem pendidikan yang masih berorientasi pada pencapaian akademik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dalam meningkatkan kapasitas pendidik dan memperbaiki sistem evaluasi pendidikan.

10.3.2 Tantangan dan Evaluasi Gerakan Nasional Pendidikan Anti Korupsi

Meskipun memiliki tujuan yang strategis, gerakan nasional pendidikan moral anti korupsi menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan formalitas, di mana program dilaksanakan tanpa diikuti dengan perubahan nyata dalam perilaku. Formalitas ini seringkali muncul karena pendekatan yang lebih menekankan pada aspek administratif daripada substansi. Program pendidikan anti korupsi dijalankan sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan yang harus diinternalisasikan. Akibatnya, dampak yang dihasilkan menjadi sangat terbatas. kurangnya sistem evaluasi yang komprehensif juga menjadi kendala dalam mengukur keberhasilan program. Evaluasi seringkali hanya berfokus pada aspek kognitif, seperti pemahaman peserta didik terhadap konsep korupsi, tanpa mengukur perubahan sikap dan perilaku. Hal ini menyebabkan sulitnya mengetahui sejauh mana pendidikan anti korupsi benar-benar efektif. Menurut Lawrence Kohlberg (1981), perubahan moral tidak dapat diukur hanya melalui pengetahuan, tetapi harus dilihat dari kemampuan individu dalam mengambil keputusan etis. Oleh karena itu, evaluasi pendidikan anti korupsi harus mencakup aspek penalaran moral dan perilaku.

Tantangan lainnya adalah kurangnya sinergi antar lembaga. Program yang dijalankan oleh berbagai instansi seringkali tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga terjadi tumpang tindih atau bahkan kesenjangan dalam implementasi. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang lebih kuat dalam pelaksanaan gerakan nasional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan evaluatif yang tidak hanya bersifat administratif,

tetapi juga substantif. Evaluasi harus mampu mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret. Keberhasilan gerakan nasional pendidikan moral anti korupsi sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Tanpa evaluasi yang komprehensif dan perbaikan yang berkelanjutan, gerakan ini berisiko tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

10.4 Visi Masa Depan: Masyarakat Beretika dan Berkeadaban

Transformasi karakter bangsa melalui pendidikan pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang tidak hanya maju secara material, tetapi juga memiliki kualitas moral yang tinggi. Visi ini menempatkan etika dan keadaban sebagai fondasi utama dalam kehidupan sosial. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi dengan pembentukan karakter berpotensi melahirkan berbagai distorsi sosial, seperti meningkatnya praktik korupsi, ketimpangan sosial, serta melemahnya solidaritas masyarakat. Masyarakat beretika merupakan masyarakat yang menjadikan nilai-nilai moral sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Kepatuhan terhadap norma tidak hanya didasarkan pada tekanan eksternal, seperti hukum dan sanksi sosial, tetapi juga pada kesadaran internal yang berkembang melalui proses pendidikan. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial menjadi dasar dalam membangun hubungan antarindividu yang harmonis.

Dalam perspektif sosiologis, Emile Durkheim (1956) menegaskan bahwa pendidikan memiliki fungsi utama dalam mentransmisikan moral kolektif kepada generasi muda. Moral kolektif tersebut menjadi perekat sosial yang menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Tanpa adanya kesamaan nilai yang diinternalisasi melalui pendidikan, masyarakat akan mengalami disintegrasi dan konflik. Sementara itu, konsep masyarakat berkeadaban mengacu pada tingkat kematangan sosial yang ditandai oleh kemampuan individu dan kelompok dalam mengelola perbedaan secara konstruktif. Dalam masyarakat yang berkeadaban, keberagaman tidak dipandang sebagai sumber konflik, tetapi sebagai potensi yang memperkaya kehidupan sosial. Sikap toleransi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara damai menjadi indikator utama dari masyarakat yang berkeadaban.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi tersebut. Melalui proses pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kesadaran moral dan sosial yang menjadi dasar dalam berinteraksi dengan orang lain. Pendidikan yang berbasis nilai mampu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dan komitmen terhadap kebaikan bersama. Namun demikian, tanpa transformasi karakter yang kuat, pembangunan yang dilakukan berisiko hanya menghasilkan kemajuan material yang semu. Ketidakseimbangan antara perkembangan ekonomi dan kualitas moral dapat memperkuat berbagai masalah sosial, seperti korupsi, konflik horizontal, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu, pendidikan harus ditempatkan sebagai instrumen utama dalam membangun peradaban yang berkelanjutan.

10.4.1 Karakteristik Masyarakat Beretika

Masyarakat beretika ditandai oleh keberadaan sistem nilai yang diakui dan dijalankan secara konsisten oleh anggota masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari. Dalam masyarakat seperti ini, individu memiliki kesadaran moral yang tinggi sehingga mampu membedakan antara tindakan yang benar dan salah, serta bertanggung jawab atas konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Salah satu karakteristik utama masyarakat beretika adalah adanya integritas dalam kehidupan sosial. Integritas mencerminkan kesesuaian antara nilai yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan. Individu yang berintegritas tidak hanya bertindak jujur ketika diawasi, tetapi juga ketika tidak ada pengawasan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa nilai telah menjadi bagian dari kesadaran internal.

Masyarakat beretika juga ditandai oleh penghormatan terhadap norma dan hukum. Kepatuhan terhadap aturan tidak didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi, tetapi pada kesadaran akan pentingnya aturan tersebut dalam menjaga keteraturan sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Karakteristik lainnya adalah adanya tanggung jawab sosial yang tinggi. Individu dalam masyarakat beretika tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Kepedulian terhadap kepentingan bersama menjadi landasan dalam membangun hubungan sosial yang harmonis.

Menurut Thomas Lickona (2013), masyarakat yang beretika hanya dapat terwujud apabila individu-individu di dalamnya memiliki karakter yang kuat, yang dibentuk melalui proses pendidikan yang sistematis. Pendidikan karakter menjadi sarana utama dalam membangun kesadaran moral yang menjadi dasar dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, masyarakat beretika bukanlah sesuatu yang terbentuk secara alami, melainkan hasil dari proses pendidikan dan sosialisasi nilai yang berlangsung secara terus-menerus. Tanpa upaya yang sistematis, nilai-nilai moral akan sulit bertahan dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat.

10.4.2 Masyarakat Berkeadaban sebagai Tujuan Pendidikan

Masyarakat berkeadaban merupakan tujuan ideal dari proses pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan individu yang bermoral, tetapi juga pada terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Keberadaban mencerminkan tingkat kematangan suatu masyarakat dalam mengelola perbedaan, menyelesaikan konflik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam masyarakat berkeadaban, interaksi sosial didasarkan pada prinsip saling menghormati dan menghargai. Perbedaan latar belakang budaya, agama, maupun pandangan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi dasar untuk membangun dialog dan kerja sama. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang kuat terhadap pentingnya hidup berdampingan secara damai.

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat berkeadaban melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, empati, dan keadilan sosial. Proses pembelajaran harus mampu menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya menghargai perbedaan serta memahami perspektif orang lain. Menurut Paulo Freire (1970), pendidikan harus membebaskan individu dari kesadaran yang sempit dan mendorong terbentuknya kesadaran kritis terhadap realitas sosial. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk individu yang mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Masyarakat berkeadaban juga ditandai oleh kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif. Konflik dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial yang tidak dapat dihindari, tetapi harus dikelola melalui dialog dan musyawarah. Pendidikan berperan dalam membekali individu dengan keterampilan komunikasi dan resolusi konflik yang efektif. Masyarakat berkeadaban merupakan hasil dari proses pendidikan yang tidak hanya

menekankan pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran sosial. Pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang mampu menjaga harmoni sosial dan membangun peradaban yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'rop, Y., & Hadi, S. (2024). Implementasi Model Pembelajaran IPS Berbasis Project-Based Learning dengan Kearifan Lokal di SMPIT BBS Bogor. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 6(2), 696–713.
- Abdurahman, A., Habibi, D. D., Muslim, B., Firdaus, P., & Rahmawati, D. (2025). Pendidikan karakter. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adzkia, R., Anastasya, F., Awalliyah, N. S., Kusumaningrum, H., & Jakarta, U. S. H. (n.d.). Manajemen keuangan sekolah: transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. 2(3).
- Ahmed, F. Z. (n.d.). Models and strategies of teaching Picture-word Inductive Mode. Retrieved March 26, 2026
- Akbar, A., Budimansyah, D., Hakam, K. A., Dahliyana, A., & Kurniawaty, I. (2026). Keteladanan Guru sebagai Role Model dalam Pengembangan Integritas Peserta Didik Sekolah Dasar.". *Jurnal syntax imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(6), 1552–1559. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i6.948>
- Alvirra, R., & Afrijal. (2025). Korupsi sebagai cerminan budaya sosial di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(5), 45–60.
- Al-zainuri, A. (n.d.). Pendidikan Antikorupsi Berbasis Multiliterasi Digital dalam Pembelajaran PPKn.
- Artikel. (n.d.). Retrieved April 2, 2026, from <https://inko.id/artikel/view/kejujuran-sebagai-fondasi-utama-dalam-kehidupan>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2024). Demokrasi untuk dijual: Pemilu, klientelisme, dan negara di Indonesia. Cornell University Press.

- Asroni, A. (2025). Peran Pendidik Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti-Korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1), 195–204.
- Auliyairrahmah, A., Djazilan, S., Nafiah, N., & Hartatik, S. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Integritas Sub Nilai Kejujuran melalui Program Kantin Kejujuran di Sekolah Dasar. *Edukatif: jurnal ilmu pendidikan*, 3(6), 3565–3578.
- Bandura, A. (2020). *Keterlepasan moral: Bagaimana orang melakukan kejahatan dan hidup dengan diri mereka sendiri*. Worth Publishers.
- Bank Dunia. (n.d.). *Meningkatkan efektivitas dan transparansi pemerintah: Perjuangan melawan korupsi*. Bank Dunia.
- Barrows, H. S. (1996). Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. *New Directions for Teaching and Learning*, 1996(68), 3–12. <https://doi.org/10.1002/tl.37219966804>
- Barrows, H. S., & Tamblyn, R. M. (1980). *Problem-based learning: An approach to medical education*. Springer Publishing Company.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid modernity*. Polity Press.
- Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 83(2), 39–43. <https://doi.org/10.1080/00098650903505415>
- Berkowitz & MW; Bier, MC. (2021). *Pendidikan karakter berbasis penelitian* (2nd ed.). Routledge.
- Blake, N., Smeyers, P., Smith, R., & Standish, P. (Eds.). (2003). *The Blackwell Guide to the Philosophy of Education* (1st ed.). Wiley.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longmans
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Christien Yunike Kournukova Pardede, E. E. S. (2025b). *Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Sikap Anti-Korupsi Siswa SMA*.
- Covey, S. R. (2004). *The 7 habits of highly effective people*. Free Press.
- Dewantara, K. H. (1962). *Pendidikan*. Yogyakarta: Taman Siswa.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. Macmillan.

- Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
- Dewi, A. C., Ramadhan, B., Fadhil, A. A., Idris, A. M., & Yusrin, M. A. D. (2023). Pendidikan Moral dan Etika Mengukir Karakter Unggul dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia, IJOCE*, 3(2).
- Duck, L. (1993). Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. *Childhood Education*, 69(4), 250–252.
- Durkheim, E. (1956). *Education and sociology*. Free Press.
- Fleming, T. (2022). Mezirow's theory of transformative learning and Freire's pedagogy: Theories in dialogue. *Adult Education Critical Issues*, 2(2), 7–19.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Freire, P. (2020). *Pedagogy of the oppressed*. In *Toward a sociology of education* (pp. 374–386). Routledge.
- Hakim, M. N. F., & Enjelita, F. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana BOS di Sekolah dan Madrasah. 1.
- Hanafiah, M. (2023). Perkembangan moral anak dalam perspektif pendidikan: Kajian teori Lawrence Kohlberg. *Jurnal Ameena, Ameena Journal*, 2(1), 75–91.
- Hasan, S. (2024). Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Manajemen Pendidikan Islam Untuk Menghadapi Krisis Moral Generasi Z. *Journal Of Social Science Research*, 4(5), 4949–4958. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15592>
- Hicken, A. (2021). Klientisme dan patronase dalam sistem politik (Vols. 1–24). *Annual Review of Political Science*.
- Hilalludin, H., & Khaer, S. M. (2025). Dinamika Study Literatur Hadits Priode Kelisanan Hingga Digitalisasi. *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, 2(1), 189–201.

- Hilda Taba. (1962). *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235–266.
- Hmelo-Silver, C. E., & Barrows, H. S. (2015). Problem-based learning: Goals for learning and strategies for facilitating. *Essential Readings in Problem-Based Learning: Exploring and Extending the Legacy of Howard S. Barrows*, 69–84.
- Hotimah, H. (2020). Penerapan metode pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan kemampuan bercerita pada siswa sekolah dasar. *Jurnal Edukasi*, 7(2), 5–11.
- Howard Gardner. (1999). *Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century*. New York: Basic Books.
- Huberts, L. (2021). Integritas: Apa itu dan mengapa penting. *Integritas Publik*. 23(1), 1-16.
- Husni, M. (2020). Memahami pemikiran karya paulo freire “pendidikan kaum tertindas”: kebebasan dalam berpikir. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 5(2), 41–60.
- Jamal, N. A. (n.d.). Budaya integritas dalam upaya penguatan karakter peserta didik sma negeri 3 metro. 7(2).
- Jerome S. Bruner. (1960). *The Process of Education*. Cambridge: Harvard University Press.
- John Dewey. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
- Jujur: Konsep, Pentingnya, dan Dampaknya dalam Kehidupan Sosial—Yayasan Zakat Sukses. (n.d.). Retrieved April 2, 2026
- Juniarsih, W., Harsono, H., & Suyatmini, S. (2025). Persepsi Guru Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pembiayaan Sekolah. 6(2).
- Keadilan—Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (n.d.). Retrieved April 2, 2026

- Kejujuran sebagai Fondasi Integritas dan Kebenaran. (n.d.). Retrieved April 2, 2026
- Kemendikbud, R. I. (2013). Buku pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi. Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Jakarta: Kemendikbud.
- Khoerunnisa, P., & Aqwal, S. M. (2020). Analisis Model-model Pembelajaran. *Fondatia*, 4(1), 1–27.
- Ki Hadjar Dewantara. (2013). *Pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka*. UST-Press.
- Klitgaard, R. (2001). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Kohlberg, L. (1981). *Essays on Moral Development*. San Francisco: Harper & Row.
- Komariyah, S. (2025). The Relevance of Paulo Freire’s Dialogical Concept in Enhancing Mathematical Understanding in Islamic Elementary Schools: Relevansi Konsep Dialog Paulo Freire dalam Meningkatkan Pemahaman Matematika di Madrasah Ibtidaiyah. *Numbers: Jurnal Pendidikan Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam*, 3(1), 10–20.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Pendidikan anti korupsi*. KPK.
- Kristjánsson, K. (2020). Buku pegangan Routledge tentang pendidikan karakter (atau: *The Routledge Handbook of the Philosophy of Character Education*). Routledge (Taylor & Francis Group).
- Leonia, RA; & Candra, KI. (2025). Menjelajahi perkembangan moral pada masa kanak-kanak awal: Mengintegrasikan perspektif Piaget, Kohlberg, Hoffman, dan Haidt melalui pembelajaran berbasis proyek kearifan lokal. *Jurnal Pendidikan Kearifan Lokal Indonesia*, 1(1).

- Lev Vygotsky. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge: Harvard University Press.
- Lickona, T. (1997). Chapter IV: Educating for Character: A Comprehensive Approach. *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education*, 98(6), 45–62.
- Lickona, T. (2013). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Lickona,. (2021). *Mendidik untuk karakter: Bagaimana sekolah kita dapat mengajarkan rasa hormat dan tanggung jawab*. Bantam Books (edisi asli 1991); Bumi Aksara (terjemahan Indonesia).
- Mas'ud, F., Eufrasia, E., Tonis, M., Payong, E. W., Openg, W. F. K., & Laga, O. E. (2025). Membangun Karakter Moral Melalui Pendidikan Etika Di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 247–260.
- Montessori, M., Tiara, M., Ambiyar, A., & Islami, S. (2021). Dialogue method in high school anti-corruption education. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(4), 1–21.
- Muaddab, H., & Nafisah, K. (2023). Kepemimpinan Moral Dalam Perpektif The Model For Interpersonal Teacher Behavior. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 7(1).
- Muasyaroh, S., Safira, N., & Hapidoh, S. (2026). Implementasi Kode Etik Guru Di Sekolah Dasar Dan Pengembangan Etika Pofesi Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 2165–2175.
- Mueller, J. (2005). The authentic assessment toolbox: Enhancing student learning through online faculty development. *Journal of Online Learning and Teaching*, 1(1), 1–7.
- Nabila, A., Rosidah, N., Salma, L., Jannani, F., & Mu'alimin, M. A. (2024). Pendidikan Dan Model Pengelolaan Konflik. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 223–234. <https://doi.org/10.54066/jrime.v2i1.1138>

- Nainggolan, D. M., Simarmata, A. P. T., Marbun, I. D., & Naibaho, D. (2025). Peran Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Kristen Sebagai Teladan dalam Meningkatkan Disiplin dan Moral Peserta Didik. *International Transformative Education and Humanities Journal*, 1(2), 900–908.
- Nirwana, H., Setyaningsih, S., & Hardhienata, S. (2025). *Komitmen Profesional: Pilar Utama Guru dalam Membangun Pendidikan Berkualitas*. Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Nucci, L., Narváez, D., & Krettenauer, T. (2022). *Buku pegangan pendidikan moral dan karakter*. Routledge (Taylor & Francis Group).
- Nucci, L., Narváez, D., & Krettenauer, T. (2022). *Buku pegangan pendidikan moral dan karakter*. Routledge (Taylor & Francis Group).
- Nurjanah, AS; Rahma, IZ; Gunawan, & ANIL; Rasiin, R. (2024). Pendidikan moral dalam pembentukan karakter anak usia dini di era krisis mora. *FAJAR: Jurnal Pendidikan Islam*, *FAJAR Jurnal Pendidikan Islam* (Kosongkan Jika Tidak Ada Series Tambahan, 5(2).
- Pamuji, S. (2024). Urgensi pendidikan karakter dalam mengatasi krisis moral di kalangan siswa. *Jurnal Pedagogi*, 1(1).
- Pantiwati, Y. (2016). Hakekat asesmen autentik dan penerapannya dalam pembelajaran biologi. *Jurnal Edukasi Matematika Dan Sains*, 1(1), 18–27.
- Paulo Freire. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Pepinsky, TB, Pierskalla, JH, & Sacks, A. (2020). *Birokrasi dan penyampaian layanan di Indonesia: Tantangan patronase dan tata kelola*. World Development.
- Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. New York: International Universities Press.
- Prabowo, HY, & Cooper, K. (2021). Memahami kembali korupsi di sektor publik Indonesia melalui perspektif perilaku. 4(28), 1035–1053.

- Prabowo, HY, & Cooper, K. (2021). Memahami kembali korupsi di sektor publik Indonesia melalui perspektif perilaku. 4(28), 1035–1053.
- Prasetya, K. H., & Taufan, I. S. (n.d.). Peran guru dalam membangun integritas siswa melalui pendidikan karakter dan moral di sma negeri 2 balikpapan.
- Pratama, D. (2021). Profesionalitas guru melalui pendekatan empat pilar pendidikan dalam mengembangkan nilai-nilai karakter siswa. Jurnal Paris Langkis, 1(2), 126–139.
- Purwadi, P. (2019). Pembelajaran inovatif dalam pembentukan karakter siswa. Mimbar Pendidikan, 4(1), 21–34.
- Putri, ARD; Dewi, RC; Azzahra, & RS; Wahyudi, A. (2024). Pengaruh pendidikan karakter terhadap perkembangan moral siswa sekolah dasar. NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan., 5(4).
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan prosedurnya.
- Rahmania, Y., & Ismiyati, I. (2018). Pengaruh efikasi diri, komunikasi interpersonal guru dan media pembelajaran terhadap perilaku belajar. Economic Education Analysis Journal, 7(3), 1115–1129.
- Ralph W. Tyler. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: University of Chicago Press.
- Rogers, C. R. (1969). Freedom to Learn. Columbus: Merrill.
- Saragih, E. S., & Mulya, Y. A. (2024). Melihat Persepsi Korupsi Masyarakat: Analisis Kolektivisme dan Gaya Pengambilan Keputusan. Journal Psikologi Forensik Indonesia, 4(1).
- Sari, V. K., Akhwani, A., Hidayat, M. T., & Rahayu, D. W. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Ekstrakurikuler dan Pembiasaan di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu, 5(4), 2106–2115. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1167>
- Savithri, Y. (2025). Pengaruh model pembelajaran reflektif dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa pada mata pelajaran pai di smp alhikmah

medan [phd Thesis, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara].

Schön, D. A. (2017). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Routledge.

Setyo, A., Elmunsyah, H., & Prasetyanto, A. E. (2024). Pembelajaran berbasis proyek di media sosial: Strategi peningkatan motivasi dan semangat belajar siswa sekolah kejuruan. *Research and Development Journal of Education*, 10(1), 471–479.

Simanjuntak, M. N., Nafiati, D. A., & Hendaryati, N. (2024). Menuju Pendidikan Berintegritas: Studi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS. *Journal of Education Research*, 5(4), 6191–6197.

Simanjuntak, M. N., Nafiati, D. A., & Hendaryati, N. (2024). Menuju Pendidikan Berintegritas: Studi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS. *Journal of Education Research*, 5(4), 6191–6197.

Sinurat, B. J. (2019). *Model Pembelajaran Simulasi*. Di Akses Dari Academia. Ed. Pada, 3. https://www.academia.edu/download/51938810/Model_Pembelajaran_Simulasi.pdf

Siswono, T. Y. (2002). Penilaian autentik dalam pembelajaran kontekstual. *Jurnal Matematika Dan Pembelajarannya*, 51–57.

Suharsono, R. S., Abidin, A., Halim, M., & Thamrin, M. (2025). Implementasi Sistem Managemen Keuangan Sekolah untuk Mewujudkan Transparansi Laporan Keuangan: Solusi Menuju Efisiensi dan Akuntabilitas Publik di Ma Muhammadiyah 1 Andongsari Ambulu. 6(2).

Syah, S. H., Cahyaningtyas, O. S., Astuti, D., Suwarni, S., & Umalihayati, U. (2024). Analisis Kompetensi Kepribadian Guru.". *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 8761–8769.

- Taufik, A., & Akip, M. (2021). Pembentukan karakter disiplin bagi siswa. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 11(2), 122–136.
- Tefbana, T., & Saingo, Y. A. (n.d.). Penguatan Karakter Berintegritas berbasis Pendidikan Agama Kristen di Sekolah.
- Thomas Lickona. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books
- Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. California. https://tecfa.unige.ch/proj/eteach-net/Thomas_researchreview_PBL.pdf
- Transparency International. (2023). Indeks Persepsi Korupsi. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Tyler, R. W. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press.
- Unesco. (2015). *Global citizenship education: topics and learning objectives*. Paris: unesco.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). Education for justice (E4J) initiative. UNODC.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Wardana, A. D., Fauzen, M., & Bahri, S. (2025). Education Achievment: Journal of Science and Research Volume 6 Issue 3 November 2025 Journal Homepage:
- Wardana, A. D., Fauzen, M., & Bahri, S. (2025). Education Achievment: Journal of Science and Research Volume 6 Issue 3 November 2025 Journal Homepage:
- Wati, E. (2019a). Pendidikan antikorupsi di sekolah menurut islam. *Tajdid : Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin*, 17(1), 53–65.
- Website DJKN. (n.d.). Retrieved April 2, 2026, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papualuku/baca-artikel/17260/Yuk-Kenali-Nilai-Nilai-Antikorupsi.html>

- Wehr, D. J., Lewis, M., Ruge, G., Sabrina, F., Sohail, S., & Thakur, S. (2025). Collaborative Reflective Circles: A dialogic-pedagogical approach to enhance reflection in inclusive teaching and learning. *Education Without Boundaries*.
- Wiggins, G. (1998). *Educative Assessment. Designing Assessments To Inform and Improve Student Performance*. ERIC. <https://eric.ed.gov/?id=ed418997>
- Zuhriyah, D. E. F., Mamesah, M. F. A. S. I., Ramadhani, N. R. F., Auliarahma, S., Khoiruna, N. B., Munjiyat, S. N., Nabila, S., & Royyan, N. N. (2025). Analisis Filsafat Pendidikan John Dewey Melalui Konsep Learning by Doing dalam Pendidikan Modern. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(3), 1–20.